

LAPORAN *SURVEILLANCE*
PERBANKAN INDONESIA
LSPI
TW III 2024

LAPORAN *SURVEILLANCE*
PERBANKAN INDONESIA

TW III 2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan III-2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari data dan informasi maupun analisis/ulasan yang disajikan.

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan III-2024 ini memuat *overview* dan analisis kondisi perekonomian global maupun domestik, serta kaitannya terhadap perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, dan profil risiko yang dihadapi perbankan. Selain itu, dalam laporan ini tercakup juga kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh OJK pada periode laporan, perkembangan kelembagaan perbankan, serta koordinasi antar lembaga terkait perbankan. Pada laporan ini juga disajikan pembahasan khusus dengan topik "Inovasi dan Kolaborasi Bersama Generasi Muda untuk Membangun Sektor Jasa Keuangan Indonesia".

Secara umum, pada periode laporan, kondisi perekonomian global relatif terjaga sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global serta pelanggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama. Perekonomian UK dan Eropa tumbuh meningkat, AS menunjukkan penurunan, sementara Tiongkok mengalami perlambatan seiring dengan masih lemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya pelemahan di sektor properti. Laju penurunan inflasi global yang terus berlanjut khususnya inflasi di negara maju seperti AS, mendorong beberapa bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga. Pada September 2024, The Fed memangkas FFR sebesar 50 bps menjadi 4,75%-5,00% atau penurunan pertama sejak Maret 2020. Selain itu, perlu diperhatikan juga faktor risiko seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur tengah dan Ukraina serta faktor perubahan iklim yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan. Kekhawatiran juga masih menyelubungi pasar seiring dengan perkembangan kondisi politik AS menjelang pemilu presiden AS yang akan diselenggarakan pada November 2024. Di tengah perkembangan global tersebut, pada triwulan III-2024 ekonomi domestik tumbuh moderat dan relatif sama dengan pertumbuhan triwulan tahun sebelumnya, antara lain ditopang oleh ekspor dan pengeluaran Pemerintah yang tumbuh lebih tinggi. Sementara itu, pertumbuhan investasi dan konsumsi sedikit melambat dibandingkan triwulan-III tahun sebelumnya.

Ekonomi domestik yang tetap kuat juga tercermin pada indikator perbankan di triwulan III-2024 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 10,85% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (8,96%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari segmen korporasi yang baik sejalan dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang kuat. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 7,04% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya (6,54%, yoy) sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Hal ini tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 112,66% dan 25,40%, jauh di atas *threshold* masing-masing 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 26,84% meskipun menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 10,26% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit, dan melampaui pertumbuhan modal. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL gross yang menurun menjadi sebesar 2,21% dan NPL net cukup stabil menjadi 0,78%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik kendati pertumbuhan kredit/pembiayaan serta DPK relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga masih cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,05% dan 22,52%.

Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko ketidakpastian suku bunga, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi

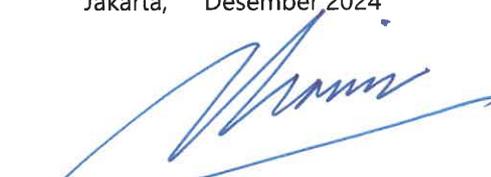
domestik. Adapun terkait kredit yang direstrukturisasi juga mengalami penurunan dengan jumlah yang relatif kecil yang berubah menjadi NPL. Hal ini sejalan dengan OJK yang senantiasa menghimbau perbankan untuk memperhatikan kualitas pelaksanaan restrukturisasi sekaligus terus mengkaji prospek pemulihan debitur. Namun demikian, bank diminta untuk tetap melakukan pengawasan dan *monitoring* yang ketat untuk mencegah timbulnya pemburukan kredit di masa depan. Selain itu, perbankan juga didorong untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga *coverage* CKPN secara memadai. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* dan asesmen terhadap kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan diiringi dengan penguatan regulasi. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan ketentuan perbankan berupa empat POJK terkait dengan Tata Kelola BPR/S, Pelaporan dan Permintaan SLIK, Strategi Anti Fraud Bagi LJK, dan Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional. Sementara itu, OJK juga terus aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global dan dampaknya kepada ekonomi domestik serta perbankan Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan secara individual yang intensif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, OJK juga meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential banking*), profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dan sehat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Desember 2024



Dian Ediana Rae
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Infografis	xi

Bab 1

Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

1. Perekonomian Global 3
2. Perekonomian Domestik 6

Bab 2

Kinerja Industri Perbankan Nasional

1. Kinerja Bank Umum 13
2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) 19
3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) 21

Bab 3

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

- A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS) 27
 1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi 27
 2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial) 30
 3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM 34
- B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS 35
 1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi 35
 2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial) 36

Daftar Box

Boks 1. Inovasi dan Kolaborasi Bersama Generasi Muda untuk Membangun Sektor Jasa Keuangan Indonesia	77
---	----

Bab 4

Profil Risiko Perbankan

- | | |
|----------------------|----|
| 1. Risiko Kredit | 41 |
| 2. Risiko Pasar | 49 |
| 3. Risiko Likuiditas | 52 |
| 4. Risiko Hukum | 53 |

Bab 5

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

- | | |
|--------------------------|----|
| 1. Pengaturan Perbankan | 57 |
| 2. Kelembagaan Perbankan | 60 |

Bab 6

Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

- | | |
|--|----|
| 1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan | 67 |
| 2. Koordinasi Bilateral | 69 |
| 3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional | 70 |

Lampiran

- | | |
|--|----|
| I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko | 79 |
| II. <i>Glossary</i> | 81 |

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum	13
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum	14
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan	14
Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank	16
Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	16
Tabel 6 Rasio Keuangan Bank Umum	18
Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum	18
Tabel 8 Komponen ATMR Bank Umum	18
Tabel 9 Perkembangan Kinerja BPR dan BPRS	19
Tabel 10 Indikator Umum BPR	20
Tabel 11 Indikator Umum BPRS	22
Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	29
Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)	33
Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank	35
Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	36
Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)	37
Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit	42
Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	43
Tabel 19 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan	43
Tabel 20 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	43
Tabel 21 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Juni 2024	49
Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori	51
Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan	53
Tabel 24 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	54
Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	54
Tabel 26 Jaringan Kantor BUK	60
Tabel 27 Jaringan Kantor BPR	61
Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	63
Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS	64

Daftar Grafik

Grafik 1 Inflasi Konsumen	4
Grafik 2 Suku Bunga Acuan	4
Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	5
Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara	5
Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas	6
Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	7
Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	9
Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia	9
Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	10
Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum	14
Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen	15
Grafik 12 Pergerakan DPK berdasarkan Valuta	15
Grafik 13 Kredit per Valuta	16
Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	17
Grafik 15 Perkembangan Aset BPR	20
Grafik 16 Perkembangan DPK BPR	20
Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	21
Grafik 18 Tren Aset BPRS	22
Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS	22
Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS	23
Grafik 21 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	30
Grafik 22 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial)	33
Grafik 23 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM	34
Grafik 24 Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	41
Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	41
Grafik 26 Pertumbuhan CKPN	42
Grafik 27 Tren Kredit Restrukturisasi	42
Grafik 28 Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi	46
Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi	46
Grafik 30 Tren Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	49
Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index	49
Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	50
Grafik 33 <i>Spread Yield</i> UST dan SBN	50
Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	50
Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan	51
Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor	51
Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB	52
Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta	52
Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK	52
Grafik 40 Perkembangan LCR dan NSFR	53
Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB	53
Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK	61
Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR	62
Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	62
Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	62
Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS	63
Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	64

Ringkasan Eksekutif

Secara umum, pada triwulan III-2024, kondisi perekonomian global relatif terjaga sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global serta pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama. Perekonomian UK dan Eropa tumbuh meningkat, AS menunjukkan penurunan, sementara Tiongkok mengalami perlambatan seiring dengan masih lemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya pelemahan di sektor properti. Laju penurunan inflasi global yang terus berlanjut khususnya inflasi di negara maju seperti AS, mendorong beberapa bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga. Pada September 2024, The Fed memangkas FFR sebesar 50 bps menjadi 4,75%-5,00% atau penurunan pertama sejak Maret 2020. The Fed memperkirakan total pemangkasan suku bunga 100 bps pada akhir tahun 2024, yang berarti bahwa terdapat dua pemotongan 25 bps lagi pada tahun 2024. Adapun pada tahun 2025, diharapkan pemotongan tambahan 1%, diikuti oleh pemotongan terakhir sebesar 50 bps pada tahun 2026. Selain itu, perlu diperhatikan juga faktor risiko seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur tengah dan Ukraina serta faktor perubahan iklim yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan. Kekhawatiran juga masih menyelimuti pasar seiring dengan perkembangan kondisi politik AS menjelang pemilu presiden AS yang akan diselenggarakan pada November 2024. Di tengah perkembangan global tersebut, pada triwulan III-2024 ekonomi domestik tetap resilien dan tumbuh moderat sebesar 4,95% (yoy) relatif sama dengan triwulan III tahun lalu sebesar 4,94% (yoy), namun sedikit melandai dari 5,05% (yoy) pada triwulan II-2024. Pertumbuhan ekonomi domestik yang sedikit melandai namun tetap terjaga antara lain ditopang oleh ekspor dan pengeluaran Pemerintah yang tumbuh lebih tinggi, kendati pertumbuhan investasi dan konsumsi sedikit melambat dibandingkan triwulan-III tahun sebelumnya.

Ekonomi domestik yang tetap resilien juga terekam pada indikator perbankan di triwulan III-2024 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 10,85% (yoy) meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (8,96%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari segmen korporasi yang baik sejalan dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang kuat. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 7,04% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya (6,54%, yoy) sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Hal ini tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 112,66% dan 25,40%, jauh di atas *threshold* masing-masing 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 26,84% meskipun menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 10,26% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit, dan melampaui pertumbuhan modal. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* yang menurun menjadi sebesar 2,21% dan NPL *net* cukup stabil menjadi 0,78%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik kendati pertumbuhan kredit/pembiayaan serta DPK relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga masih cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,05% dan 22,52%.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi. Dalam penguatan regulasi, pada periode laporan, OJK menerbitkan ketentuan perbankan berupa empat POJK terkait dengan Tata Kelola BPR/S, Pelaporan dan Permintaan SLIK, Strategi Anti Fraud Bagi LJK, dan Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

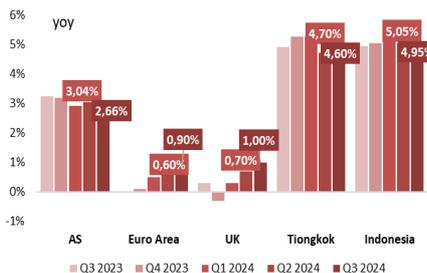
Triwulan III 2024

Ekonomi Global



- Kondisi perekonomian global relatif terjaga sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global serta pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama. Perekonomian UK dan Eropa tumbuh meningkat, AS menurun, sementara Tiongkok mengalami perlambatan seiring dengan masih lemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya pelemahan di sektor properti.
- Laju penurunan inflasi global yang terus berlanjut khususnya inflasi di negara maju seperti AS, mendorong beberapa bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga. Pada September 2024, The Fed memangkaskan FFR sebesar 50 bps menjadi 4,75%-5,00% atau penurunan pertama sejak Maret 2020. The Fed memperkirakan total pemangkasan suku bunga 100 bps pada akhir tahun 2024, yang berarti bahwa terdapat dua pemotongan 25 bps lagi pada tahun 2024.
- Faktor risiko lainnya yang perlu diperhatikan antara lain perkembangan konflik geopolitik di Timur tengah dan Ukraina, faktor perubahan iklim yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan, serta kondisi politik AS menjelang pemilu presiden AS November 2024.

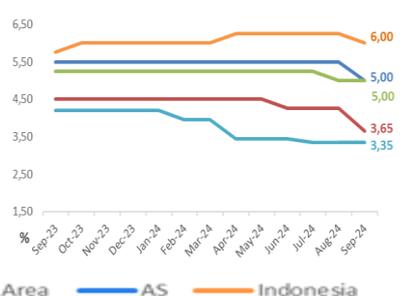
Pertumbuhan Ekonomi



Inflasi Global

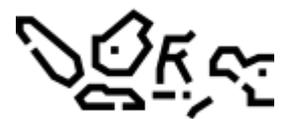


Suku Bunga Global

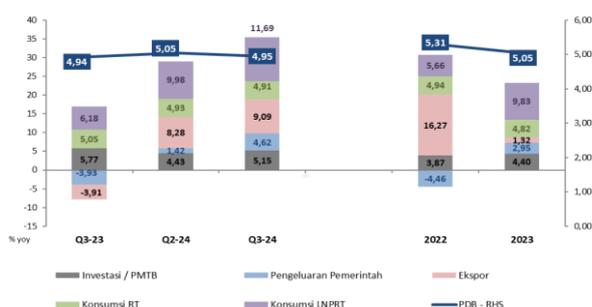


Ekonomi Domestik

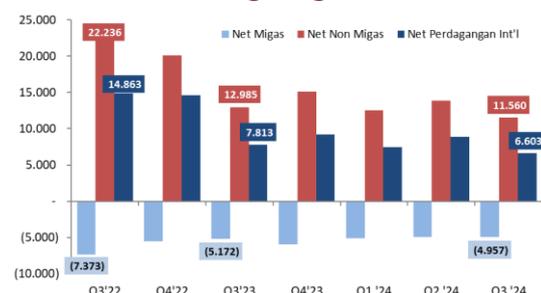
- Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 tumbuh moderat sebesar 4,95% (yoy), relatif masih sama dengan triwulan III tahun lalu sebesar 4,94% (yoy). Namun demikian, angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini merupakan yang terendah sejak awal tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi domestik ditopang komponen ekspor dan pengeluaran Pemerintah yang tumbuh lebih tinggi. Sementara itu, pertumbuhan investasi dan konsumsi sedikit melambat dibandingkan triwulan-III tahun sebelumnya.
- Berdasarkan lapangan usaha, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 dibandingkan triwulan sebelumnya selama 2024 dipicu oleh perlambatan pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan pertambangan. Kendati demikian, beberapa sektor tetap mampu tumbuh positif di antaranya konstruksi, pertanian, dan administrasi pemerintahan



PDB Indonesia



Neraca Perdagangan Indonesia



INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan III 2024

KINERJA



Aset

7,13% (yoy)

8,12% (yoy)

Rp12.147 T



DPK

6,54% (yoy)

7,04% (yoy)

Rp8.721 T



Kredit

8,96% (yoy)

10,85% (yoy)

Rp7.579 T



CAR

27,33%

26,84%



ROA

2,73%

2,73%

TW III-23

TW III-24



Bank Umum



Bank Umum Konvensional



Bank Umum Syariah

6,92% (yoy)

7,89% (yoy)

Rp11.527 T

6,56% (yoy)

6,78% (yoy)

Rp8.237 T

8,66% (yoy)

10,77% (yoy)

Rp7.179 T

27,43%

26,92%

2,76%

2,76%

11,31% (yoy)

12,50% (yoy)

Rp620 T

6,04% (yoy)

11,70% (yoy)

Rp483 T

14,81% (yoy)

12,32% (yoy)

Rp401 T

25,14%

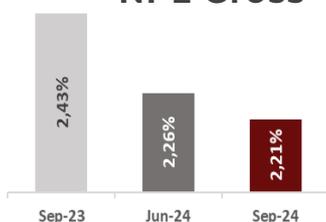
25,36%

2,04%

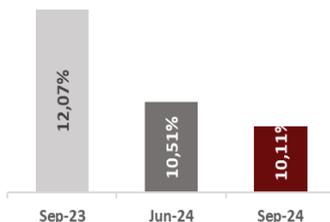
2,02%

Risiko Kredit

NPL Gross

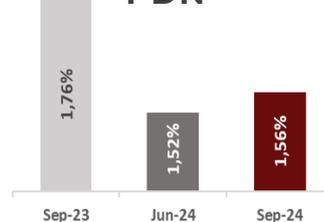


LaR



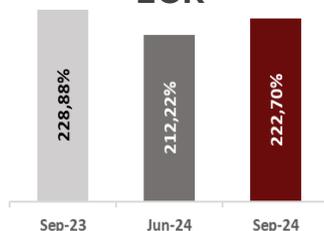
Risiko Pasar

PDN

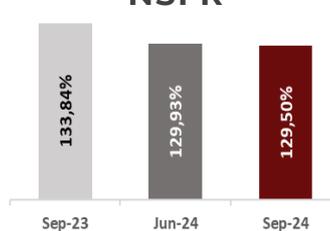


Risiko Likuiditas

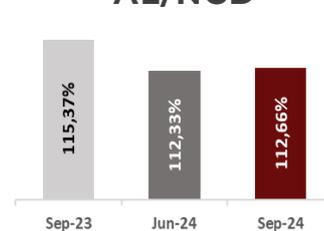
LCR



NSFR



AL/NCD



**PROFIL
RISIKO
BANK
UMUM**

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan III 2024

KINERJA						
	Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA	
 Bank Perkonomian Rakyat (BPR)	8,35% (yoy)	9,57% (yoy)	9,45% (yoy)	30,94%	1,34%	TW III-23
	5,17% (yoy) Rp200 T	5,52% (yoy) Rp142 T	6,42% (yoy) Rp147 T	31,05%	1,24%	TW III-24
 Bank Perkonomian Rakyat Syariah (BPRS)	15,79% (yoy)	13,02% (yoy)	18,15% (yoy)	28,12%	2,18%	
	8,88% (yoy) Rp24 T	11,61% (yoy) Rp16 T	12,37% (yoy) Rp19 T	22,52%	1,39%	

KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN III 2024

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL PENETAPAN	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 9 Tahun 2024	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat dan Bank Perkonomian Rakyat Syariah	1 Juli 2024	BPR dan BPRS
POJK Nomor 11 Tahun 2024	Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	31 Juli 2024	Bank Umum, BPR, dan BPRS
POJK Nomor 12 Tahun 2024	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan	31 Juli 2024	Bank Umum, BPR, dan BPRS
POJK Nomor 13 Tahun 2024	Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional	12 Agustus 2023	Bank Umum Konvensional

Halaman ini sengaja dikosongkan

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Halaman ini sengaja dikosongkan

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan III-2024, kondisi ekonomi global relatif terjaga sejalan meredanya tekanan di pasar keuangan global di tengah pelonggaran kebijakan moneter. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi domestik sedikit melandai namun tetap terjaga antara lain ditopang oleh pertumbuhan ekspor dan konsumsi Pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan triwulan-III tahun sebelumnya.

1. Perekonomian Global

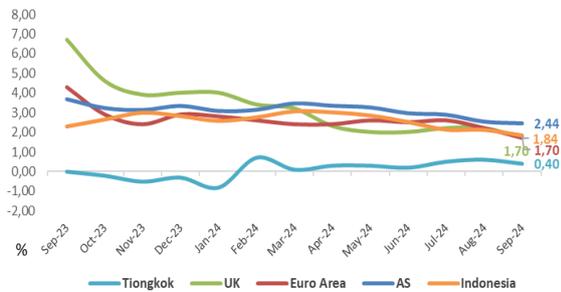
Pada triwulan III-2024, kondisi perekonomian global relatif terjaga sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global serta pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama. Kemudian, kondisi tensi geopolitik juga menurun seiring meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah karena Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken yang menyatakan bahwa upaya diplomatik yang dilakukan AS dalam mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza berpeluang besar membuahkan hasil. Ia berharap semua pihak mau menandatangani kesepakatan dalam waktu dekat. Kemudian, Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan bahwa Israel berkomitmen terhadap proposal yang diajukan AS terkait pembebasan sandera, sesuai dengan pertimbangan keamanan.

Laju penurunan inflasi global yang terus berlanjut khususnya inflasi di negara maju seperti AS, mendorong beberapa bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga. Namun demikian, ketidakpastian kondisi ekonomi global masih terjadi seiring kekhawatiran yang menyelimuti

pasar di tengah kondisi politik AS menjelang pemilu presiden AS yang akan diselenggarakan pada November 2024. Pada September 2024, The Fed memangkas FFR sebesar 50 bps menjadi 4,75%-5,00% atau penurunan pertama sejak Maret 2020. The Fed memperkirakan total pemangkasan suku bunga 100 bps pada akhir tahun 2024, yang berarti bahwa terdapat dua pemotongan 25 bps lagi pada tahun 2024. Adapun pada tahun 2025, diharapkan pemotongan tambahan 1%, diikuti oleh pemotongan terakhir sebesar 50 bps pada tahun 2026. The Fed menjelaskan pemangkasan suku bunga dilakukan karena meyakini inflasi AS sudah bergerak menuju target kisaran mereka di angka 2%. Namun, faktor utama dari pemangkasan sebesar 50 bps adalah tingkat pengangguran AS yang melambung. Adapun proyeksi data ekonomi AS di antaranya Inflasi PCE direvisi lebih rendah untuk tahun 2024 menjadi 2,3% (vs 2,6% dalam proyeksi Juni) dan 2025 menjadi 2,1% (vs 2,3%), Inflasi inti juga diperkirakan lebih rendah pada 2,6% untuk tahun 2024 (vs 2,8%) dan 2,2% untuk tahun 2025 (vs 2,3%), Pertumbuhan PDB diperkirakan sedikit turun pada 2% (vs

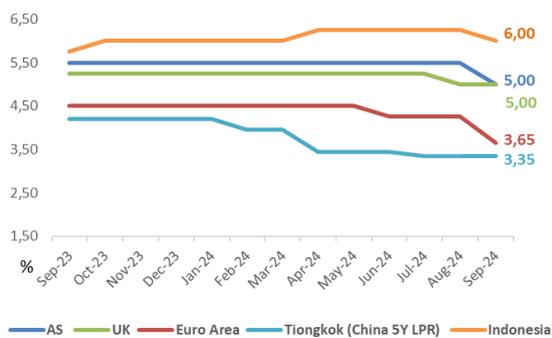
2,1%) tetapi perkiraan untuk tahun 2025 dipertahankan pada 2% dan tingkat pengangguran diperkirakan lebih tinggi tahun 2024 (4,4% vs 4%) dan tahun 2025 (4,4% vs 4,2%).

Grafik 1 Inflasi Konsumen



Sumber: Reuters

Grafik 2 Suku Bunga Acuan



Sumber: Reuters

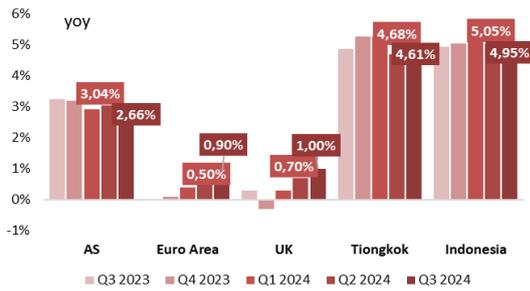
Sejalan dengan The Fed, ECB memangkas suku bunga fasilitas simpanan (*Deposit Facility Rate*) sebesar 25bps menjadi 3,5% dari semula 3,75%. Selain itu, ECB memangkas suku bunga acuan utama (*main refinancing operations*) dan fasilitas pinjaman marjinal (*marginal lending rate*) masing-masing sebesar 60bps menjadi 3,65% dan 3,90% dari semula masing-masing sebesar 4,25% dan 4,50% mulai tanggal 18 September. ECB tetap berkomitmen untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, menyesuaikan suku bunga berdasarkan data dan kondisi ekonomi tanpa berkomitmen pada jalur suku bunga tertentu.

Di sisi lain, BoE memutuskan mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada 5,00%, setelah sebelumnya pada Agustus 2024 memangkas 25bps. Selain itu, BoE juga mempertahankan laju pengurangan neraca sebesar sebesar £100 miliar (USD132 miliar) per tahun, dalam keputusan pengetatan kuantitatif. Demikian juga halnya dengan PBoC yang memutuskan mempertahankan *Loan Prime Rate* 1Y pada 3,35% dan 5Y pada 3,85%.

Pada triwulan laporan, pertumbuhan ekonomi negara-negara cenderung masih terdivergensi. Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan III-2024 melemah di tengah data tenaga kerja yang mulai membaik. Hal tersebut sejalan dengan ekonomi Tiongkok yang mencatatkan pelemahan pertumbuhan ekonomi pada periode laporan seiring ekonomi yang masih belum cukup kuat karena lemahnya permintaan domestik dan berlanjutnya tekanan sektor properti.

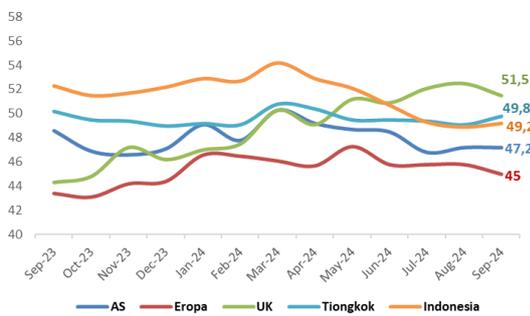
Ekonomi AS tumbuh 2,66% (yoy) menurun dari triwulan sebelumnya 3,04% (yoy). Adapun secara triwulanan, pertumbuhan juga menurun menjadi 2,8% (qtq) dari 3,0% (qtq) pada triwulan sebelumnya. PMI Manufaktur AS cenderung stabil dari bulan sebelumnya dan masih berada pada level kontraksi yaitu sebesar 47,2 atau di bawah perkiraan sebesar 47,5. Angka tersebut terus menunjukkan kontraksi di sektor manufaktur yang kini telah berlangsung selama enam bulan berturut-turut.

Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



Sumber: Trading Economics dan Reuters

Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: Reuters

Demikian halnya yang terjadi oleh Tiongkok yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2024 dibanding triwulan II-2024. Ekonomi Tiongkok tumbuh 4,60% (yoy) dari 4,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya atau menandai pertumbuhan yang paling lemah sejak triwulan I-2023 di tengah masih presistennya pelemahan sektor properti, ekonomi domestik yang lemah, risiko deflasi dan pembatasan perdagangan dengan Barat. Pada periode laporan, penjualan ritel Tiongkok juga menunjukkan pelemahan dari periode yang sama pada tahun lalu sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih pesimis dan permintaan yang lemah. Perlu diperhatikan tantangan seperti turunnya investasi pada sektor properti, risiko hutang, dan lemahnya konsumsi, terlebih dengan isu

ageing population, yang dapat menghambat pertumbuhan Tiongkok ke depan.

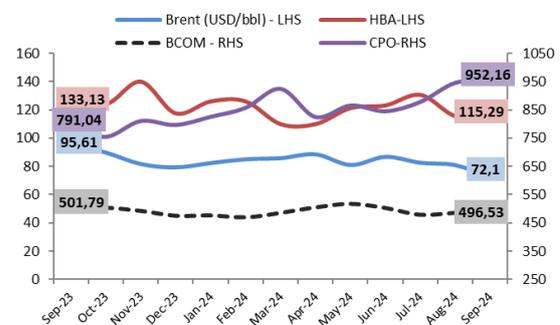
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Eropa dan UK pada triwulan III-2024 justru mengalami peningkatan. Ekonomi Eropa tumbuh sebesar 0,9% (yoy) dari 0,6% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Beberapa negara yang tergabung dalam zona Eropa, Irlandia (+2,0%) mencatat peningkatan tertinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, diikuti oleh Lithuania (+1,1%) dan Spanyol (+0,8%). Penurunan tercatat di Hungaria (-0,7%), Latvia (-0,4%) dan Swedia (-0,1%). Tingkat pertumbuhan tahun ke tahun positif untuk tujuh negara dan negatif untuk enam negara. Sejalan dengan ekonomi Eropa yang meningkat, ekonomi UK pada triwulan III-2024 tumbuh sebesar 1,00% (yoy) dari 0,70% pada triwulan sebelumnya.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat inflasi baik di Eropa maupun UK terus melanjutkan perlambatan bahkan pada periode September 2024 berada di bawah target 2,00% yaitu masing-masing sebesar 1,70% (yoy). Perlambatan tingkat inflasi di Eropa utamanya didorong oleh harga jasa yang melambat yaitu menjadi 3,9% (yoy) dari 4,1% (yoy) pada bulan sebelumnya dan biaya energi yang turun lebih cepat yaitu sebesar -6,1% (yoy) dari -3% (yoy) pada bulan sebelumnya. Adapun kinerja manufaktur Eropa dan UK belum sepenuhnya pulih sebagaimana ditunjukkan oleh PMI manufaktur Eropa yang masih pada level kontraksi, namun PMI manufaktur UK berada di level ekspansi meskipun juga menurun dari bulan sebelumnya.

Harga komoditas global pada triwulan III-2024 secara umum dalam tren penurunan namun masih berfluktuatif karena tidak hanya dipengaruhi permintaan dan penawaran, melainkan juga faktor geopolitik dan perubahan iklim. Namun demikian, harga komoditas mulai menurun seiring meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah. Pergerakan harga komoditas global hingga September 2024 menunjukkan penurunan sebagaimana ditunjukkan oleh indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada September 2024 tercatat sebesar 496,53 turun dari 501,79 pada September 2023. Penurunan tecermin pada turunnya harga Minyak Brent pada triwulan III-2024 yaitu mencapai 72,1 USD/bbl. Kemudian harga batubara juga mencatatkan penurunan menjadi sebesar 115,9 LHS. Sedangkan harga CPO justru menunjukkan peningkatan baik dari tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara umum, penurunan beberapa harga komoditas seperti minyak dunia salah satunya dipengaruhi oleh penurunan permintaan dari Tiongkok seiring sentimen negatif pasar akan pelemahan ekonomi Tiongkok setelah rilis data Caixin PMI Jasa Tiongkok pada September 2024 yang turun lebih tajam dari estimasi pasar menjadi 51,6. Adapun penurunan harga batubara dipicu oleh beberapa faktor di antaranya pelemahan permintaan batu bara Eropa seiring dengan makin kencangnya peralihan ke energi terbarukan. Kemudian di Asia terjadi penurunan impor batu bara yang salah satunya disebabkan oleh peningkatan produksi batu bara dalam negeri Tiongkok. Selain itu, India juga berencana mengurangi konsumsi batu bara

hingga 10% dalam dua tahun ke depan, dan Indonesia mempertimbangkan untuk menaikkan pajak ekspor batu bara sebesar 2%, yang semakin memperburuk situasi pasar. Di sisi lain, peningkatan harga yang terjadi pada komoditas CPO didorong oleh beberapa hal di antaranya peningkatan permintaan, terutama dari India dan Tiongkok, yang tidak diimbangi ketersediaan karena produksi mengalami penurunan akibat dari kemarau yang panjang.

Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas



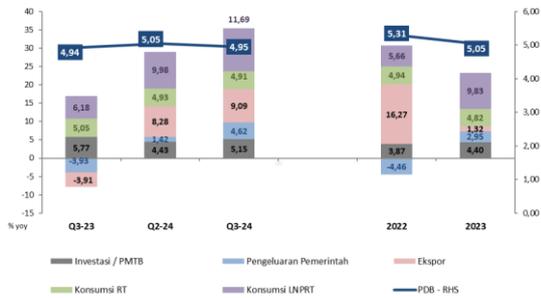
Sumber: Reuters

2. Perekonomian Domestik

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 tumbuh moderat sebesar 4,95% (yoy), relatif masih sama dengan triwulan III tahun lalu sebesar 4,94% (yoy). Namun demikian, angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini merupakan yang terendah sejak awal tahun 2024 (triwulan I-2024: 5,11% yoy dan triwulan II-2024: 5,05% yoy). Pada periode laporan, pertumbuhan ekonomi domestik yang sedikit melandai namun tetap terjaga ini antara lain ditopang oleh komponen ekspor dan pengeluaran Pemerintah yang tumbuh lebih tinggi. Sementara itu, pertumbuhan investasi dan konsumsi

sedikit melambat dibandingkan triwulan-III tahun sebelumnya.

Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS

Pada triwulan III-2024, komponen pengeluaran konsumsi masih menjadi kontributor utama pembentuk PDB Indonesia dengan porsi sebesar 53,23% (Konsumsi Rumah Tangga 51,94% dan Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga/LNPRT 1,29%). Pada periode laporan, pengeluaran konsumsi tumbuh 5,07% (yoy) sedikit melambat dibandingkan triwulan II-2023 sebesar 5,08% (yoy) namun lebih tinggi dari triwulan II-2024 yaitu 5,05% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan porsi terbesar (51,94%) yang tumbuh melambat dari 5,05% (yoy) pada triwulan III-2023 menjadi 4,91% (yoy). Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencatatkan penurunan terbesar utamanya pada: transportasi dan konsumsi serta pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya. Di sisi lain, pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dengan porsi 1,29% mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu dari 6,18% (yoy) pada triwulan III-2023 menjadi 11,69%

(yoy). Secara umum, pertumbuhan konsumsi domestik yang melambat ditengarai merupakan dampak dari penurunan jumlah kelas menengah yang diikuti dengan pelemahan daya beli masyarakat akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor. Sebagai implikasinya, masyarakat cenderung menahan konsumsi karena motif berjaga-jaga untuk menghindari ketidakpastian yang timbul dari gejolak geopolitik, sosial, maupun ekonomi saat ini. Meskipun demikian, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap terjaga di level optimis (>100) yakni 123,5 pada September 2024 bahkan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 121,7. Peningkatan IKK didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen dalam enam bulan ke depan yaitu masing-masing dari 112,2 dan 131,3 pada September 2023 menjadi 113,9 dan 133,1.

Sejalan dengan perkembangan komponen pengeluaran konsumsi yang menunjukkan perlambatan, komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan porsi sebesar 31,68% terhadap PDB tumbuh 5,15% (yoy) pada triwulan III-2024 melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,77% (yoy). Adapun pertumbuhan investasi yang melambat dipengaruhi oleh investasi bangunan dari 6,31% (yoy) pada triwulan III-2023 menjadi 6,02% (yoy). Tidak hanya itu, investasi non bangunan seperti kendaraan serta sumber daya hayati atau *Cultivated Biological Resources* (CBR) juga turut memengaruhi

perlambatan investasi pada periode laporan. Sejalan dengan informasi tersebut, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi investasi Indonesia pada triwulan III-2024 tumbuh 15,24% (yoy), melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 21,6% (yoy). Dalam kaitan tersebut, perlambatan pertumbuhan realisasi investasi pada triwulan III-2024 dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi perekonomian global yang masih tinggi sehingga memengaruhi perkembangan iklim investasi di dalam negeri. Meskipun demikian, pertumbuhan investasi pada periode laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,43% (yoy) seiring berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di sisi lain, komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah dengan porsi 6,86% mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada triwulan III-2024 yaitu sebesar 4,62% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -3,93% (yoy) pada triwulan III-2023. Pertumbuhan tersebut juga meningkat dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 1,42% (yoy). Peningkatan pengeluaran Pemerintah ini didukung oleh kebijakan belanja barang dan belanja pegawai yang cukup tinggi. Selain itu juga sebagai persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Serupa dengan hal tersebut, komponen ekspor barang dan jasa juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu mencapai 9,09% (yoy) pada triwulan III-2024 dari yang sebelumnya terkontraksi -3,91% (yoy) pada triwulan III-2023. Capaian

tersebut juga meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,28% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang meningkat, kontribusi komponen tersebut terhadap PDB juga menunjukkan adanya peningkatan pada triwulan III-2024 yaitu menjadi sebesar 24,22% dari 23,30%.

Kontribusi perdagangan internasional melalui ekspor terhadap PDB pada triwulan III-2024 yang meningkat dibandingkan tahun lalu membuktikan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia di tengah stagnasi ekonomi global. Pada September 2024, nilai ekspor Indonesia tumbuh positif sebesar 6,31% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -16,22% (yoy) pada September 2023. Perkembangan nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh transaksi nonmigas yang kembali tumbuh positif 8,08% (yoy) setelah terkontraksi -17,72% (yoy).

Dua komoditas utama ekspor non migas yang mendorong kenaikan pertumbuhan tersebut adalah produk manufaktur lainnya (porsi: 21,13%) dan batu bara (porsi: 12,23%). Komoditas produk manufaktur lainnya yang semula terkontraksi -5,50% (yoy) menjadi tumbuh positif sebesar 18,78% (yoy). Selaras dengan hal tersebut, komoditas batu bara juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 15,04% (yoy) setelah terkontraksi -47,11% (yoy) pada September 2023. Di samping itu, terdapat komoditas nikel yang mencatatkan kenaikan pertumbuhan cukup tinggi dari 3,11% (yoy) menjadi 29,91% (yoy) meskipun porsinya cukup kecil terhadap nilai ekspor nonmigas secara keseluruhan yakni sebesar 3,47%.

Sebaliknya, transaksi ekspor migas justru berkontraksi -18,09% (yoy) dari yang sebelumnya tumbuh positif sebesar 11,61% (yoy). Penurunan nilai ekspor migas utamanya dipengaruhi oleh komoditas hasil minyak (porsi: 1,42%) dan minyak mentah (porsi: 0,90%) yang masing-masing berkontraksi sebesar -37,22% (yoy) dan -3,61% (yoy) dari 67,44% (yoy) dan 26,31% (yoy) pada September tahun lalu.

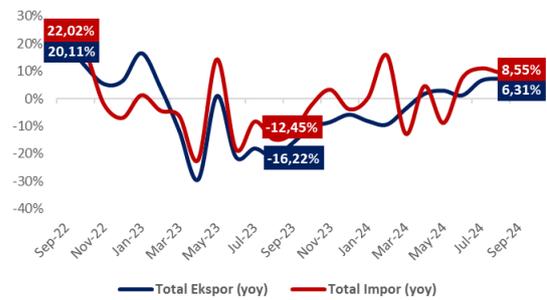
Sejalan dengan perkembangan komponen ekspor, impor (porsi: 20,36%) juga tumbuh positif sebesar 11,47% (yoy) dari yang sebelumnya berkontraksi -6,75% (yoy) pada triwulan III-2023. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya nilai impor pada September 2024 yang kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,55% (yoy) dari -12,45% (yoy). Peningkatan nilai impor tersebut didorong oleh transaksi nonmigas yang tumbuh 16,29% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar -14,46% (yoy).

Adapun komoditas impor nonmigas utama yang mendorong peningkatan tersebut antara lain: produk manufaktur lainnya (porsi: 20,49%); mesin untuk keperluan khusus (porsi: 6,96%); mesin untuk keperluan umum (porsi: 7,68%); dan perlengkapan elektrik (porsi: 5,36%). Komoditas produk manufaktur lainnya dan mesin untuk keperluan khusus masing-masing tumbuh dari -9,08% (yoy) dan -10,32% (yoy) pada triwulan III-2023 menjadi 16,72% (yoy) dan 19,62% (yoy). Sementara itu, komoditas mesin untuk keperluan umum dan perlengkapan elektrik masing-masing tumbuh dari -11,62% (yoy) dan -13,33% (yoy) menjadi 6,65% (yoy) dan 12,37% (yoy).

Di sisi lain, transaksi impor migas justru berkontraksi lebih dalam dari -2,85% (yoy) menjadi -24,04% (yoy) pada periode laporan. Penurunan nilai impor tersebut dipengaruhi oleh komoditas minyak mentah (porsi: 4,00%) dan hasil minyak (porsi: 9,44%) yang masing-masing berkontraksi -41,55% (yoy) dan -13,05% (yoy) dari 14,48% (yoy) dan -9,47% (yoy).

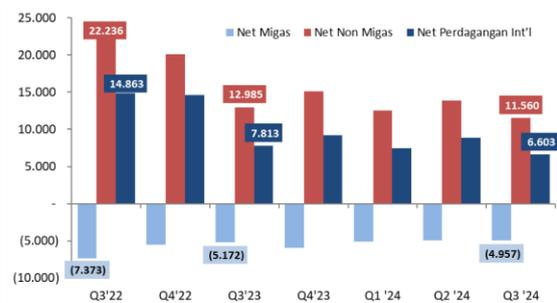
Nilai ekspor yang lebih tinggi daripada impor pada periode laporan mendorong neraca perdagangan melanjutkan surplus selama 53 bulan berturut-turut. Pada September 2024, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD3,23 miliar (defisit migas USD1,38 miliar dan surplus nonmigas USD4,61 miliar). Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan mencapai USD22,92 miliar pada periode Januari s.d. September 2024.

Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor



Sumber: BPS

Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia

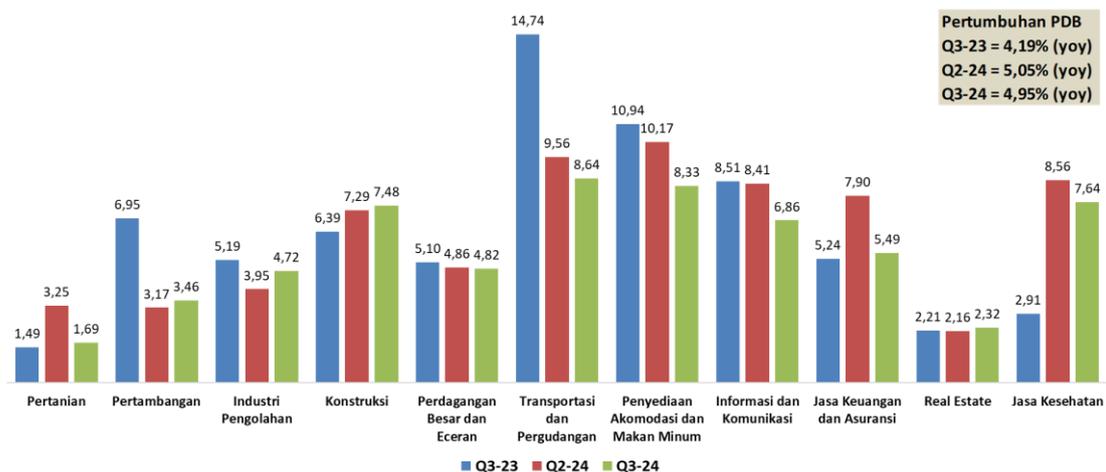


Sumber: BPS

Dilihat berdasarkan lapangan usaha, terdapat beberapa sektor dengan kontribusi cukup besar terhadap PDB (>5%) yang tumbuh melambat pada periode laporan. Pertama, sektor industri pengolahan (porsi: 20,36%) tumbuh 4,72% (yoy) melambat dari 5,19% (yoy) pada triwulan III-2023. Kedua, sektor perdagangan besar dan eceran (porsi: 13,04%) dari 5,10% (yoy) menjadi 4,82% (yoy). Ketiga, sektor pertambangan dan penggalian (porsi: 7,38%) dari 6,95% (yoy) menjadi 3,46% (yoy). Kemudian diikuti dengan sektor informasi dan komunikasi (porsi: 6,64%) dari 8,51% menjadi 6,86%. Selain keempat sektor tersebut, terdapat sektor lain yang menjadi penyumbang melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 meskipun porsinya terhadap PDB <5% yaitu sektor

transportasi dan pergudangan (porsi: 4,68%) yaitu dari 14,74% (yoy) menjadi 8,64% (yoy). Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2023, antara lain: konstruksi (porsi: 9,76%); pertanian, kehutanan, dan perikanan (porsi: 12,32%); serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (porsi: 2,69%). Sektor konstruksi tumbuh meningkat dari 6,39% (yoy) menjadi 7,48% (yoy). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh dari 1,49% (yoy) menjadi 1,69% (yoy). Sementara itu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh cukup signifikan yaitu dari -6,24% (yoy) menjadi 3,94% (yoy) meskipun kontribusinya relatif kecil terhadap pembentukan nilai PDB.

Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan III-2024 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan masih cukup baik ditandai dengan kredit dan DPK bank umum yang tumbuh meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, rentabilitas dan efisiensi perbankan juga masih terjaga meskipun menurun dari tahun sebelumnya.

1. Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan III-2024 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold* meskipun mengalami penurunan, utamanya dipengaruhi oleh penyaluran kredit yang tumbuh melebihi penghimpunan dana. Hal ini juga tecermin pada fungsi intermediasi

perbankan yang membaik, dengan kredit dan DPK yang masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Rentabilitas perbankan juga masih tercatat stabil terlihat dari rasio ROA sebesar 2,73%, sama dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, perlu diperhatikan efisiensi perbankan tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya tecermin dari BOPO yang meningkat sebesar 78,71%.

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum

Indikator	2023		2024		qtq		yoy	
	Sep	Des	Jun	Sep	Jun '24	Sep'24	Sep '23	Sep '24
Jumlah Bank	105	105	106	105	-	(1)		-
BUK	92	92	92	91	-	(1)		(1)
BUS	13	13	14	14	-	-		1
Total Aset (Rp Miliar)	11,234,971	11,765,838	12,048,215	12,147,173	1.45%	0.82%	7.13%	8.12%
BUK	10,684,050	11,171,129	11,441,328	11,527,363	1.50%	0.75%	6.92%	7.89%
BUS	550,921	594,709	606,887	619,810	0.51%	2.13%	11.31%	12.50%
Kredit (Rp Miliar)	6,837,296	7,090,243	7,478,404	7,579,250	3.23%	1.35%	8.96%	10.85%
BUK	6,480,552	6,721,867	7,088,644	7,178,573	3.24%	1.27%	8.66%	10.77%
BUS	356,744	368,376	389,760	400,677	3.00%	2.80%	14.81%	12.32%
DPK (Rp Miliar)	8,147,169	8,457,929	8,722,035	8,720,782	1.40%	-0.01%	6.54%	7.04%
BUK	7,714,502	7,991,997	8,247,384	8,237,476	1.52%	-0.12%	6.56%	6.78%
BUS	432,667	465,932	474,651	483,306	-0.58%	1.82%	6.04%	11.70%
- Giro (Rp Miliar)	2,471,698	2,662,551	2,740,839	2,703,615	2.89%	-1.36%	9.84%	9.38%
BUK	2,407,130	2,588,476	2,659,022	2,619,296	3.00%	-1.49%	10.11%	8.81%
BUS	64,568	74,075	81,816	84,319	-0.63%	3.06%	0.57%	30.59%
- Tabungan (Rp Miliar)	2,576,624	2,669,183	2,746,104	2,764,829	1.96%	0.68%	2.03%	7.30%
BUK	2,415,460	2,492,249	2,566,125	2,581,786	1.93%	0.61%	1.84%	6.89%
BUS	161,163	176,935	179,980	183,043	2.34%	1.70%	5.02%	13.58%
- Deposito (Rp Miliar)	3,098,848	3,126,195	3,235,092	3,252,337	-0.27%	0.53%	7.91%	4.95%
BUK	2,891,912	2,911,273	3,022,237	3,036,394	-0.08%	0.47%	7.85%	5.00%
BUS	206,936	214,922	212,855	215,944	-2.90%	1.45%	8.70%	4.35%

Sumber: SPI September 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

1.1 Aset Bank Umum

Aset Bank Umum tumbuh 8,12% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,13% (yoy). Jika dilihat dari jenis usaha bank, BUS masih tumbuh tinggi 2 digit sebesar 12,50% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, aset BUK juga tumbuh 8,12% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,13% (yoy), dan mendorong pertumbuhan aset secara umum.

Sebagian besar aset bank umum merupakan aset BUK dengan porsi 94,90%, sementara itu aset BUS memiliki porsi 5,10%. Meskipun masih cukup kecil, porsi aset BUS tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,90%.

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan aset terjadi pada seluruh kelompok bank kecuali KCBLN yang justru tercatat tumbuh melambat secara tahunan sebesar 5,04% (yoy) dan berkontraksi secara triwulanan -2,89% (qtq), namun dengan porsi yang kecil 4,79%. Sementara itu, kelompok Bank BUSN (porsi 44,89%) dan BUMN (41,94%) tumbuh meningkat dibanding tahun sebelumnya masing-masing 7,65% (yoy) dan 9,13% (yoy).

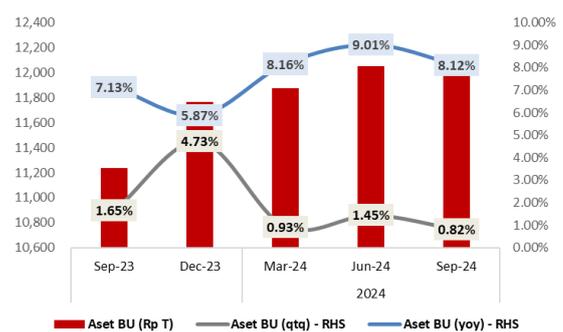
Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat Bank Umum terbesar mencapai 49,73% atau hampir setengah dari aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 Bank Umum terbesar mencapai 79,43% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum

Periode	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Sep '23	49.94%	79.16%
Des '23	50.61%	79.70%
Mar '24	50.14%	79.54%
Jun '24	49.89%	79.49%
Sep '24	49.73%	79.43%

Sumber: OJK

Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum



Sumber: SPI September 2024

Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '23	Jun '24	Sep '24		Jun '24	Sep '24	Sep '23	Sep '24
BUMN	4.668.797	5.076.692	5.095.028	41,94%	1,59%	0,36%	8,00%	9,13%
BUSN	5.066.066	5.377.464	5.453.386	44,89%	1,07%	1,41%	7,02%	7,65%
BPD	945.728	994.429	1.016.463	8,37%	2,21%	2,22%	4,61%	7,48%
KCBLN	554.381	599.630	582.296	4,79%	2,49%	-2,89%	5,25%	5,04%
Total	11.234.971	12.048.215	12.147.173	100%	1,45%	0,82%	7,13%	8,12%

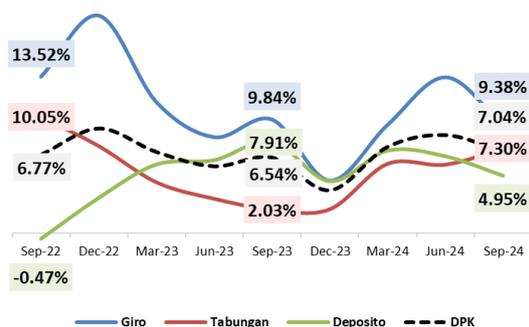
Sumber: SPI September 2024

1.2 Sumber Dana Bank Umum

Pada periode laporan, DPK Bank Umum tumbuh 7,04% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,54% (yoy). Berdasarkan jenis usaha, DPK tercatat meningkat baik pada BUK maupun BUS. DPK BUK menjadi pendorong utama kenaikan DPK pada bulan laporan, yaitu sebesar 6,78% (yoy) dari 6,56% (yoy) pada Sep-23, atau meningkat Rp522,97T.

Peningkatan pertumbuhan DPK didorong oleh peningkatan Tabungan (porsi 31,70%) yang tercatat tumbuh 7,30% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 2,03% (yoy). Di sisi lain, Deposito dan Giro (porsi masing-masing 37,29% dan 31,00%) justru tumbuh melambat 4,95% (yoy) dan 9,38% (yoy).

Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen

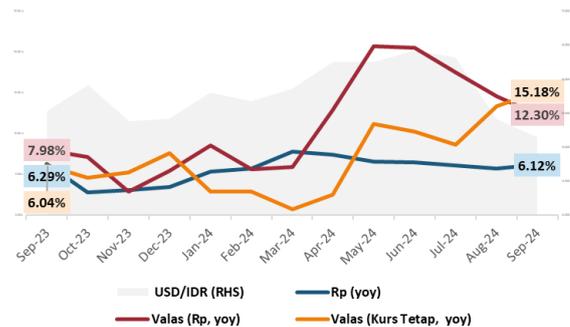


Sumber: SPI September 2024

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (84,37%) tercatat tumbuh 6,12% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,29% (yoy). Di sisi lain, DPK Valas tercatat tumbuh tinggi 12,30% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,98% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas tercatat juga tumbuh sebesar 15,18% (yoy),

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,04% (yoy). Selisih tersebut menandakan meskipun secara umum DPK Valas memang meningkat, peningkatan utamanya disebabkan kurs Rupiah yang terdepresiasi pada periode laporan.

Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta



Sumber: SPI September 2024

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK terdapat pada kelompok Bank BUSN sebesar 44,46%, diikuti BUMN sebesar 43,69%. DPK BUSN tumbuh meningkat menjadi 6,00% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,54% (yoy), yang secara umum masih mendorong pertumbuhan DPK. Namun demikian, DPK BUMN tercatat tumbuh sedikit melambat 8,88% (yoy) dari 9,07% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 77,56%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (52,40%) diikuti Jawa Timur (8,85%) dan Jawa Barat (7,70%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Sep '23	Jun '24	Sep '24		Jun '24	Sep '24	Sep '23	Sep '24
BUMN	3,499,801	3,824,397	3,810,518	43.69	1.39%	-0.36%	9.07%	8.88%
BUSN	3,657,644	3,867,211	3,877,080	44.46	1.18%	0.26%	5.54%	6.00%
BPD	735,657	761,328	790,239	9.06	1.20%	3.80%	3.21%	7.42%
KCBLN	254,067	269,099	242,945	2.79	5.57%	-9.72%	-2.35%	-4.38%
Total	8,147,169	8,722,035	8,720,782	100	1.40%	-0.01%	6.54%	7.04%

Sumber: SPI September 2024

Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	Nominal Rp(M)				% Pangsa terhadap total DPK
	Sep '23	Des '23	Jun '24	Sep '24	
DKI Jakarta	4,274,530	4,499,584	4,599,624	4,552,099	52.40%
Jawa Timur	724,130	736,718	766,653	768,869	8.85%
Jawa Barat	632,166	658,144	668,951	669,299	7.70%
Jawa Tengah	400,468	404,249	422,536	421,890	4.86%
Sumatera Utara	307,112	318,612	324,225	325,064	3.74%
Total DPK 5 Provinsi	6,338,405	6,617,307	6,781,989	6,737,221	77.56%
Total DPK	8,147,169	8,457,929	8,722,035	8,686,720	

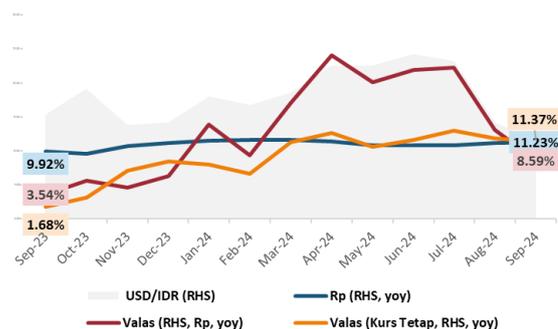
Sumber: SPI September 2024, diolah

1.3 Penggunaan Dana Bank Umum

Kredit Bank Umum tumbuh 10,85% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 8,96% (yoy). Jika dilihat per jenis usaha, kredit BUK tumbuh 10,77% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,66% (yoy). Sementara itu, pembiayaan BUS tumbuh 12,32% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 14,81% (yoy), meskipun dengan porsi relatif kecil (5,54%).

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 86,03%, sedangkan kredit valas sebesar 13,97%. Secara umum, peningkatan pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 11,23% (yoy) dari 9,92% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, kredit valas juga tercatat tumbuh meningkat 8,59% (yoy)

setelah tahun sebelumnya tumbuh 3,54% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, kredit valas juga tercatat meningkat tumbuh 11,37% (yoy) dari 1,68% (yoy) pada tahun sebelumnya (Grafik 18).

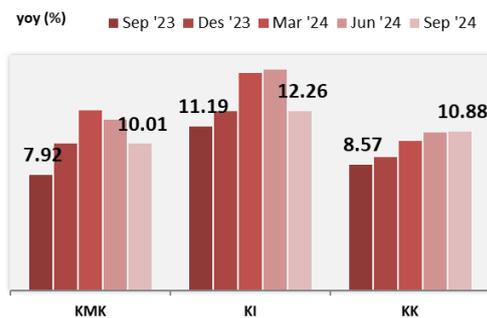
Grafik 13 Kredit per Valuta

Sumber: SPI September 2024

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,53%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) dengan porsi sebesar 45,30% dan kredit investasi (KI)

sebesar 27,23%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,47%. Secara umum, kredit tumbuh pada seluruh jenis penggunaan. Pertumbuhan kredit secara umum didorong oleh Kredit Produktif yang tercatat tumbuh 10,84% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,11% (yoy). Kredit konsumtif juga tumbuh 10,88% (yoy) dari 8,57% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI September 2024

1.4 Rentabilitas Bank Umum

Pada September 2024, rentabilitas Bank Umum tercatat stabil ditandai dengan ROA yang tetap sebesar 2,73%, sama seperti tahun sebelumnya. Penurunan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang melambat hanya tumbuh 8,19% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 17,06% (yoy).

Dari sisi margin, NIM tercatat turun 25 bps menjadi sebesar 4,60% dari 4,85% pada tahun sebelumnya. Penurunan NIM seiring dengan melambatnya pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 2,84% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,12% (yoy). Melambatnya pertumbuhan pendapatan bunga bersih utamanya disebabkan melambatnya pendapatan bunga dari Bank Indonesia yang memiliki porsi cukup besar. Selain itu, pendapatan bunga dari penempatan pada

bank lain juga berkontraksi pada bulan laporan seiring dengan meningkatnya penempatan Bank pada SRBI.

Selain itu, efisiensi Bank Umum juga tercatat sedikit menurun tecermin dari rasio BOPO perbankan yang meningkat 237 bps dari 76,34% menjadi 78,71%. Peningkatan BOPO disebabkan oleh pertumbuhan beban operasional yang tumbuh tinggi 23,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasional yang tumbuh 19,88% (yoy), sehingga secara umum membuat BOPO meningkat.

Selanjutnya, CIR tercatat 64,10% pada September 2024 naik dari 59,49% pada September 2023. Peningkatan CIR tersebut disebabkan oleh beban operasional selain beban bunga yang meningkat sebesar 23,56% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional selain bunga yang meningkat sebesar 18,90% (yoy). Namun demikian, secara umum rasio CIR sebesar 64,10% mencerminkan tingkat efisiensi bank umum yang masih cukup baik.

1.5 Permodalan Bank Umum

Secara umum pada periode September 2024, kondisi permodalan perbankan masih cukup solid meskipun sedikit turun, yaitu tecermin dari nilai CAR sebesar 26,84% yang turun 49 bps dari tahun lalu sebesar 27,33%. Penurunan nilai CAR tersebut didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 10,26% (yoy) dan melampaui pertumbuhan modal.

Pertumbuhan ATMR utamanya dipengaruhi oleh kenaikan ATMR Kredit dan Pasar yang tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 9,33% dan 102,10% (yoy). Pertumbuhan ATMR Kredit seiring dengan

penyaluran kredit yang tumbuh 12,36%, sedangkan pertumbuhan ATMR Pasar dipengaruhi adanya penyesuaian perhitungan ATMR pada tahun 2024.

Sementara itu, modal tumbuh 8,30% (yoy) cenderung melambat dari tahun lalu yang tumbuh 8,49% (yoy).

Tabel 6 Rasio Keuangan Bank Umum

Indikator	2023		2024		qtq		yoy	
	Sep	Dec	Jun	Sep	Jun '24	Sep'24	Sep '23	Sep '24
CAR (%)	27.33	27.65	26.09	26.84	13	75	224	(49)
BUK	27.43	27.75	26.13	26.92	15	79	226	(51)
BUS	25.14	25.41	25.29	25.36	(37)	7	162	22
ROA (%)	2.73	2.74	2.66	2.73	4	7	22	-
BUK	2.76	2.78	2.69	2.76	4	7	23	-
BUS	2.04	1.88	2.06	2.02	3	(4)	(3)	(2)
NIM / NOM (%)	4.85	4.81	4.57	4.60	(2)	3	8	(25)
BUK	4.96	4.92	4.66	4.70	(2)	4	10	(26)
BUS	2.72	2.55	2.71	2.65	(2)	(6)	6	(7)
BOPO (%)	76.34	78.92	78.68	78.71	(137)	3	(82)	237
BUK	76.34	78.94	78.77	78.79	(139)	2	(84)	245
BUS	76.53	78.31	76.27	76.68	(62)	41	(14)	15
NPL / NPF Gross (%)	2.43	2.19	2.26	2.21	1	(5)	(35)	(22)
BUK	2.44	2.19	2.28	2.21	1	(7)	(35)	(23)
BUS	2.28	2.10	2.04	2.14	-	10	(29)	(14)
NPL / NPF Net (%)	0.77	0.71	0.78	0.78	1	-	-	1
BUK	0.77	0.72	0.79	0.78	1	(1)	(1)	1
BUS	0.69	0.63	0.67	0.77	3	10	2	8
LDR / FDR (%)	83.92	83.83	85.74	86.91	151	117	187	299
BUK	84.00	84.11	85.95	87.15	143	120	(1,666)	315
BUS	82.45	79.06	82.12	82.90	286	78	630	45
AL/DPK (%)	25.83	28.73	25.37	25.40	(181)	3	(152)	(43)
BUK	25.89	28.65	25.17	25.29	(186)	12	(161)	(60)
BUS	24.92	30.07	28.71	27.24	(105)	(147)	24	232
AL/NCD (%)	115.37	127.07	112.33	112.66	(872)	33	(625)	(271)
BUK	115.03	126.13	111.04	111.75	(882)	71	(671)	(328)
BUS	121.93	144.76	136.52	129.33	(644)	(719)	255	740

Sumber: SPI September 2024

Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum

Rasio	KBMI 1			KBMI 2		
	Sep '23	Jun '24	Sep '24	Sep '23	Jun '24	Sep '24
CAR	33.32%	32.14%	32.21%	36.94%	36.63%	36.46%
ROA	1.46%	0.71%	1.02%	1.48%	2.06%	2.08%
BOPO	87.98%	93.24%	90.41%	92.98%	89.63%	91.21%
NIM	5.40%	4.44%	4.50%	4.19%	4.27%	4.30%
Rasio	KBMI 3			KBMI 4		
	Sep '23	Jun '24	Sep '24	Sep '23	Jun '24	Sep '24
CAR	26.50%	24.44%	25.10%	24.33%	22.78%	23.98%
ROA	1.82%	1.72%	1.78%	3.79%	3.73%	3.76%
BOPO	79.52%	81.33%	80.49%	63.39%	70.21%	69.02%
NIM	3.95%	3.59%	3.57%	5.50%	5.15%	5.20%

Sumber: SPI September 2024

Tabel 8 Komponen ATMR Bank Umum

Komponen ATMR (Rp T)	Sep '23	Jun '24	Sep '24	yoy	
				Sep '23	Sep '24
ATMR Kredit	5.896	6.375	6.446	7,69%	9,33%
ATMR Operasional	538	556	555	-46,84%	3,06%
ATMR Pasar	103	186	207	32,72%	102,10%
Total ATMR	6.529	7.117	7.208	-0,41%	10,40%

Sumber: OJK

Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum masih dalam kondisi yang cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh meskipun melambat. Aset BPR dan BPRS tumbuh namun melambat sebesar 6,20% (yoy), seiring dengan perlambatan DPK BPR dan BPRS yang juga masih tumbuh 7,01% (yoy). Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS juga masih tumbuh 7,17% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 9 Rasio Keuangan BPR dan BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Sep '23	Jun '24	Sep '24	Jun '24	Sep '24	Sep '23	Sep '24
Total Aset (Rp Miliar)	212.284	219.356	224.071	1,21%	2,15%	9,07%	5,55%
BPR	190.324	196.338	200.162	1,21%	1,95%	8,35%	5,17%
BPRS	21.960	23.018	23.909	1,20%	3,87%	15,79%	8,88%
Kredit/Pembiayaan (Rp milyar)	154.451	162.574	165.342	0,41%	1,70%	10,32%	7,05%
BPR	137.970	144.597	146.822	0,27%	1,54%	9,45%	6,42%
BPRS	16.481	17.977	18.520	1,59%	3,02%	18,15%	12,37%
DPK (Rp Miliar)	149.054	154.631	158.162	1,21%	2,28%	9,89%	6,11%
BPR	134.671	139.341	142.108	1,22%	1,99%	9,57%	5,52%
BPRS	14.383	15.290	16.053	1,13%	5,00%	13,02%	11,61%
Tabungan	44.811	46.126	48.236	2,00%	4,57%	6,64%	7,64%
BPR	40.488	41.549	43.386	2,11%	4,42%	6,19%	7,16%
BPRS	4.323	4.577	4.850	1,04%	5,97%	11,07%	12,19%
Deposito	104.244	108.505	109.926	0,88%	1,31%	11,35%	5,45%
BPR	94.183	97.792	98.723	0,85%	0,95%	11,09%	4,82%
BPRS	10.061	10.713	11.204	1,16%	4,58%	13,87%	11,36%

Sumber: OJK

2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Pada periode September 2024, kinerja BPR masih menunjukkan kondisi yang cukup solid. DPK tetap mampu tumbuh sejalan dengan penyaluran kredit yang mencatatkan pertumbuhan walaupun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih

tinggi di atas *threshold* yang tercatat meningkat dibanding tahun lalu. Namun demikian, kinerja BPR perlu diperhatikan seiring adanya penurunan laba dan efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga disertai dengan peningkatan risiko kredit pada periode laporan yang ditunjukkan dari NPL *gross* yang masih cukup tinggi.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Sep '23	Jun'24	Sep'24	Jun'24	Sep'24	Sep '23	Sep'24
Total Aset (Rp milyar)	190.324	196.338	200.162	1,21%	1,95%	8,35%	5,17%
Kredit (Rp milyar)	137.970	144.597	146.822	0,27%	1,54%	9,45%	6,42%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	134.671	139.341	142.108	1,22%	1,99%	9,57%	5,52%
- Tabungan (Rp milyar)	40.488	41.549	43.386	2,11%	4,42%	6,19%	7,16%
- Deposito (Rp milyar)	94.183	97.792	98.723	0,85%	0,95%	11,09%	4,82%
CAR (%)	30,94	31,75	31,05	(85)	(70)	(52)	11
ROA (%)	1,34	1,09	1,24	20	15	(44)	(10)
BOPO (%)	87,20	89,53	88,12	(182)	(141)	326	92
NPL Gross (%)	10,05	11,39	11,72	69	33	193	167
NPL Net (%)	6,90	8,19	8,41	86	22	153	151
LDR (%)	76,88	77,02	77,24	(35)	22	63	36
CR (%)	13,21	13,47	13,46	102	(1)	9	25

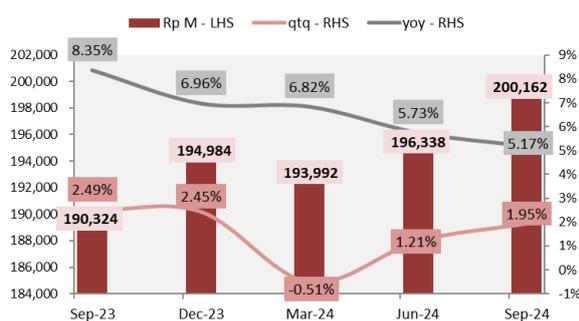
Sumber: SPI, September 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset BPR

Aset BPR pada September 2024 tumbuh 5,17% (yoy), cenderung melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,35% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset tersebut sejalan dengan DPK yang juga tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 15 Perkembangan Aset BPR



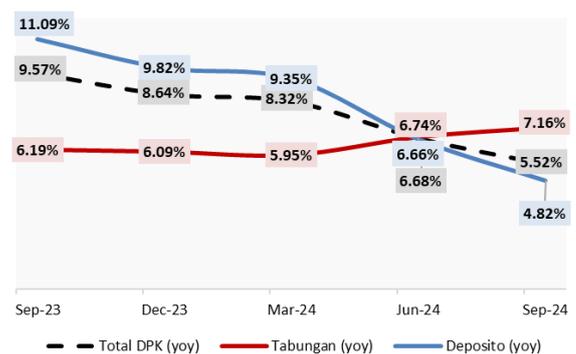
Sumber: SPI, September 2024

2.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada September 2024 tumbuh 5,52% (yoy) menjadi Rp142,11 triliun, melambat dibandingkan dengan September 2023 yang tercatat tumbuh 9,57% (yoy).

Perlambatan DPK tersebut didorong oleh komponen deposito yang tercatat tumbuh sebesar 4,82% (yoy) turun dari periode tahun sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 11,09% (yoy). Sementara itu, komponen tabungan menunjukkan kinerja positif dengan mencatatkan pertumbuhan 7,16% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,19% (yoy).

Grafik 16 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI September 2024

2.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada September 2024 tumbuh 6,42% (yoy), melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,45% (yoy). Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas

kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (56,14%) yang terdiri dari KMK (47,59%) dan KI (8,56%) sedangkan sisanya untuk KK (43,86%).

Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh semua jenis penggunaan di mana KMK tumbuh 4,46% (yoy), mengalami perlambatan dari 13,41% (yoy), dan untuk KI tercatat tumbuh 10,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan September 2023 yang mencapai 16,34% (yoy). Sementara di sisi lain, kredit konsumtif tumbuh positif sebesar 7,93% (yoy) melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 4,20% (yoy).

Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI, September 2024

3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada September 2024 masih tetap terjaga dengan baik tecermin dari aset, DPK, dan pembiayaan BPRS yang tetap tumbuh walaupun melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 8,88% (yoy), 12,37% (yoy), dan 11,61% (yoy).

Selain itu, perlu diperhatikan risiko pembiayaan BPRS tercatat meningkat tecermin dari adanya peningkatan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tecermin pada

2.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada September 2024 turun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari rasio ROA sebesar 1,24% atau turun 10 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,34%).

Seiring dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat menurun, tecermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 92 bps menjadi 88,12% dari 87,20% pada tahun sebelumnya. Peningkatan rasio BOPO disebabkan oleh kenaikan beban operasional yang tercatat tumbuh sebesar 6,72% (yoy) dan melampaui pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 5,59% (yoy).

2.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi sebesar 31,05%, jauh di atas KPMM, dan meningkat 11 bps dari tahun sebelumnya yang tercatat 30,94%. Peningkatan CAR didorong oleh pertumbuhan modal yang melampaui pertumbuhan dari ATMR.

permodalan yang masih cukup baik, di tengah rentabilitas dan efisiensi BPRS juga tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 11 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Sep '23	Jun '24	Sep '24	Sep '23	Sep '24	Sep '23	Sep '24
Total Aset (Rp Miliar)	21,960	23,018	23,909	5.31%	3.87%	15.79%	8.88%
Pembiayaan (Rp Miliar)	16,481	17,977	18,520	3.37%	3.02%	18.15%	12.37%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	14,383	15,290	16,053	3.61%	5.00%	13.02%	11.61%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	4,323	4,577	4,850	6.36%	5.97%	11.07%	12.19%
- Deposito iB (Rp Miliar)	10,061	10,713	11,204	2.47%	4.58%	13.87%	11.36%
CAR (%)	28.12	23.09	22.52	426	(57)	438	(560)
ROA (%)	2.18	1.54	1.39	8	(15)	36	(79)
BOPO (%)	85.07	90.91	91.70	76	79	(144)	663
NPF Gross (%)	7.45	8.23	9.03	(3)	80	58	158
FDR (%)	114.59	117.58	115.36	(26)	(222)	498	77

Sumber: SPS September 2024

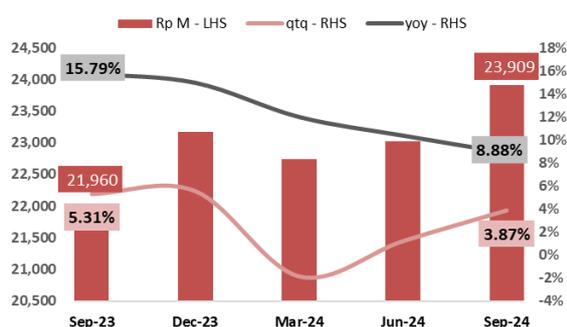
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPRS

Pada September 2024, aset BPRS tercatat sebesar Rp23,91 triliun atau tumbuh 8,88% (yoy), melambat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 15,79% (yoy).

Sebagian besar BPRS memiliki total aset >Rp10 Miliar (165 BPRS dari 174 BPRS). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di mana jumlah BPRS dengan total aset pada kelompok ini sebanyak 164 BPRS.

Grafik 18 Tren Aset BPRS



Sumber: SPS September 2024

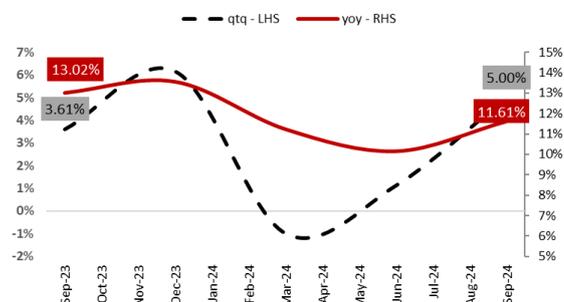
3.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp16,05 triliun. Pada September 2024, DPK BPRS tumbuh 11,61% (yoy),

melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,02% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad *Mudharabah* yakni 69,79% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (41,84% atau senilai Rp6,72 triliun). Secara keseluruhan deposito iB BPRS tumbuh 11,36% (yoy) melambat dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 13,87% (yoy). Di sisi lain, tabungan iB BPRS justru tumbuh 12,19% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 11,07% (yoy), meskipun tingkat bagi hasil tabungan iB justru turun 6 bps dari tahun lalu menjadi 1,61%.

Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS September 2024

3.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada September 2024, pembiayaan BPRS mencapai Rp18,52 triliun, tumbuh sebesar 12,37% (yoy) melambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 18,15% (yoy).

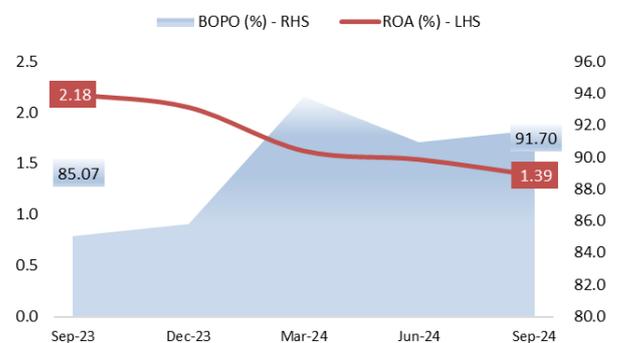
Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan BPRS mayoritas disalurkan ke sektor konstruksi (17,27%), jasa dunia usaha (12,84%) dan perdagangan (12,81%). Pembiayaan ke tiga sektor terbesar tersebut tercatat melambat bahkan berkontraksi. Pembiayaan ke sektor konstruksi sebenarnya masih tumbuh tinggi 35,67% (yoy), namun melambat dari tahun sebelumnya yang juga tumbuh tinggi mencapai 49,29% (yoy). Sektor jasa dunia usaha juga tumbuh melambat 27,15% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 32,29% (yoy). Sementara itu, sektor perdagangan justru berkontraksi -7,32% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 20,06% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 59,74% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 49,51%) masih tumbuh cukup tinggi 17,82% (yoy), meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat tumbuh 28,17% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan investasi tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,97% (yoy) dibandingkan tahun lalu tumbuh 9,34% (yoy). Pembiayaan konsumtif juga tumbuh melambat 9,87 (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 10,73% (yoy).

3.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami penurunan yang tecermin dari rasio ROA turun 79 bps menjadi 1,39% dari 2,18% pada tahun sebelumnya yang disebabkan oleh melambatnya laba BPRS. Penurunan rentabilitas sejalan dengan pemburukan efisiensi BPRS tecermin dari rasio BOPO yang meningkat tinggi 663 bps menjadi 91,70%, jauh meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 85,07%.

Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS September 2024

3.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih cukup solid dengan CAR sebesar 22,52%, meskipun turun 560 bps dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 28,12%. Peningkatan CAR didorong oleh pertumbuhan modal BPRS yang lebih besar dari pertumbuhan ATMR BPRS. CAR BPRS tersebut masih cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS, atau masih jauh di atas *threshold*.

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan III-2024, perkembangan kredit/pembiayaan perbankan (Bank Umum) masih cukup baik didorong oleh aktivitas usaha yang masih berada pada level ekspansi dan konsumsi rumah tangga utamanya golongan menengah atas yang tumbuh solid. Dilihat dari kenaikan nominal kredit secara tahunan, kredit/pembiayaan Bank Umum pada periode ini utamanya didorong oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, perantara keuangan, serta rumah tangga – pemilikan rumah tinggal. Sementara pada BPR dan BPRS kredit/pembiayaan mengalami perlambatan utamanya pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel namun sektor *real estate* tumbuh relatif tinggi menahan perlambatan yang semakin dalam.

A. Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan Bank Umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan III-2024 masih tumbuh baik sebesar 10,85% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 8,96% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 1,35% (qtq), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,23% (qtq). Pertumbuhan kredit secara tahunan utamanya didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit kepada debitur korporasi.

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 23,61%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 10,81% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,68% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 yang tumbuh 10,98% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,44% (yoy). Selain itu, rumah tinggal tipe di atas 70 juga masih tercatat tumbuh 11,52% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya

yang tumbuh 14,86% (yoy). Di sisi lain, kepemilikan rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal s.d. tipe 21 justru mengalami kontraksi -7,07% (yoy) dan menarik ke bawah subsektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal secara umum, menjadi tumbuh 10,37% (yoy) pada periode laporan dari 12,66% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan sektor rumah tangga juga didorong oleh subsektor rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh 9,00% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,67% (yoy).

Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 15,85%). Kredit pada sektor ini tumbuh 8,63% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya tumbuh 5,55% (yoy). Pertumbuhan sektor ini didorong di antaranya oleh subsektor Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau yang tumbuh tinggi 24,92% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 18,29% (yoy), didorong

oleh perdagangan beras dalam negeri yang tumbuh 36,75% (yoy). Selain itu, sektor perdagangan meningkat juga didorong oleh pertumbuhan perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis yang tumbuh tinggi 29,74% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -10,56% (yoy).

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 15,28%) juga tercatat meningkat. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 7,22% (yoy), meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,14% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh subsektor industri makanan, utamanya industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 9,64% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 14,53% (yoy). Selain itu, industri makanan lainnya juga tercatat mendorong pertumbuhan dengan tumbuh 12,40% (yoy) dari tahun sebelumnya 1,47% (yoy). Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya juga tercatat tumbuh tinggi 21,67% (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,19% (yoy), didorong oleh subsektor industri bubur kertas (pulp), kertas dan karton/*paper board*.

Per September 2024, pertumbuhan penyaluran kredit kepada industri pengolahan yang terkait hilirisasi, antara lain untuk subsektor industri pengolahan kelapa sawit, logam non besi, dan manufaktur elektronik tumbuh tinggi sebesar 15,29% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar 6,64% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit kepada industri pengolahan terkait hilirisasi tersebut dipicu oleh pertumbuhan kredit pada

subsektor industri pengolahan logam bukan besi yang tumbuh sebesar 28,52%, setelah pada September 2023 terkontraksi sebesar -11,44%. Secara porsi penyaluran kredit, persentase penyaluran kredit kepada subsektor pengolahan kelapa sawit, logam non besi, dan manufaktur elektronik adalah sebesar 17,96% terhadap total kredit kepada industri pengolahan dan 2,74% terhadap total penyaluran kredit secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan kontribusi penyaluran kredit kepada subsektor industri pengolahan yang berkaitan dengan hilirisasi cukup signifikan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi perbankan terhadap sektor ini.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,83% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 7,78% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,43% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan, utamanya pada subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 10,39% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,12% (yoy).

Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga memiliki porsi yang cukup besar (5,66%). Sektor ini tercatat tumbuh tinggi pada periode laporan, yaitu 24,06% (yoy), meskipun sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh lebih tinggi 27,15% (yoy). Pertumbuhan di sektor perantara keuangan tetap tumbuh tinggi meskipun melambat ini didorong oleh subsektor perantara keuangan lainnya (non-bank) selain *leasing* yang tumbuh tinggi 46,66% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 59,87% (yoy).

Sektor ekonomi transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,49%) juga tercatat tumbuh 2 digit, 17,45% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 11,15% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh subsektor angkutan laut domestik yang tumbuh tinggi 28,89% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 21,83% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri pada September 2024 adalah sebanyak 2,13 juta orang atau naik 37,42% (yoy) dari 1,55 juta orang dibandingkan September tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit ke sektor administrasi pemerintahan tercatat tumbuh tertinggi pada periode laporan, yaitu 44,39% (yoy) meskipun dengan porsi yang cukup kecil

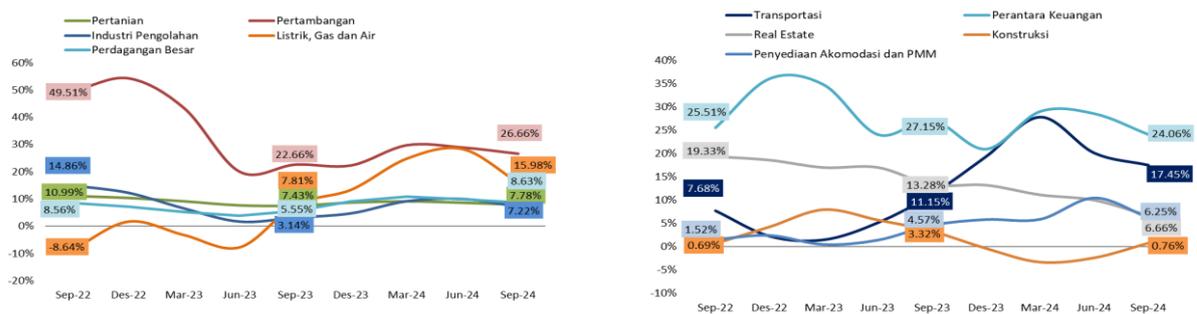
(1,03%), turun dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 46,25%. Pertumbuhan di sektor ini didorong oleh subsektor administrasi hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan yang tumbuh 60,09% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 64,18% (yoy).

Meskipun sebagian besar sektor mengalami peningkatan, terdapat beberapa sektor yang justru melambat dibandingkan tahun sebelumnya, di antaranya sektor perikanan (porsi 0,27%) yang justru berkontraksi -1,59% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,10% (yoy). Subsektor ini berkontraksi disebabkan oleh berkontraksinya subsektor budidaya biota air payau udang yang berkontraksi -13,68% (yoy) dari 8,22% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi	
		Sep '23	Jun '24	Sep '24	Jun '24	Sep '24	Sep '23		Sep '24
	Lapangan Usaha / Sektor Produktif	4.959,77	5.452,71	5.497,53	3,59%	0,82%	9,11%	10,84%	72,53%
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	480,55	514,16	517,92	2,00%	0,73%	7,43%	7,78%	6,83%
2	Perikanan	20,73	20,76	20,40	0,15%	-1,75%	6,10%	-1,59%	0,27%
3	Pertambangan dan Penggalian	270,01	326,44	341,99	6,04%	4,76%	22,66%	26,66%	4,51%
4	Industri Pengolahan	1.080,43	1.165,66	1.158,41	3,29%	-0,62%	3,14%	7,22%	15,28%
5	Listrik, gas dan air	173,10	201,75	200,75	6,79%	-0,50%	7,81%	15,98%	2,65%
6	Konstruksi	399,72	393,44	402,77	0,86%	2,37%	3,32%	0,76%	5,31%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.105,80	1.190,28	1.201,22	2,02%	0,92%	5,55%	8,63%	15,85%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	128,20	135,77	136,21	4,53%	0,32%	4,57%	6,25%	1,80%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	354,56	412,01	416,45	6,34%	1,08%	11,15%	17,45%	5,49%
10	Perantara Keuangan	345,69	429,80	428,86	4,70%	-0,22%	27,15%	24,06%	5,66%
11	Real Estate	345,15	367,65	368,14	3,78%	0,13%	13,28%	6,66%	4,86%
12	Administrasi Pemerintahan	54,20	77,37	78,26	16,73%	1,15%	46,25%	44,39%	1,03%
13	Jasa Pendidikan	16,04	17,33	17,45	1,25%	0,69%	8,95%	8,77%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,58	39,55	40,81	4,11%	3,20%	22,78%	11,56%	0,54%
15	Jasa Kemasyarakatan	144,99	156,93	163,87	4,98%	4,42%	29,25%	13,02%	2,16%
16	Jasa Perorangan	4,00	3,78	3,77	-2,90%	-0,36%	-1,07%	-5,77%	0,05%
17	Badan Internasional	0,02	0,01	0,26	-21,68%	1870,3%	60,61%	1217,09%	0,00%
	Bukan Lapangan Usaha / Sektor Konsumtif	1.877,53	2.025,69	2.081,72	2,26%	2,77%	8,57%	10,88%	27,47%
18	Rumah Tangga	1.615,20	1.741,55	1.789,82	2,05%	2,77%	8,68%	10,81%	23,61%
	- Pemilikan Rumah Tinggal	642,53	697,27	709,14	9,31%	1,70%	12,66%	10,37%	9,36%
	- Pemilikan Flat atau Apartemen	29,09	30,32	30,82	2,32%	1,67%	5,25%	5,95%	0,41%
	- Pemilikan Ruko atau Rukan	21,38	28,21	28,53	-59,77%	1,16%	2,18%	33,46%	0,38%
	- Pemilikan Kendaraan Bermotor	126,43	133,19	137,81	-1,19%	3,47%	6,67%	9,00%	1,82%
	- Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	12,90	18,05	19,90	10,43%	10,24%	27,07%	54,25%	0,26%
	- Keperluan Rumah Tangga Lainnya	782,87	834,52	863,61	2,05%	3,49%	5,99%	10,31%	11,39%
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	262,32	284,14	291,90	3,59%	2,73%	7,87%	11,27%	3,85%
	Industri	6.837,30	7.478,40	7.579,25	3,23%	1,35%	8,96%	10,85%	100,00%

Sumber: SPI September 2024

Grafik 21 Tren Pertumbuhan Kredit Produktif per Sektor Ekonomi

Sumber: SPI September 2024, diolah

2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)

Pada September 2024, distribusi penyaluran kredit/pembiayaan (selanjutnya disebut kredit) Bank Umum berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 68,64% dan 13,48%. Penyaluran kredit di wilayah Jawa tercatat tumbuh 11,19% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,79% (yoy). Selanjutnya, penyaluran kredit di wilayah Sumatera juga tumbuh meningkat dari 4,10% (yoy) pada September 2023 menjadi 8,62% (yoy).

Penyaluran kredit di wilayah Jawa didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan porsi mencapai 48,24%. Pada Provinsi DKI Jakarta, nominal kredit yang disalurkan meningkat sebesar Rp356,86 triliun atau tumbuh 16,58% (yoy) meningkat dari 11,52% (yoy) pada September 2023. Kenaikan penyaluran kredit terbesar utamanya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran. yang tumbuh dari 5,50% (yoy) menjadi 23,18% (yoy) pada September 2024 seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp65,00 triliun. Sebagai informasi, sektor perdagangan besar dan eceran konsisten menjadi kontributor perekonomian Jakarta dengan dominasi 18,22% sekaligus sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi dari sisi

produksi pada periode laporan. Selain itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga mencatatkan kenaikan pertumbuhan kredit, meskipun porsi penyaluran kredit pada provinsi tersebut relatif kecil yaitu sebesar 1,13%. Pertumbuhan kredit di Provinsi DIY tercatat meningkat dari 4,25% (yoy) menjadi 12,77% (yoy) pada September 2024 seiring kenaikan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp6,68 triliun. Kenaikan penyaluran kredit terbesar utamanya terdapat pada sektor konstruksi sebesar Rp4,01 triliun sehingga meningkatkan pertumbuhan kredit dari 22,75% (yoy) menjadi 114,43% (yoy). Adapun peningkatan kredit pada sektor konstruksi di DIY ditengarai sejalan dengan Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Seksi 2 Paket 2.2 Trihanggo-Junction Sleman di sekitar area Ring Road Utara yang mulai dikerjakan sejak pertengahan September 2024.

Pada wilayah Sumatera, penyaluran kredit didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dengan porsi sebesar 26,90%. Pada September 2024, nominal kredit yang disalurkan di Provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar Rp21,17 triliun atau tumbuh 8,35% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -0,89% (yoy). Kenaikan

penyaluran kredit terbesar utamanya terdapat pada sektor pertanian yang naik Rp4,82 triliun dari yang sebelumnya terkontraksi -6,07% (yoy) menjadi tumbuh positif sebesar 11,24% (yoy). Pertumbuhan kredit sektor pertanian pada Provinsi Sumatera Utara berasal dari subsektor perkebunan kelapa sawit sebagai dampak dari meningkatnya permintaan *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar perdagangan global serta kenaikan harga komoditas tersebut. Selain itu, upaya peningkatan produktivitas dan ekspansi lahan di Sumatera Utara turut berkontribusi terhadap meningkatnya pertumbuhan kredit pada subsektor ini. Provinsi lainnya yang menjadi pendorong kenaikan pertumbuhan kredit di wilayah Sumatera adalah Lampung dengan porsi penyaluran kredit sebesar 8,82%. Penyaluran kredit pada provinsi tersebut tumbuh 13,15% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -4,25% (yoy) seiring dengan kenaikan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp10,48 triliun. Kenaikan penyaluran kredit terbesar utamanya terdapat pada sektor industri pengolahan yang naik Rp3,22 triliun sehingga mendorong pertumbuhan kredit cukup signifikan mencapai 24,90% (yoy) dari 0,43% (yoy). Kenaikan penyaluran kredit tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan perbankan terhadap program Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadikan sektor industri pengolahan sebagai salah satu fokus pengembangan ekonomi pada tahun 2024.

Selain Jawa dan Sumatera, penyaluran kredit di wilayah Sulawesi (porsi 5,31%) juga tercatat tumbuh meningkat dari 7,96% (yoy) menjadi 12,53% (yoy) pada September 2024. Penyaluran kredit di pulau ini sebagian besar disalurkan di Provinsi Sulawesi Selatan (porsi:

43,41%) kemudian Sulawesi Tengah (porsi: 20,80%). Pada periode laporan, penyaluran kredit pada Provinsi Sulawesi justru tumbuh melambat dari 8,94% (yoy) menjadi 7,61% (yoy). Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pendorong utama kenaikan pertumbuhan kredit di wilayah Sulawesi. Penyaluran kredit pada provinsi tersebut tumbuh cukup signifikan dari 7,24% (yoy) menjadi 29,30% (yoy) seiring kenaikan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp19,04 triliun. Kenaikan nominal kredit terbesar utamanya terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar Rp9,86 triliun sehingga mendorong kredit tumbuh tinggi mencapai 94,64% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 20,82% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit tersebut ditengarai sejalan dengan meningkatnya pembangunan smelter untuk mengolah biji nikel jenis limonite menjadi produk bernilai tinggi sebagai bahan penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. Selain itu, peningkatan nominal kredit di wilayah Sulawesi juga didorong oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (porsi: 11,73%) yang kembali tumbuh positif 18,02% (yoy) daripada September 2023 sebesar -0,31% (yoy) seiring kenaikan penyaluran kredit sebesar Rp7,23 triliun. Kenaikan nominal kredit yang terbesar utamanya terdapat pada sektor real estate sebesar Rp1,99 triliun sehingga mendorong kredit tumbuh tinggi mencapai 175,98% (yoy) dari -4,50% (yoy). Sebagai informasi, sektor perumahan kawasan industri dan perkantoran pada provinsi Sulawesi Tenggara masih menjadi primadona di kalangan investor domestik maupun asing.

Wilayah lainnya yang juga mencatatkan pertumbuhan kredit lebih tinggi

dibandingkan September 2024 yaitu Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra). Penyaluran kredit pada wilayah Bali Nusra (porsi: 3,58%) tercatat tumbuh meningkat dari 9,42% (yoy) menjadi 11,73% (yoy). Adapun penyaluran kredit di wilayah ini didominasi oleh Provinsi Bali (porsi: 44,66%) yang tumbuh 9,57% (yoy) meningkat dari 5,11% (yoy) pada September 2023 seiring kenaikan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp10,58 triliun. Peningkatan kredit di provinsi tersebut utamanya didorong oleh sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang semula berkontraksi -0,41% (yoy) menjadi 11,00% (yoy) seiring kenaikan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp2,25 triliun. Kenaikan pertumbuhan kredit pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum ini merupakan perkembangan positif karena menandakan pemulihan ekonomi pariwisata di Provinsi Bali yang terus berlanjut. Provinsi lainnya yang mendorong pertumbuhan kredit di wilayah Bali Nusra adalah Nusa Tenggara Timur (porsi: 21,04%) yang tumbuh 16,62% (yoy) dari 15,93% (yoy) seiring kenaikan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp8,13 triliun. Peningkatan kredit di provinsi tersebut utamanya didorong oleh sektor listrik, gas, dan air yang tumbuh cukup signifikan hingga 1219,40% (yoy) dari 347,17% (yoy) seiring dengan kenaikan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp2,54 triliun. Kenaikan nominal kredit yang disalurkan pada sektor listrik, gas, dan air ini ditengarai sejalan dengan adanya Program Pengadaan Sewa Mesin Berbahan Bakar HSD/B35 berkapasitas 10 Mega Watt di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk memperkuat pasokan listrik di Labuan Bajo.

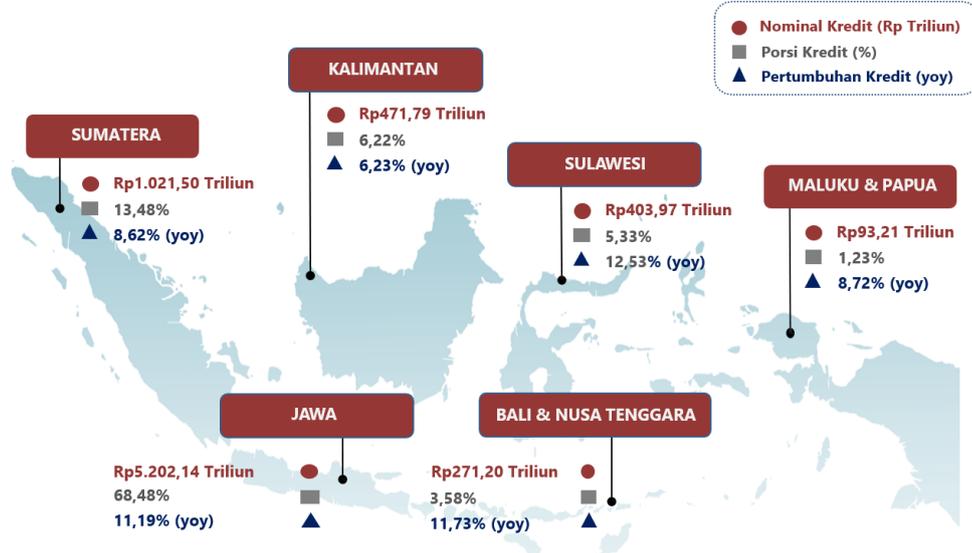
Di sisi lain, terdapat dua wilayah yang mencatatkan pertumbuhan kredit yang lebih lambat pada September 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertama, wilayah Kalimantan (porsi: 6,22%) dengan pertumbuhan kredit sebesar 6,23% (yoy) melambat dari 9,71% (yoy). Penyaluran kredit di wilayah ini sebagian besar disalurkan di Provinsi Kalimantan Timur (porsi: 42,82%) yang tumbuh 7,47% (yoy) melambat dari 11,99% (yoy). Perlambatan kredit di Kalimantan Timur utamanya pada sektor industri pengolahan yang turun Rp2,88 triliun sehingga berkontraksi -14,81% (yoy) dari September tahun lalu sebesar 74,96% (yoy). Tidak hanya itu, Provinsi Kalimantan Selatan (porsi: 19,88%) juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih lambat yaitu 4,13% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,91% (yoy). Penurunan terbesar nominal kredit yang disalurkan pada provinsi tersebut terdapat pada sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan sebesar Rp1,83 triliun sehingga menjadi berkontraksi -47,54% (yoy) dari 3,38% (yoy).

Kedua, wilayah Maluku dan Papua (porsi: 1,23%) juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang melambat dari 10,62% (yoy) menjadi 8,72% (yoy). Penyaluran kredit pada wilayah ini didominasi oleh Provinsi Papua (porsi: 48,12%) yang tumbuh melambat dari 10,79% (yoy) menjadi 9,16% (yoy). Penurunan nominal kredit terbesar utamanya terdapat pada sektor transportasi, perdagangan, dan konsumsi sebesar Rp747,69 miliar sehingga berkontraksi -30,30% (yoy) dari 20,81% (yoy). Di samping itu, Provinsi Maluku (porsi: 19,70%) bahkan mengalami kontraksi kredit yaitu -5,10% (yoy) dari 6,40% (yoy) seiring penurunan

nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp987,15 miliar. Penurunan nominal kredit terbesar utamanya terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar

Rp1,82 miliar sehingga kredit berkontraksi lebih dalam yakni menjadi -88,34% (yoy) dari -0,48% (yoy).

Grafik 22 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Spasial)



Sumber: LBUT, diolah

Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi Proyek (Spasial)

No.	Sektor Ekonomi	Porsi					
		Pulau Jawa	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku
Lapangan Usaha							
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	3,49%	16,56%	24,15%	7,17%	5,08%	7,18%
2	Perikanan	0,18%	0,35%	0,34%	0,97%	0,41%	0,50%
3	Pertambangan dan Penggalian	3,01%	3,34%	14,41%	5,26%	13,64%	8,68%
4	Industri Pengolahan	16,91%	16,60%	5,42%	9,21%	4,08%	9,79%
5	Listrik, Gas, dan Air	2,68%	2,35%	2,16%	4,26%	1,78%	0,47%
6	Konstruksi	6,53%	2,47%	3,60%	3,01%	2,14%	2,45%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15,60%	15,72%	13,20%	18,00%	20,39%	16,33%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	1,58%	1,38%	1,20%	1,51%	9,38%	2,00%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	6,92%	2,47%	3,46%	1,28%	1,12%	2,73%
10	Perantara Keuangan	8,06%	0,21%	0,23%	0,30%	0,21%	0,26%
11	Real Estate	6,16%	1,91%	1,73%	2,67%	1,63%	1,25%
12	Administrasi Pemerintahan	1,24%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,26%
13	Jasa Pendidikan	0,26%	0,22%	0,11%	0,16%	0,25%	0,01%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,58%	0,61%	0,14%	0,33%	0,82%	0,16%
15	Jasa Kemasyarakatan	2,36%	1,55%	1,70%	2,11%	2,46%	1,55%
16	Jasa Perorangan	0,04%	0,06%	0,03%	0,08%	0,10%	0,55%
17	Badan Internasional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
19	Rumah Tangga	21,00%	29,91%	27,03%	35,13%	27,70%	38,28%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,40%	4,29%	1,07%	8,54%	8,81%	7,54%
Total		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ket: Shading hijau menunjukkan lima sektor dengan porsi terbesar di wilayah tersebut

Sumber: LBUT, diolah

3. Perkembangan Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan III-2024, kredit UMKM masih tumbuh 5,04% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,34% (yoy). Porsi penyaluran kredit UMKM per September 2024 tercatat sebesar 19,74% terhadap total kredit bank umum.

Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 46,12%) yang tumbuh 2,12% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,70% (yoy) dan mendorong perlambatan pertumbuhan kredit UMKM. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (17,37%) tercatat tumbuh relatif tinggi sebesar 10,80% (yoy), walaupun juga melambat dari 16,63% (yoy) pada tahun sebelumnya.

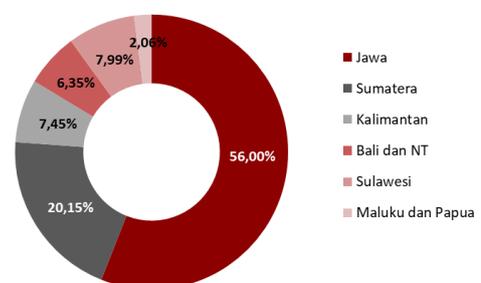
Di tengah perlambatan kredit UMKM, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% yaitu sebesar 4,00%, meskipun sedikit naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,88%. Adapun kenaikan rasio NPL utamanya terjadi pada sektor *real estate* dan jasa perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,06% menjadi 4,67% serta sektor perikanan yang naik dari 4,07% menjadi 4,77%, dengan porsi NPL masing-masing sebesar 4,46% dan 1,40% dari total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan NPL kredit UMKM antara lain pada sektor pertambangan dan penggalian serta konstruksi.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 56,00%, terutama di provinsi Jawa

Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,85%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di provinsi Bangka Belitung sebesar 14,95% (yoy), meningkat dari tahun lalu sebesar 10,93% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (14,95%), tumbuh 5,52% (yoy) walaupun melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,65% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,57%) yang tumbuh 4,24% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,90% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 5,12% (yoy) dan 11,53% (yoy), relatif melambat dari tahun sebelumnya masing-masing 5,52% (yoy) dan 15,57% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih melanjutkan tren kontraksi -37,98% (yoy).

Grafik 23 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM



Sumber: SPI September 2024

Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '23	Jun '24	Sep'24		Jun'24	Sep'24	Sep'23	Sep'24
BUMN	897.933	922.471	935.980	62,57%	-0,14%	1,46%	8,90%	4,24%
BUSN	420.207	435.015	441.711	29,53%	-0,13%	1,54%	5,52%	5,12%
BPD	105.992	114.034	118.216	7,90%	4,82%	3,67%	15,57%	11,53%
KCBLN	58	66	36	0,00%	2,94%	-45,32%	-36,74%	-37,98%
Total UMKM	1.424.191	1.471.586	1.495.943	100%	0,23%	1,66%	8,34%	5,04%

Sumber: SPI September 2024

B. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan III-2024 tumbuh 7,05% (yoy), melambat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 10,32% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, salah satu kredit terbesar antara lain disalurkan ke sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel dengan porsi 21,07%. Kredit pada sektor ini hanya tumbuh sebesar 0,75% (yoy), melambat dari 11,11% (yoy) pada tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan perlambatan kredit BPR dan BPRS. Penyaluran pembiayaan terbesar kedua disalurkan ke sektor bukan lapangan usaha - rumah tangga (porsi 12,10%) tumbuh sebesar 9,99% (yoy), meningkat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,05% (yoy). Meskipun tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut belum dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Sektor konstruksi (porsi 7,23%) meskipun tumbuh melambat namun masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 18,53% (yoy) dari tahun lalu yang mampu tumbuh 31,93% (yoy). Sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan (porsi 6,10%) juga tercatat masih tumbuh 10,08% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,21% (yoy). Penyaluran kredit pada sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (porsi: 5,22%) juga masih tumbuh 18,66% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,32% (yoy).

Transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi: 3,58%) dan industri pengolahan (porsi: 3,36%) juga masih mampu tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 17,26% (yoy) dan 8,51% (yoy), dari tahun sebelumnya yang tumbuh 36,22% (yoy) dan 27,14% (yoy).

Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)			yoy		Porsi		
		Sep-23	Jun-24	Sep-24	Jun'24	Sep'24			
1	Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	9.163	10.157	10.087	-1,14%	-0,69%	8,21%	10,08%	6,10%
2	Perikanan	629	626	613	-0,54%	-2,07%	14,19%	-2,54%	0,37%
3	Pertambangan dan Penggalian	1.231	1.250	1.225	-7,42%	-1,98%	30,33%	-0,43%	0,74%
4	Industri Pengolahan	5.117	5.397	5.552	-1,87%	2,88%	27,14%	8,51%	3,36%
5	Listrik, Gas dan Air	251	226	242	4,43%	7,26%	47,84%	-3,56%	0,15%
6	Konstruksi	10.089	11.295	11.959	3,48%	5,88%	31,93%	18,53%	7,23%
7	Perdagangan, Restoran dan Hotel	34.573	34.829	34.833	-1,43%	0,01%	11,11%	0,75%	21,07%
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5.045	5.795	5.916	2,63%	2,10%	36,22%	17,26%	3,58%
9	Perantara Keuangan	2.143	2.186	2.246	-3,85%	2,77%	42,53%	4,82%	1,36%
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	7.273	8.101	8.630	3,50%	6,54%	18,32%	18,66%	5,22%
11	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	249	241	235	-0,40%	-2,31%	-0,48%	-5,57%	0,14%
12	Jasa Pendidikan	475	508	517	-1,41%	1,95%	17,69%	8,99%	0,31%
13	Jasa Sosial/Masyarakat	11.543	11.287	11.253	-1,04%	-0,30%	1,54%	-2,51%	6,81%
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	210	189	175	-0,66%	-7,24%	-28,62%	-16,57%	0,11%
15	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	14	16	11	3,78%	-29,12%	-50,78%	-16,58%	0,01%
16	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	18.182	19.565	19.999	2,14%	2,22%	7,05%	9,99%	12,10%
17	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	48.265	50.908	51.847	0,97%	1,84%	4,02%	7,42%	31,36%
Total		154.451	162.574	165.342	0,41%	1,70%	10,32%	7,05%	100%

Sumber: SPI dan SPS September 2024

2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 59,67%. Besarnya kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia beroperasi di wilayah tersebut. Kredit di wilayah ini tumbuh 5,57% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 10,09% (yoy). Jawa Tengah yang merupakan Provinsi dengan penyaluran kredit BPR dan BPRS terbesar (porsi 22,94%) tumbuh 0,52% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,17% (yoy). Selain itu, Jawa Barat (porsi 14,24%) dan Jawa Timur (porsi 11,07%) juga tumbuh melambat sebesar 7,93% (yoy) dan 9,07% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 9,59% (yoy) dan 16,58% (yoy), sehingga menarik ke bawah pertumbuhan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Selain itu, kredit kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan porsi 19,70%. Kredit di wilayah ini tumbuh 11,97% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 13,55% (yoy). Penurunan utamanya didorong oleh Provinsi Kepulauan Riau dan Lampung yang tumbuh masing-masing 20,97% (yoy) dan 7,78% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari pertumbuhannya, kredit di wilayah Kalimantan tumbuh tertinggi dibanding pulau lainnya, sebesar 17,14% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang juga tumbuh tinggi 29,46% (yoy), namun dengan porsi yang relatif kecil hanya sebesar 2,94% dari total kredit BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang masing-masing tumbuh 28,32% (yoy) dan 22,68% (yoy).

Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)

	Kredit (RP M)					qtq		yoy		Porsi
	Sep'23	Des'23	Mar-24	Jun-24	Sep-24	Jun-24	Sep-24	Sep'23	Sep-24	
Jawa	93.450	94.817	97.523	97.392	98.660	-0,13%	1,30%	10,09%	5,57%	59,67%
Sumatera	29.086	29.967	30.939	31.694	32.568	2,44%	2,76%	13,55%	11,97%	19,70%
Kalimantan	4.148	4.758	4.858	4.819	4.859	-0,80%	0,83%	29,46%	17,14%	2,94%
Bali - Nusra	15.848	16.257	16.458	16.319	16.508	-0,85%	1,16%	5,63%	4,16%	9,98%
Sulampua	11.919	12.018	12.128	12.350	12.747	1,84%	3,21%	5,52%	6,95%	7,71%
Total	154.451	157.816	161.905	162.574	165.342	0,41%	1,70%	10,32%	7,05%	100%

Sumber: SPI dan SPS September 2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

4 Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

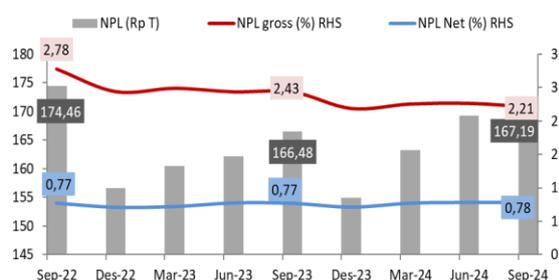
4 Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Selain itu, risiko pasar juga cukup terjaga seiring upaya bank menyeimbangkan portofolio SSB (*bonds' portfolio rebalancing*) yang dimiliki. Namun demikian ke depannya, risiko likuiditas perlu tetap diwaspadai seiring dengan sentimen ketidakpastian kebijakan moneter global.

1. Risiko Kredit

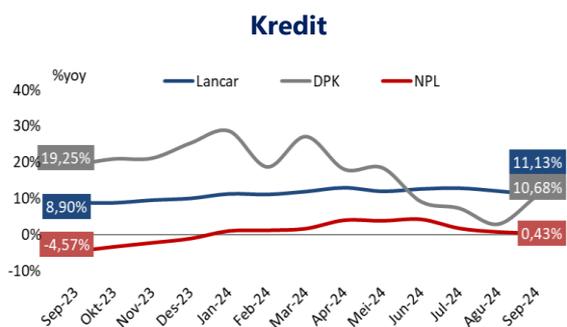
Pada September 2024, risiko kredit membaik tecermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,21%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,43%. Sejalan dengan turunnya NPL *gross*, NPL net cukup stabil sebesar 0,78%. Namun demikian, penurunan rasio NPL bukan disebabkan oleh penurunan nominal NPL secara umum. Pada periode laporan, NPL nominal tumbuh 0,43% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -4,57% (yoy).

Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



Sumber: SPI September 2024

Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit

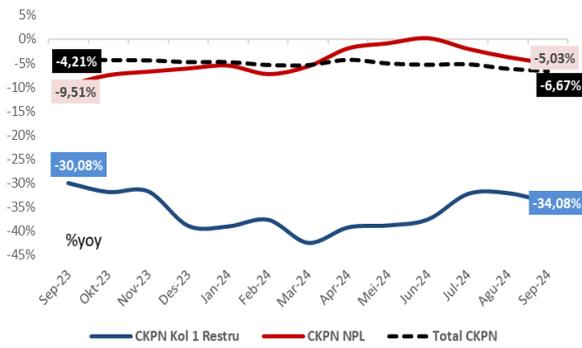


Sumber: SPI September 2024

Penurunan rasio NPL *gross* lebih disebabkan oleh kredit yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan nominal NPL. Sementara itu CKPN berkontraksi -5,03% (yoy) namun lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -9,51% (yoy).

Secara total CKPN berkontraksi -6,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang berkontraksi -4,21% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh berkontraksinya CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar sebesar -34,08% (yoy). Sementara itu, CKPN kredit non restrukturisasi kualitas lancar turun sebesar 1,21% (yoy). Adapun besarnya penurunan CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar sejalan dengan berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi yang telah dihentikan sepenuhnya pada 31 Maret 2024. Meskipun CKPN menurun, *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan *coverage* CKPN terhadap kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) masih memadai masing-masing sebesar 15,15% dan 41,62%. Selain itu, *coverage* total CKPN terhadap NPL juga masih cukup baik sebesar 193,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa antisipasi bank terhadap risiko kredit masih memadai.

Grafik 26 Pertumbuhan CKPN

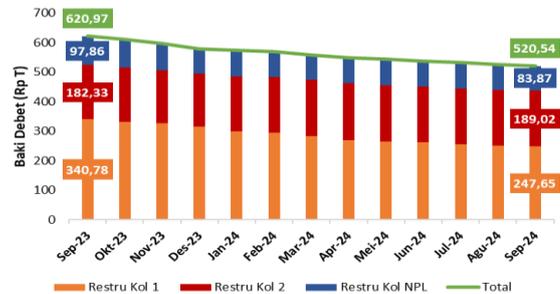


Sumber: LBUT

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun sebesar -16,17% (yoy) menjadi sebesar Rp520,54 Triliun. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi. Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar sebesar Rp247,65 Triliun atau 47,58% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -27,33% (yoy), melanjutkan kontraksi tahun sebelumnya yang juga turun -38,90% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 3,27% dari 4,98% pada

September 2023. Penurunan kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut menyebabkan rasio *Loan at Risk* menurun menjadi sebesar 10,11%, dari tahun sebelumnya 12,07%, makin mendekati angka rasio LaR sebelum pandemi.

Grafik 27 Tren Kredit Restrukturisasi



Sumber: LBUT

Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko akibat ketidakpastian kebijakan moneter global, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik.

Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Sep'23	Jun'24	Sep-24	Porsi	qtq		yoy	
					Jun'24	Sep'24	Sep'23	Sep'24
1. Lancar	6.353	6.954	7.060	93,15%	3,42%	1,53%	8,90%	11,13%
- Non Restru	6.012	6.692	6.813	89,89%	3,91%	1,80%	13,95%	13,31%
- Restru	341	262	248	3,27%	-7,69%	-5,45%	-38,90%	-27,33%
2. DPK	318	355	352	4,64%	-0,61%	-0,95%	19,25%	10,68%
3. Kurang Lancar	23	25	22	0,29%	14,38%	-12,02%	9,94%	-2,02%
4. Diragukan	30	29	27	0,36%	-2,40%	-6,92%	-5,71%	-8,64%
5. Macet	114	115	118	1,56%	3,14%	2,62%	-6,73%	3,26%
Nominal NPL	166	169	167	3,66%	-1,21%	-4,57%	0,43%	
Rasio NPL Gross %	2,43%	2,26%	2,21%		1	-6	-35	-23
Rasio NPL Me t %	0,77%	0,78%	0,78%		1	0	0	1
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	658	617	599		-3,74%	-2,86%	-20,10%	-8,99%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %	9,63%	8,25%	7,91%		-60	-34	-350	-172
Loan at Risk (LaR)	825	786	766		-2,24%	-2,51%	-17,39%	-7,09%
Rasio Loan at Risk (LaR) %	12,07%	10,51%	10,11%		-59	-40	-385	-195
Total Kredit	6.837	7.478	7.579		3,23%	1,35%	8,96%	10,85%

Sumber: SPI September 2024

Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit produktif, baik pada jenis penggunaan modal kerja dan investasi secara yoy. Rasio NPL Kredit Modal Kerja

(KMK) dan Kredit Investasi (KI) masing-masing turun menjadi 2,73% dan 1,69% dari 3,13% dan 1,93% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL Kredit Konsumsi (KK) sedikit meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,78% menjadi 1,85%.

Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Sep'22	Sep'23	Sep'24	yoy	
				Sep'23	Sep'24
KMK	2.892	3.121	3.434	7,92%	10,01%
KI	1.653	1.839	2.064	11,19%	12,26%
KK	1.729	1.878	2.082	8,57%	10,88%
Total Kredit	6.275	6.837	7.579	8,96%	10,85%

Tabel 19 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Sep'22	Sep'23	Sep'24	yoy	
				Sep'23	Sep'24
NPL KMK	3,68	3,13	2,73	-55	-40
NPL KI	2,39	1,93	1,69	-46	-24
NPL KK	1,65	1,78	1,85	13	7
Total NPL	2,78	2,43	2,21	-35	-22

Sumber: SPI September 2024

Pada periode laporan, penurunan rasio NPL KMK terjadi di seluruh kelompok bank, kecuali BPD. Rasio NPL Bank Persero dan Bank Swasta turun dari 3,07% dan 3,09% pada triwulan III-2023 menjadi 2,53% dan 2,70%. Demikian halnya dengan rasio NPL Bank KCBLN yang tercatat 1,01% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,40%.

Sama halnya dengan KMK, perbaikan rasio NPL KI juga terjadi pada seluruh kelompok bank kecuali BPD. Rasio NPL KMK pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya dan tercatat meningkat dari 6,18% pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi

7,50%. Selaras dengan KMK, rasio NPL KI BPD tercatat naik dari tahun lalu yaitu sebesar 2,38% menjadi 2,56%. Sementara itu, rasio NPL KK BPD tercatat yang terendah sebesar 1,06% turun dari tahun lalu yaitu 1,08%. Tingginya NPL KMK pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan monitoring, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,54%, walau sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,32%.

Tabel 20 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.591.214	45,13	2,53	1.034.783	29,35	1,68	899.546	25,52	1,90	2,12
Bank Swasta	1.581.865	48,66	2,70	913.774	28,11	1,61	755.367	23,23	2,22	2,29
BPD	126.266	19,68	7,50	91.810	14,31	2,56	423.528	66,01	1,06	2,54
KCBLN	134.269	83,35	1,01	23.553	14,62	1,61	3.276	2,03	1,84	1,11
TOTAL	3.433.614	45,30	2,73	2.063.920	27,23	1,69	2.081.716	27,47	1,85	2,21

Sumber: SPI Juni 2024

1.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Beberapa sektor ekonomi menunjukkan perbaikan risiko kredit yang tercermin dari penurunan nominal NPL.

Penurunan nominal NPL terbesar terjadi pada sektor industri pengolahan. Risiko kredit pada sektor ini tercatat membaik dari 3,60% menjadi 3,23%, dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,47 triliun (yoy), atau merupakan penurunan nominal NPL terbesar pada periode laporan. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sub sektor industri tekstil. Hal ini salah satunya didukung oleh efektivitas kebijakan Pemerintah dalam memperpanjang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya. Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari kerugian akibat membanjirnya produk impor. Sejalan dengan perkembangan tersebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri tekstil dan pakaian telah mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,43% (yoy) di tengah berbagai isu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun peningkatan kinerja sektor industri pengolahan secara umum didukung oleh kondisi ekonomi makro Indonesia yang tetap terjaga stabil, kebijakan pemerintah yang akomodatif dalam mendorong kepercayaan industri untuk meningkatkan produksi dan investasi, serta permintaan domestik dan ekspor yang menguat, sehingga memberikan optimisme bagi para pelaku industri terhadap prospek bisnis di masa depan. Namun demikian, perlu juga diperhatikan NPL beberapa subsektor pada sektor ini yang meningkat, antara lain

industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri pakaian jadi.

Penurunan nominal NPL terbesar kedua terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian. Nominal NPL pada sektor ini tercatat turun Rp1,37 triliun atau secara rasio turun dari 2,13% menjadi 1,28%. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sub sektor pertambangan batubara, penggalian gambut, gasifikasi batubara, dan pembuatan briket batubara. Sejalan dengan perkembangan tersebut, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara dari subsektor mineral dan batubara (minerba) pada September 2024S adalah sebesar Rp99,34 triliun atau mencapai 87,94% dari target tahun ini. Tidak hanya itu, berdasarkan Data Kementerian ESDM, realisasi produk batubara Indonesia juga telah mencapai 593,52 juta ton per 30 September 2024 atau mencapai 83,59% dari target produksi tahun ini yang ditetapkan sebesar 710 juta ton.

Penurunan nominal NPL terbesar ketiga terjadi pada sektor pertanian. Nominal NPL pada sektor tersebut turun Rp769,82 triliun, sehingga mendorong perbaikan risiko kredit dari 2,21% menjadi 1,90%. Pendorong utama perbaikan risiko kredit pada sektor ini adalah subsektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura. Sejalan dengan perkembangan tersebut, nilai ekspor yang dihasilkan oleh sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama kinerja ekspor nonmigas Indonesia. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan sepanjang Januari-September 2024 meningkat 17,58% (ctc) dari -9,03% (ctc) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan nilai ekspor hasil pertanian antara

lain didorong oleh meningkatnya ekspor komoditas kopi sepanjang periode tersebut yang mencapai 342,33 ribu ton atau senilai USD1,49 miliar. Angka tersebut meningkat 29,82% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD1,15 miliar.

Selanjutnya, penurunan nominal NPL yang cukup besar terlihat pada sektor perdagangan besar dan eceran. Nominal NPL pada sektor ini turun sebesar Rp624,75 miliar sehingga menurunkan rasio NPL dari 3,69% menjadi 3,34%. Perbaikan rasio NPL pada sektor perdagangan didorong oleh subsektor penjualan mobil, sepeda motor, dan penjualan eceran bahan bakar kendaraan. Meskipun demikian, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil pada September 2024 tercatat sebanyak 72.666 unit atau berkontraksi -9,08% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yaitu 79.919 unit. Bahkan, pasar perdagangan mobil di Indonesia terutama untuk mobil baru masih melesu atau berkontraksi -16,22% (ctc) selama periode Januari-September 2024. Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab turunnya penjualan mobil domestik sejak awal tahun karena calon pembeli cenderung *wait and see* menanti perkembangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pasar tertekan karena kenaikan suku bunga bank, nilai tukar Rupiah/USD yang fluktuatif, dan kenaikan upah pekerja yang tidak sepadan dengan besaran inflasi.

Sektor *real estate* mengalami penurunan nominal NPL cukup besar yaitu Rp458,63 miliar. Penurunan nominal NPL ini mendorong perbaikan risiko kredit pada sektor *real estate* dari 2,11% menjadi 1,86%. Subsektor jasa persewaan mesin dan peralatannya (tanpa operator), barang-

barang keperluan rumah tangga dan pribadi menjadi pendorong utama penurunan nominal NPL pada sektor *real estate*. Secara umum, perbaikan risiko kredit di sektor ini sejalan dengan pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha *real estate* pada triwulan III-2024 yang tumbuh 2,32% (yoy) lebih tinggi dari 2,21% periode yang sama tahun lalu. Selain itu, penurunan NPL utamanya juga didorong oleh menurunnya nominal NPL pada jasa persewaan alat transportasi air. Perkembangan tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 19,4 juta orang selama Januari-September 2024 atau naik 27,17% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan jumlah penumpang tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat termasuk penggunaan angkutan laut dalam negeri untuk keperluan bisnis maupun wisata. Selain itu, beberapa maskapai pelayaran juga kerap menawarkan promo dan diskon harga tiket pada periode tersebut sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan laut sebagai pilihan moda transportasi.

Sektor listrik, gas dan air juga turun cukup besar secara nominal yaitu sebesar Rp164,99 miliar (yoy) atau secara rasio turun dari 0,40% menjadi 0,27%. Penurunan didorong oleh turunnya NPL pada subsektor gas dan ketenagalistrikan. Sebagai informasi, saat ini Pemerintah melalui Kementerian ESDM tengah serius menggarap potensi besar Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia sebagai sumber energi andalan di masa depan, salah satunya melalui akselerasi

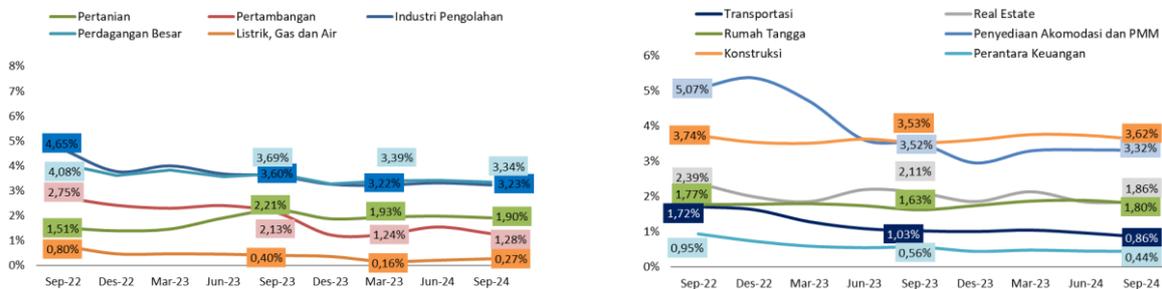
pengembangan EBT baik listrik maupun non listrik.

Jika dilihat dari penurunan rasio, salah satu sektor dengan penurunan terbesar adalah jasa pendidikan dengan penurunan NPL sebesar 37 bps dari 1,59% menjadi 1,22% (yoy). Penurunan NPL terjadi pada subsektor pendidikan tinggi yang turun 64 bps menjadi 1,70% dari 2,34% (yoy). Selain itu, rasio NPL sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga turun 20 bps, dari 3,52% pada September 2023 menjadi 3,32% pada September 2024. Subsektor yang menarik ke bawah NPL pada sektor ini adalah penyediaan akomodasi hotel melati dan hotel bintang yang masing-masing menjadi 4,28% dan 3,47% pada September 2024. Rasio NPL penyediaan akomodasi hotel melati turun cukup besar yaitu 259 bps,

setelah pada September 2023 memiliki rasio NPL yang tinggi di atas *threshold* yaitu mencapai 6,87%.

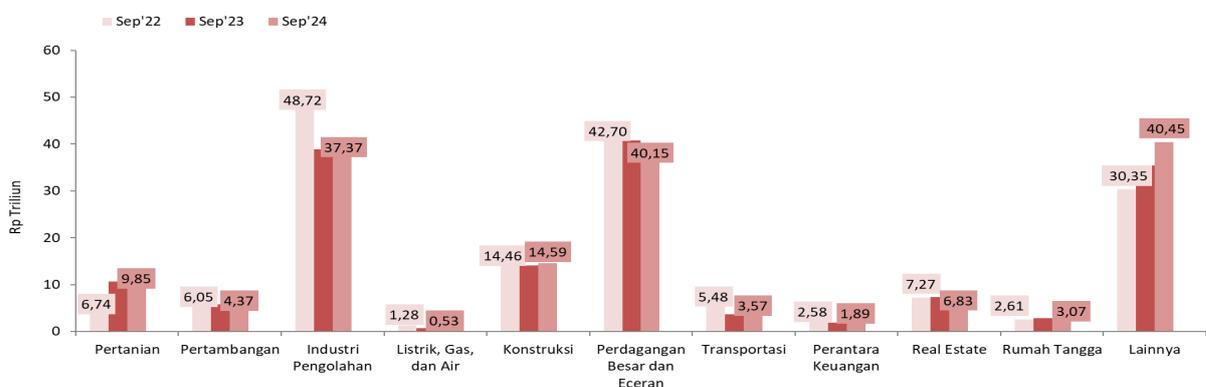
Di sisi lain, NPL pada sektor rumah tangga, yang merupakan sektor ekonomi terbesar, justru meningkat dari 1,89% menjadi 1,98%, atau secara nominal meningkat Rp 4,87 triliun. Peningkatan NPL pada sektor ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya NPL pada Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal, dan Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor. Jika dilihat dari PDB Indonesia berdasarkan pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga memang tumbuh melambat, seiring dengan penurunan jumlah kelas menengah yang diikuti dengan pelemahan daya beli masyarakat akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor.

Grafik 28 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI September 2024, diolah

Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: SPI September 2024, diolah

1.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi proyek, perbaikan risiko kredit terjadi di wilayah Jawa, Sumatera, serta Sulawesi seiring dengan momentum pemulihan ekonomi domestik yang masih berlanjut di tengah rambatan risiko global.

Rasio NPL di wilayah Jawa tercatat membaik seiring pertumbuhan kredit yang lebih tinggi yaitu 11,19% (yoy) pada September 2024 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,79% (yoy). Hal ini selanjutnya mendorong perbaikan rasio NPL dari 2,50% pada September 2023 menjadi 2,27% pada September 2024 meskipun secara nominal NPL naik sebesar Rp1,11 triliun. Perbaikan rasio NPL di wilayah Jawa utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp2,24 triliun (porsi kredit Provinsi Jawa Timur: 13,58% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa) dengan perbaikan rasio NPL dari 3,26% menjadi 2,79%. Adapun penurunan nominal NPL Provinsi Jawa Timur utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan sebesar Rp945,47 miliar atau secara rasio membaik dari 2,17% (yoy) menjadi 1,62% (yoy). Sejalan dengan itu, kinerja sektor industri pengolahan di Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari 4,11% (yoy) menjadi 5,92% (yoy) pada triwulan III-2024. Sebagaimana diketahui sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada periode laporan dengan kontribusi sebesar 30,54% terhadap PDB.

Selanjutnya, wilayah Sumatera juga mencatatkan perbaikan rasio NPL dari 2,56% pada September 2023 menjadi 2,00% pada September 2024 dengan nominal NPL yang

turun sebesar Rp1,76 triliun. Perbaikan rasio NPL di wilayah tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3,14 triliun (porsi kredit Provinsi Sumatera Selatan: 16,69% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera) atau secara rasio turun dari 4,03% pada September 2023 menjadi 1,86% pada September 2024. Penurunan nominal NPL Provinsi Sumatera Selatan utamanya ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp2,14 triliun atau secara rasio turun dari 25,80% menjadi 0,69%. Sejalan dengan itu, kinerja sektor pertambangan dan penggalian di Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu mencapai 8,30% (yoy) pada triwulan III-2024 dan lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,61% (yoy). Sebagai informasi, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari lima provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia dan terus mencatatkan peningkatan produksi cukup signifikan.

Perbaikan rasio NPL juga terlihat di wilayah Sulawesi dari 3,18% menjadi 2,79%. Perbaikan rasio NPL di wilayah tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit yang lebih tinggi (12,53%, yoy) daripada pertumbuhan NPL (-1,30%, yoy). Adapun perbaikan risiko kredit di wilayah tersebut utamanya didorong oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (porsi kredit Provinsi Sulawesi Tenggara: 11,73% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi) dengan perbaikan rasio NPL dari 1,96% menjadi 1,43% atau secara nominal turun sebesar Rp113,23 miliar. Penurunan nominal NPL di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan

penggalian yaitu sebesar Rp99,34 miliar atau secara rasio turun dari 10,15% menjadi 0,81%. Penurunan rasio NPL pada sektor pertambangan dan penggalian di Sulawesi Tenggara sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit untuk sektor tersebut sebesar 46,33% (yoy) pada September 2024.

Di sisi lain, terdapat beberapa wilayah yang tercatat mengalami kenaikan rasio NPL dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seperti: Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara serta Papua dan Maluku. Pada wilayah Kalimantan, terjadi kenaikan rasio NPL dari 1,63% menjadi 1,93% seiring dengan pertumbuhan kredit yang melambat di wilayah tersebut dari 10,62% (yoy) menjadi 8,72% (yoy) disertai kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,89 triliun. Kenaikan rasio NPL terbesar di wilayah tersebut dipengaruhi oleh Provinsi Kalimantan Tengah (porsi kredit: 16,85% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan) yang secara rasio naik dari 1,47% pada September 2023 menjadi 3,57% pada September 2024. Dalam hal ini, kenaikan nominal NPL di provinsi tersebut utamanya dipengaruhi oleh naiknya nominal NPL sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp1,51 triliun dengan rasio NPL yang meningkat dari 2,33% menjadi 22,34%. Kenaikan rasio NPL sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit pada sektor tersebut yang melambat dari 56,29% (yoy) menjadi 15,34% (yoy).

Selanjutnya, kenaikan rasio NPL juga terlihat pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara dari 1,83% menjadi 1,91% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp5,19 triliun. Kenaikan

rasio NPL terbesar utamanya dipengaruhi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (porsi: 21,04% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Bali Nusra) sebesar Rp750 miliar dengan rasio NPL yang meningkat dari 1,54% menjadi 2,64%. Peningkatan rasio NPL tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp445,09 miliar dengan kenaikan rasio NPL dari 2,38% sampai melampaui *threshold* yaitu menjadi 6,14%. Penurunan kualitas kredit sektor perdagangan besar dan eceran di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor tersebut dari 10,26% (yoy) menjadi 2,54% (yoy).

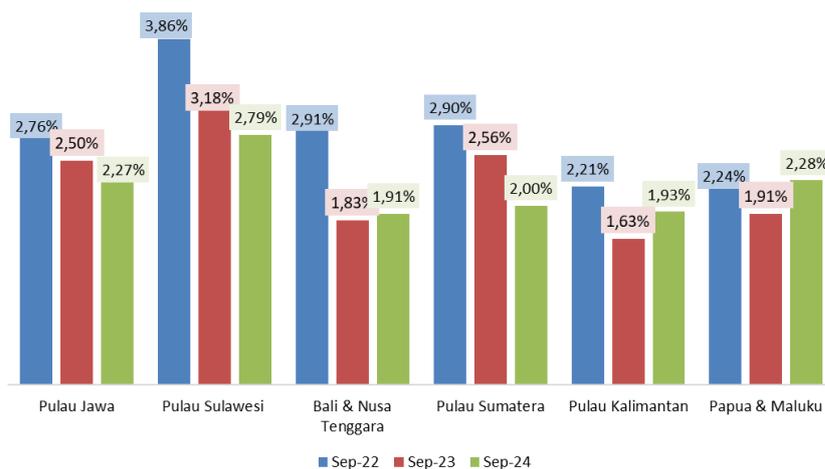
Terakhir, rasio NPL di wilayah Papua dan Maluku juga menunjukkan kenaikan dari 1,91% menjadi 2,28% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp487,61 miliar. Kenaikan rasio NPL terbesar di wilayah tersebut utamanya didorong oleh Provinsi Maluku Utara dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp303,95 miliar (porsi kredit Provinsi Maluku Utara: 32,18% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Papua dan Maluku). Kenaikan nominal tersebut utamanya didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp4,55 triliun dengan kenaikan rasio NPL dari 0,00% menjadi 0,33%. Hal tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Maluku Utara dari 62,15% (yoy) menjadi -10,47% (yoy) pada triwulan III-2024. Adapun perlambatan PDRB tersebut ditengarai sejalan dengan aktivitas hilirisasi di sektor pertambangan dan penggalian yang tidak semasif periode sebelumnya.

Tabel 21 NPL Gross Lokasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode September 2024

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Perantara Keuangan	Total	
Jawa	NPL %	2,59%	1,00%	3,70%	0,27%	3,07%	3,26%	0,80%	2,17%	0,38%	2,27%
Sumatera	NPL %	1,43%	1,47%	1,27%	0,03%	6,27%	3,67%	1,06%	1,71%	5,06%	2,00%
Kalimantan	NPL %	0,54%	3,14%	0,83%	0,13%	5,60%	3,28%	0,82%	1,71%	1,58%	1,93%
Sulawesi	NPL %	5,36%	0,61%	5,64%	0,20%	5,79%	4,16%	2,23%	1,61%	2,77%	2,79%
Bali & Nusa Tenggara	NPL %	3,66%	0,03%	1,61%	2,03%	10,72%	3,23%	1,40%	1,26%	1,89%	1,91%
Papua & Maluku	NPL %	0,88%	0,25%	0,50%	0,31%	10,99%	3,47%	4,18%	2,04%	0,08%	2,28%
Total		1,90%	1,28%	3,23%	0,27%	3,62%	3,34%	0,86%	1,98%	0,44%	2,21%

Sumber: LBUT, diolah

Grafik 30 Tren Rasio NPL Gross berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)



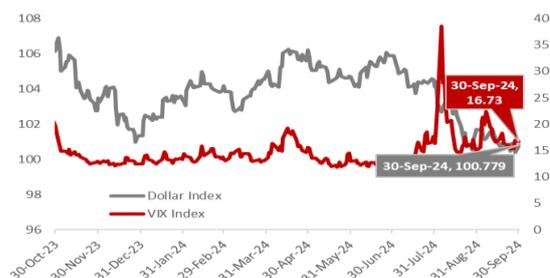
Sumber: LBUT, diolah

2. Risiko Pasar

Pada triwulan III-2024, risiko pasar tetap terkendali di tengah perkembangan pemilu AS, kebijakan fiskal pemerintahan baru, dan gejolak geopolitik terutama di wilayah Eropa dan Timur Tengah. Masih terjaganya tekanan di pasar keuangan global juga tecermin dari *Volatility Index* (VIX) yang cenderung melandai pada September 2024. Sementara itu, diumumkannya keputusan The Fed pada *Federal Open Market Committee* (FOMC) bulan September 2024 yang akhirnya menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 bps ke level 4,75% - 5,00%, berpengaruh pada kecenderungan menurunnya *US Treasury yield* dan mendorong pergerakan indeks dolar AS yang cenderung melemah.

Selain itu, tekanan inflasi yang lebih terkendali dan perkembangannya yang cenderung melandai menjadikan ekspektasi pasar akan berlanjutnya pemangkasan suku bunga lanjutan semakin menguat. Kondisi tersebut memberikan sinyal positif terhadap potensi peningkatan *capital inflow* ke negara berkembang atau *emerging market*, dan salah satunya ke Indonesia.

Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index

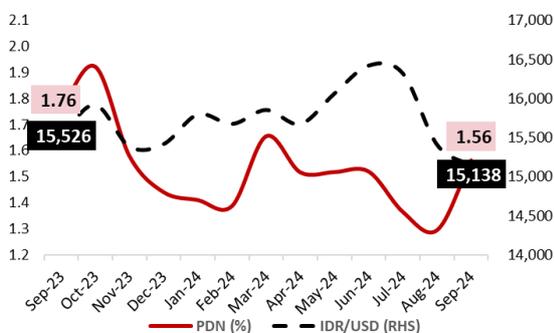


Sumber: Reuters

2.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir September 2024, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp15.138/USD, menguat 2,50% dari posisi akhir September 2023 sebesar Rp15.526/USD. Seiring penguatan nilai tukar tersebut, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada September 2024 masih terjaga rendah sebesar 1,56%, serta turun dari tahun lalu sebesar 1,76%. PDN masih berada pada posisi *Long* sehingga dampaknya terhadap pendapatan perbankan masih positif. Rasio PDN tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank yang terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (55 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%).

Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



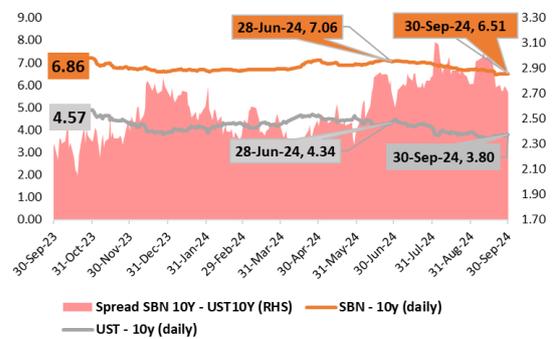
Sumber: Bank Indonesia

2.2 Risiko Suku Bunga

Perkembangan indikator ekonomi AS yang solid serta langkah The Fed memotong suku bunga acuan pada bulan September 2024 setelah beberapa waktu bertahan pada posisi *high(er) for longer* mendorong penurunan *yield* US *Treasury* tenor 10 tahun pada triwulan III-2024. Menurunnya UST *yield* pada periode laporan tersebut juga diiringi dengan menurunnya *yield* SBN

tenor 10 tahun, namun *spread* antara *yield* UST dan SBN masih melebar sehingga mendorong masuknya arus modal asing ke dalam negeri.

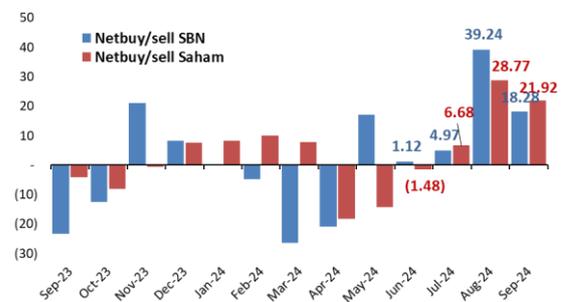
Grafik 33 Spread Yield UST dan SBN



Sumber: PHEI dan Reuters

Pada pasar keuangan, kepercayaan dari investor masih cukup baik di pasar SBN yang selama setahun terakhir mencatatkan *capital inflow* atau *net buy* transaksi non-residen sebesar Rp45,13 Triliun seiring dengan *spread* yang melebar. Tercatatnya *capital inflow* selama setahun tersebut turut mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Sejalan dengan SBN, transaksi investor asing atau non-residen di pasar saham juga mencatatkan *net buy* atau *capital inflow* sebesar Rp48,69 Triliun dari September 2023 hingga September 2024.

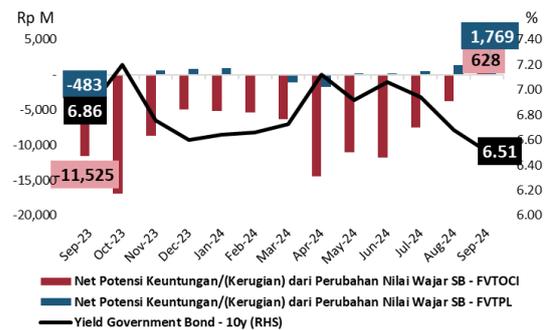
Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



Sumber: DJPPR dan BEI

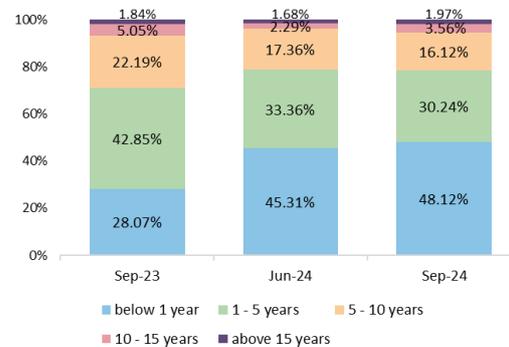
Di perbankan, risiko suku bunga yang dilihat dari nilai wajar berdasarkan *mark-to-market* masih terjaga. Pada September 2024, *yield* SBN turun menjadi 6,51% dibandingkan dengan posisi tahun lalu (September 2023) sebesar 6,86%. Nilai wajar portofolio obligasi kategori *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL) masih menunjukkan potensi keuntungan, diikuti juga oleh obligasi kategori *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVTOCI) yang mencatatkan potensi keuntungan setelah sebelumnya masih dalam posisi *loss* seiring dengan penurunan *yield*. Selain itu, terdapat penurunan rata-rata sisa jatuh tempo SSB pada September 2024 dibandingkan September 2023 sehingga mengurangi fluktuasi nilai wajar SSB bank jika terjadi pergerakan suku bunga.

Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan



Sumber: Reuters dan LBUT

Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor



Sumber: LBUT

Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)			Porsi SSB (%)		
	Sep-23	Jun-24	Sep-24	Sep-23	Jun-24	Sep-24
FVTOCI	850.74	1,062.63	1,083.40	45.03%	47.17%	47.67%
FVTPL	154.95	226.74	250.97	8.20%	10.06%	11.04%
AC	883.39	963.57	938.52	46.76%	42.77%	41.29%
Total Industri	1,889.07	2,252.94	2,272.89	100%	100%	100%

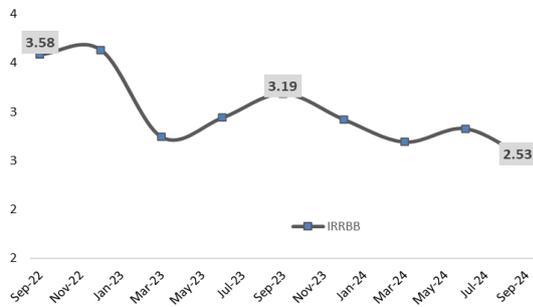
Sumber: LBUT

Risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* juga masih terjaga tecermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 2,53%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 3,19%. Penurunan IRRBB didorong oleh kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang berkontraksi sebesar -17,21% (yoy)

(tahun lalu tumbuh 27,19%, yoy) utamanya karena turunnya simpanan berjangka dan kewajiban pada bank lain. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang tumbuh 4,23% (yoy), walaupun melambat dari tahun lalu yang tumbuh tinggi 43,09% (yoy). Pertumbuhan aset tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit. Sementara itu, aset jangka panjang

dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perbankan turun sebesar -9,39% (yoy) melanjutkan kontraksi dari tahun sebelumnya -3,55% (yoy).

Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

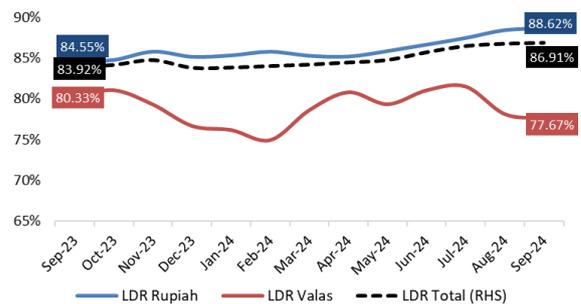
3. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai di tengah tumbuhnya penyaluran kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio LCR di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masih berada di atas *threshold* (100%). Selain itu, dalam hal pemenuhan kondisi likuiditas untuk jangka pendek, perlu diperhatikan adanya kenaikan volume transaksi PUAB yang juga diiringi dengan kenaikan suku bunga yang dapat mengindikasikan adanya kebutuhan dana yang bersifat *short-term* oleh bank.

Pada September 2024, LDR perbankan tercatat sebesar 86,91%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 83,92%. Peningkatan

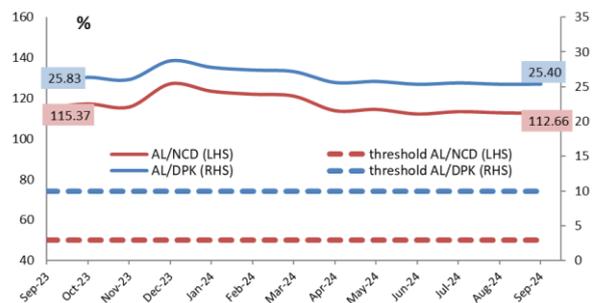
LDR didorong oleh naiknya LDR rupiah menjadi 88,62% dari tahun sebelumnya sebesar 84,55%. Selain itu, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing masih terjaga sebesar 112,66% dan 25,40%, jauh berada di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), walaupun menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 115,37% dan 25,83%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK dan *Non Core Deposit* (NCD) yang melampaui pertumbuhan alat likuid. Kendati alat likuid per September 2024 tumbuh hanya sebesar 5,22% (yoy), namun sudah membaik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh relatif rendah yaitu sebesar 0,62% (yoy).

Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBUT

Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)

perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 222,64% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 228,88%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh sebesar 8,94% (yoy) melampaui *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang tumbuh sebesar 5,97% (yoy).

Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan

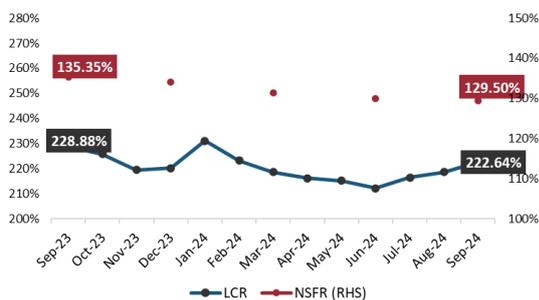
Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Sep-23	Jun-24	Sep-24
KBMI 1	108	304	309
KBMI 2	413	487	492
KBMI 3	659	668	681
KBMI 4	1,384	1,289	1,235
TOTAL HQLA	2,563	2,748	2,716

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Sep-23	Jun-24	Sep-24
KBMI 1	33	136	142
KBMI 2	158	178	176
KBMI 3	285	291	264
KBMI 4	644	689	638
TOTAL NCO	1,120	1,295	1,220

Kelompok	LCR (%)		
	Sep-23	Jun-24	Sep-24
KBMI 1	325.64	222.67	217.38
KBMI 2	261.43	274.03	279.71
KBMI 3	231.48	229.40	257.60
KBMI 4	214.77	186.96	193.61
LCR Industri	228.88	212.22	222.64

Sumber: OJK

Grafik 40 Perkembangan LCR dan NSFR



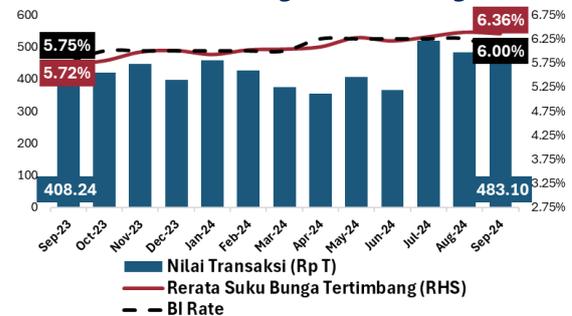
Sumber: APOLO

Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada

level 129,50%, meski menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 135,35%.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB masih cukup terjaga, dengan volume transaksi yang meningkat diiringi suku bunga rata-rata tertimbang yang juga meningkat. Peningkatan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan meningkatnya suku bunga acuan BI *Rate* dalam setahun terakhir sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada periode laporan. Selain itu, meningkatnya volume transaksi PUAB juga antara lain dapat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) BI.

Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LBUT Harian

4. Risiko Hukum

4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan III-2024, terdapat tujuh Kantor Bank (KB) dengan tujuh Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan III maupun pada periode sebelumnya,

sebanyak enam KB dengan 6 (enam) PKP masih dalam proses, satu PKP pada satu KB BU ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pengawasan, dan sembilan PKP pada delapan KB telah dilimpahkan untuk penanganan lebih lanjut kepada Satuan Kerja Penyidikan.

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank, selama triwulan III-2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap enam KB.

Tabel 24 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan III-2024	
	Total	
	KB	PKP
1. PKP yang diterima	7	7
2. PKP dalam proses *)	6	6
3. PKP yang dikembalikan *)	1	1
4. PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	8	9

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya

Sumber: OJK

4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama

triwulan III-2024 telah memberikan keterangan Ahli dan/atau Saksi sebanyak empat kali dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait tindak pidana perbankan. Pemberian keterangan tersebut terdiri atas satu permintaan dari Polri, dua permintaan dari Kejaksaan RI serta satu permintaan dari Satuan Kerja Penyidikan OJK.

Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	1	0	1
2	Kejaksaan RI	1	1	2
3	Penyidik OJK	1	0	1
Total		3	1	4

Sumber: OJK

Keterangan Ahli yang diberikan mencakup kasus-kasus yang ditangani oleh OJK maupun kasus yang dilaporkan oleh bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan. Pemberian keterangan ini dilakukan berdasarkan kompetensi dalam bidang perbankan dan pengawasan bank, serta pengalaman pegawai dalam menangani dugaan tipibank. Adapun keterangan Saksi diberikan atas permintaan Kejaksaan terkait kasus yang tengah dalam proses persidangan, yang sebelumnya telah ditangani oleh OJK.

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan empat ketentuan terkait perbankan yaitu dalam bentuk POJK. Secara umum, empat ketentuan tersebut mengatur tentang Tata Kelola BPR/S, Pelaporan dan Permintaan SLIK, Strategi Anti *Fraud* Bagi LJK, dan Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional. OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan III-2024, OJK menerbitkan empat ketentuan terkait perbankan, yaitu dalam bentuk Peraturan OJK (POJK), antara lain sebagai berikut:

1.1 POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

POJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah diterbitkan pada 1 Juli 2024 merupakan penyempurnaan atas 2 POJK yaitu POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No.24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR Syariah yang disusun sebagai upaya untuk mendorong penguatan tata kelola dalam operasional BPR dan BPR Syariah. Selain itu, pembentukan POJK juga merupakan mandat Pasal 20B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam POJK ini diatur tentang:

- 1) Prinsip dan prosedur penerapan tata kelola yang baik;
- 2) Pilar penerapan tata kelola yang terdiri atas aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, kelengkapan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk pengendalian internal, batas maksimum pemberian kredit dan batas maksimum penyaluran dana, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dan rencana bisnis;
- 3) Kewajiban penyusunan prosedur internal dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan selain kegiatan usaha, serta

keharusan bagi BPR/S untuk mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik;

- 4) Pelaporan transparansi pelaksanaan tata kelola (transparansi dan *self assessment*) dan laporan penerapan tata kelola; dan
- 5) Penyesuaian penerapan tata kelola dan sanksi atas pelanggaran ketentuan.

1.2 POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sesuai dengan peta jalan pengembangan sistem pelaporan kredit, OJK memperluas cakupan pelaporan transaksi penyediaan dana oleh sektor perasuransian, penjaminan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan penambahan pelapor, SLIK diharapkan dapat menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif guna mendukung LJK dalam proses analisis penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan, serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK. Adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan pelapor dan menambah informasi terkait pertanggungjawaban/pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

POJK yang diterbitkan pada 31 Juli 2024 ini mengatur mengenai:

- 1) Penyesuaian definisi debitur dan informasi debitur dengan penambahan cakupan fasilitas yang diterima debitur yaitu pertanggungjawaban/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- 2) Tambahan pelapor wajib pada SLIK yaitu:
 - a. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*;
 - b. Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah;
 - c. Perusahaan Penjaminan;
 - d. Perusahaan Penjaminan Syariah; dan
 - e. Penyelenggara LPBBTI;
 dengan batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 (satu) tahun sejak POJK SLIK diundangkan.

1.3 POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Semakin kompleks kegiatan usaha lembaga jasa keuangan (LJK) mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bagi LJK terhadap potensi terjadinya fraud. Risiko terjadinya fraud menjadi penting karena berdampak pada kerugian baik kepada industri jasa keuangan, pemerintah maupun kepada masyarakat. Untuk meminimalisasi terjadinya fraud, diperlukan berbagai penguatan pada sistem pengendalian internal LJK, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada LJK. Saat ini, strategi anti fraud

telah berjalan di industri bank umum, industri perasuransian, dan industri perusahaan pembiayaan melalui instrumen peraturan yang diterbitkan oleh OJK, meskipun terdapat perbedaan kompleksitas dalam standar yang diatur di dalamnya. Untuk itu, ketentuan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, perasuransian, dan perusahaan pembiayaan perlu disempurnakan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi LJK agar dapat berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia.

POJK ini diterbitkan pada 31 Juli 2024. Beberapa ketentuan yang diatur dalam POJK ini antara lain terkait jenis perbuatan yang tergolong fraud, kewajiban menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud, dan kewajiban memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menanganai penerapan strategi anti-fraud.

Selain itu sebagai langkah awal, Bank Umum dan LJK yang sebelumnya telah menerapkan SAF wajib menyampaikan perubahan kebijakan SAF paling lambat 3 (tiga) bulan sejak POJK berlaku, sedangkan LJK yang belum menerapkan SAF, wajib menyampaikan kebijakan SAF paling lambat 6 (enam) bulan sejak POJK berlaku.

Seluruh Bank Umum, BPR/BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 miliar, Dana Pensiun dengan aset paling sedikit Rp500 miliar dan LJK lain yang memenuhi kriteria modal disetor lebih dari Rp50 miliar atau dengan aset lebih dari Rp500 miliar, menjadi pelapor awal Laporan Penerapan SAF (laporan rutin semesteran) dengan batas waktu 31 Januari 2025. Sedangkan LJK diluar kategori tersebut wajib menyampaikan

laporan penerapan SAF pertama kali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya POJK SAF LJK ini.

Selain Laporan Penerapan SAF, LJK juga wajib menyampaikan laporan kejadian Fraud berdampak signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

1.4 POJK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional

Sebagai tindak lanjut amanat UU P2SK, POJK yang terbit pada 12 Agustus 2024 ini diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih jelas dan terstandarisasi bagi BUK untuk mempublikasikan SBDK ke masyarakat dan melaporkan SBDK ke OJK, sehingga SBDK antara satu bank dengan bank lainnya dapat diperbandingkan. Sebagai *outcome* dari kebijakan ini adalah mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan di mana bank-bank akan bersaing menawarkan suku bunga yang paling kompetitif dan sebaliknya, kewajiban mempublikasikan berbagai informasi terkait SBDK akan memperkuat literasi masyarakat dalam memilih suku bunga dari perbankan yang paling kompetitif.

POJK ini antara lain mengatur terkait penegasan definisi SBDK, pertimbangan suku bunga acuan, pengumuman komponen pembentuk SBDK, penyampaian detail komponen SBDK yang tervalidasi dengan laporan bank umum terintegrasi, dan sanksi kesalahan pengumuman SBDK ke masyarakat. Dengan terbitnya POJK SBDK BUK, diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK dalam rangka meningkatkan keterbandingan, edukasi dan

pelindungan konsumen, serta transmisi kebijakan moneter.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional (BUK)

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan III-2024, telah diselesaikan 26 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari dua perizinan pembukaan kantor cabang, satu perizinan pemindahan alamat kantor pusat, satu perizinan pemindahan kantor wilayah, 18 perizinan pemindahan kantor cabang, dua perizinan peningkatan Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi Kantor Cabang (KC), satu perizinan perubahan nama, dan satu perizinan *merger* atau integrasi bank umum.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2024, terdapat 115.177 jaringan kantor BUK, terdiri dari 115.111 jaringan kantor di dalam negeri dan 66 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 91.173 unit.

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan sebanyak 215 jaringan kantor, terutama pada Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) dan terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) yang masing-masing turun sebesar 211 unit dan 24 unit menjadi 18.814 unit Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) dan 91.173 unit terminal perbankan elektronik pada triwulan – III 2024.

Tabel 26 Jaringan Kantor BUK

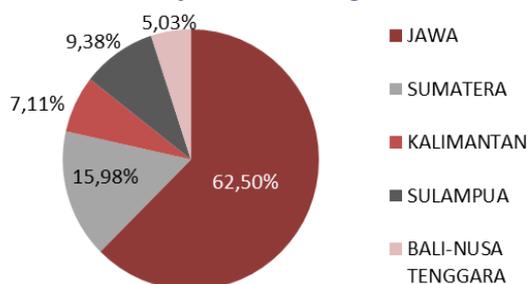
JARINGAN KANTOR	2024 TW II	2024 TW III	Δ
1 Kantor Pusat Operasional	37	37	-
2 Kantor Pusat Non Operasional	54	53	(1)
3 Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN)	7	7	-
4 Unit Usaha Syariah	19	19	-
5 Kantor Wilayah	151	150	(1)
6 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.706	2.690	(16)
7 Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	17	-
8 Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri	19	19	-
9 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	19.025	18.814	(211)
10 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11 Kantor Fungsional (KF)	1.172	1.216	44
12 Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk KF	9	9	-
13 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	6	1
14 Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM)	91.197	91.173	(24)
JARINGAN KANTOR UUS			
15 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	159	156	(3)
16 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	225	225	-
17 Kantor Kas	-	-	-
18 Kantor Fungsional	189	186	(3)
19 <i>Payment Point</i>	-	-	-
20 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	-	-	-
21 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	163	165	2
22 Layanan Syariah Bank Umum	231	228	(3)
TOTAL	115.392	115.177	(215)

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor BUK di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 71.521 jaringan kantor (62,50%), diikuti pulau Sumatera 18.289 (15,98%), Sulampua 10.730 (9,38%), Kalimantan 8.134 (7,11%), dan Bali-Nusa Tenggara 5.761 (5,03%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan jaringan kantor pada seluruh wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

2.2 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan III-2024, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persetujuan penggabungan BPR, yaitu pada:
 - a. PT BPR Porong Idaman dan PT BPR Bangil Idaman ke dalam PT BPR Kridadhana Citranusa.
 - b. PT BPR LA Mangau Sejahtera ke dalam PT BPR Tri Capital Investama Sumbar.
 - c. PT BPR Pesona Letris Pratama ke dalam PT BPR Eka Bumi Artha.
 - d. PT BPR Musi Artha Surya ke dalam PT BPR Tri Gunung Selatan.

2. Pencabutan izin usaha BPR, yaitu pada:
 - a. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
 - b. PT BPR Sumber Artha Waru Agung
 - c. PT BPR Nature Primadana Capital.

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2024, terdapat 1.370 BPR dengan 8.254 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.951 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Terdapat perbedaan data perubahan jumlah BPR dengan data perizinan disebabkan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

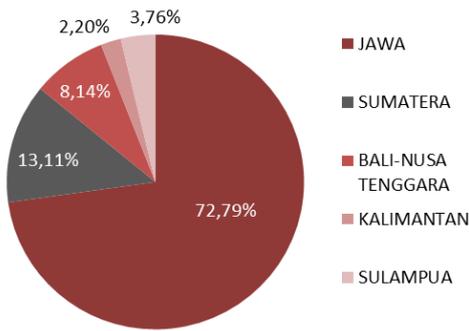
Tabel 27 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2024			Δ
	TW I	TW II	TW III	
- Kantor Pusat (KP)	1.389	1.383	1.370	(13)
- Kantor Cabang (KC)	1.939	1.939	1.937	(2)
- Kantor Kas (KK)	2.707	2.672	2.644	(28)
- ATM	390	391	380	(11)
- <i>Payment Point</i>	2.122	1.919	1.923	4
TOTAL	8.547	8.304	8.254	(50)

Sumber: OJK

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 72,98% (6.008 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 13,11% (1.082 jaringan kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan jaringan kantor hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan terbanyak di wilayah Jawa, sementara terdapat peningkatan jumlah jaringan kantor di wilayah Sulampua serta Bali-Nusa Tenggara.

Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.2.3 Tata Kelola

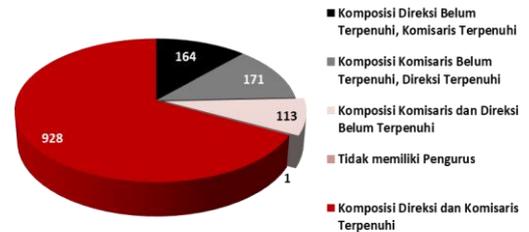
Penerapan tata kelola BPR dan BPRS diatur dalam masing-masing POJK Nomor 4/POJK.03/2015 (BPR) dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 (BPRS) dan dibedakan sesuai besaran modal inti. Besaran modal inti BPR dan BPRS akan menentukan antara lain syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan jumlah DPS.

Selain itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS guna menyempurnakan 2 POJK sebelumnya tersebut serta mulai efektif digunakan per tanggal 1 Juli 2024.

Sampai dengan September 2024, terdapat 928 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 113 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan SDM yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan

sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

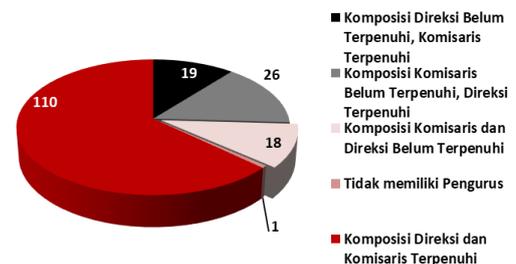
Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Untuk BPRS, sampai dengan September 2024, terdapat 110 BPRS yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 18 BPRS yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan.

Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

2.3 Perbankan Syariah

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan III-2024, terdapat enam proses perizinan kelembagaan untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan empat proses perizinan untuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Untuk perizinan BPRS, pada triwulan III-2024 terdapat dua jenis permohonan perizinan BPRS yang telah disetujui yaitu permohonan penggabungan BPRS untuk PT BPR Damata Artanugraha ke dalam PT BPRS Al Mabru Babadan dan permohonan Perubahan Kegiatan Usaha BPR menjadi BPR Syariah yaitu PT BPR Tunas Artha Jaya Abadi menjadi PT BPR Syariah Tunas Artha Jaya Abadi dan PT BPR Khatulistiwa Bonjol menjadi PT BPRS Khatulistiwa Bonjol.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2024, terdapat 8.082 jaringan kantor BUS, dengan tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (dua KC dan satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat peningkatan sebanyak 1.150 jaringan kantor BUS, dengan peningkatan terbanyak pada terminal elektronik.

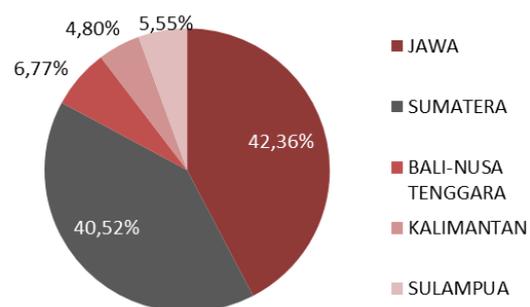
Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2024		Δ
	TW II	TW III	
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	7	7	-
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	8	8	-
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	21	21	-
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	410	411	1
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	2	2	-
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.582	1.576	(6)
7 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	356	348	(8)
8 Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	-	-	-
9 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	4.546	5.709	1.163
Layanan Syariah Bank Umum	6.932	8.082	1.150

Sumber: APOLO OJK

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera masing-masing memiliki porsi 42,36% (3.422 kantor) dan 40,52% (3.274 kantor). Selanjutnya diikuti Bali-Nusa Tenggara (6,77%, 547 kantor), Sulampua (5,55%, 448 kantor), dan Kalimantan (4,80%, 388 kantor). Terdapat peningkatan jaringan kantor di seluruh wilayah, dengan peningkatan terbanyak pada wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: APOLO OJK

Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 917 jaringan kantor, berkurang sembilan jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (68,05%, 624 kantor), diikuti Sumatera (24,75%, 227 kantor), Sulampua (4,69%, 43

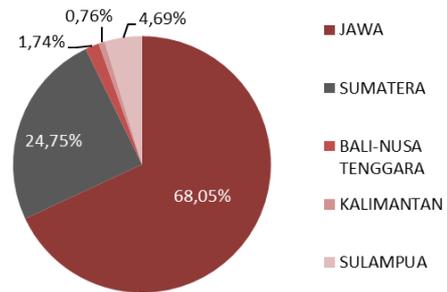
kantor), Bali-Nusa Tenggara (1,74%, 16 kantor), dan Kalimantan (0,76%, 7 kantor).

Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2024		Δ
	TW II	TW III	
- Kantor Pusat (KP)	173	173	-
- Kantor Cabang (KC)	216	219	3
- Kantor Kas (KK)	289	278	(11)
- ATM	71	71	-
- <i>Payment Point</i>	177	176	(1)
TOTAL	926	917	(9)

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS



Sumber: OJK

6 Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

6 Koordinasi Antar Lembaga Terkait Perbankan

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan III-2024 masih dalam kondisi terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global, seiring ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik dunia yang masih tinggi. Selain itu, OJK juga turut aktif dalam fora internasional, antara lain *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, *Working Committee-ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)*, dan *Financial Sector Assessment Program (FSAP) Review Indonesia 2023/2024*. Pada periode laporan juga terdapat pengembangan industri perbankan melalui diterbitkannya *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Bank Perekonomian Rakyat/BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah/BPRS (RP2B) 2024-2027*.

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada Selasa, 10 Oktober 2024, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS melaksanakan Rapat Berkala KSSK IV tahun 2024. Dalam siaran Pers KSSK tersebut disimpulkan bahwa, **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan III-2024 tetap terjaga, sejalan dengan**

meredanya tekanan di pasar keuangan global serta pelanggaran kebijakan moneter di berbagai negara utama. OJK bersama dengan KSSK akan terus melakukan dan meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, serta memperkuat kewaspadaan di tengah berbagai faktor risiko eksternal dan potensi dampak rambatannya terhadap perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri.

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menerapkan langkah kebijakan sebagai berikut:

- 1) OJK senantiasa mencermati dinamika global dan potensi dampak rambatannya terhadap sektor jasa keuangan agar dapat mengambil langkah antisipatif, serta meminta industri jasa keuangan untuk melakukan langkah mitigasi yang diperlukan;
- 2) OJK terus melanjutkan agenda penguatan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di

- antaranya dengan menerbitkan peraturan terkait penyempurnaan ketentuan dalam penerapan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS); penerbitan dan pelaporan obligasi daerah dan sukuk daerah; pelaporan dan permintaan informasi debitor melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan; penerapan strategi *anti-fraud*; transparansi dan publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional; serta pelaporan penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Asosiasi Penyelenggara ITSK;
- 3) Dari sisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK), terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu *Customer Identification File* (CIF) yang sama;
 - 4) Di industri keuangan syariah, dalam upaya mendukung pengembangan produk perbankan syariah, OJK telah mengembangkan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) yang merupakan produk bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang berbasis wakaf uang temporer. Selain itu, OJK terus melakukan monitoring kesiapan industri

- asuransi untuk melakukan *spin-off* unit syariah paling lambat akhir tahun 2026;
- 5) Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguatan industri jasa keuangan, OJK telah menerbitkan sejumlah peta jalan, antara lain: i) Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028; ii) Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028; iii) Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028, dan iv) Pengembangan dan Penguatan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028.

KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi global dan potensi ketegangan geopolitik dunia yang eskalatif terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.

Dengan telah diundangkannya UU P2SK, Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi global dan potensi ketegangan geopolitik dunia yang eskalatif terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Januari 2025.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman (NK) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan III-2024, OJK dan BI telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- 1) Penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman antara BI, OJK, dan LPS tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan;
- 2) Pemutakhiran daftar bank sistemik yang juga melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- 3) Penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi antara BI dan OJK yang merupakan turunan dari NK Koordinasi dan Kerjasama BI dan OJK;
- 4) Pembahasan terkait diskontinuitas JIBOR;
- 5) Pembahasan dan penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh kedua lembaga;
- 6) Pembahasan isu-isu terkait pertukaran data untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga;
- 7) Pembahasan kondisi industri perbankan maupun individu bank tertentu;

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang memerlukan koordinasi yang lebih intensif sesuai dengan Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan III-2024 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS yaitu:

- 1) Pertukaran data dan pengkinian kondisi Bank Umum maupun BPR/BPRS;
- 2) Penginian petunjuk pelaksanaan mengenai pertukaran data dan/atau informasi;
- 3) Persiapan dan pelaksanaan resolusi BPR/BPRS;
- 4) Pembahasan rencana integrasi e-Laporan LPS ke portal bersama pelaporan.id; dan
- 5) Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan.

OJK, BI, dan LPS juga melakukan koordinasi dalam hal penetapan metodologi dan pemutakhiran Bank Sistemik periode Oktober 2024 s.d. Maret 2025. Selain itu, ketiga Lembaga tersebut bekerja dalam hal pembahasan perpanjangan NK BI, OJK, dan LPS mengenai Pembangunan dan Pemeliharaan Integrasi Pelaporan di Sektor Perbankan.

3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional

3.1. *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*

OJK merupakan anggota BCBS. OJK terlibat aktif dalam berbagai pembahasan baik di BCBS Level 1 maupun *Groups BCBS* di Level 2 dan Level 3 yaitu *Supervisory Cooperation Group (SCG)*, *Policy and Standard Group (PSG)*, *Risk and Vulnerability Assessment Group (RVG)*, *Task Force on Climate-related Financial Risk (TCFR)*, *Accounting and Audit Expert Group (AAEG)*, dan *Financial and Technology Group (FTG)*. Pada Triwulan III-2024, OJK aktif berpartisipasi dalam menghadiri berbagai pertemuan dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1) *BCBS Committee*

Pertemuan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* pada tanggal 2-3 Juli 2024 dan 23-24 September 2024 secara virtual. Pada kedua pertemuan ini dilakukan beberapa agenda pembahasan, sebagai berikut:

- a) Pada pertemuan tanggal 2-3 Juli 2024, *BCBS Committee* telah menerbitkan kerangka pengungkapan akhir untuk paparan aset kripto bank dan amandemen yang ditargetkan pada standar aset kripto untuk memperketat kriteria bagi koin stabil tertentu untuk menerima perlakuan regulasi preferensial. Kedua standar tersebut akan diimplementasikan pada 1 Januari 2026.

Kerangka pengungkapan akhir mencakup serangkaian tabel dan templat standar yang mencakup paparan aset kripto bank. Ini

mengharuskan bank untuk mengungkapkan informasi kualitatif tentang aktivitas terkait aset kripto mereka dan informasi kuantitatif tentang persyaratan modal dan likuiditas untuk paparan aset kripto mereka. Penggunaan persyaratan pengungkapan umum bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan informasi dan mendukung disiplin pasar.

Amandemen yang ditargetkan pada standar prudensial aset kripto bertujuan untuk lebih mempromosikan pemahaman yang konsisten tentang standar tersebut, terutama mengenai kriteria bagi koin stabil untuk menerima perlakuan regulasi "Grup 1b" preferensial. Berbagai amandemen teknis lainnya mengklarifikasi aspek lain dari standar tersebut.

BCBS Committee akan terus memantau perkembangan pasar aset kripto dan kebutuhan untuk mengurangi risiko baru.

Beberapa hal lain yang dibahas pada pertemuan dimaksud yaitu amandemen terhadap standar mengenai risiko suku bunga pada *banking book (IRRBB)*, draf *consultative paper* mengenai *Third-party risk principles*, hasil *horizon scanning* terkait *private credit*, pengungkapan risiko keuangan terkait iklim, serta *technical amendments and frequently asked questions* mengenai standar perhitungan ATMR risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan standar mengenai risiko likuiditas.

- b) Pertemuan virtual pada tanggal 23-24 September 2024 untuk menilai perkembangan pasar terbaru (*recent market development*) dan risiko terhadap sistem perbankan global, serta membahas berbagai inisiatif kebijakan dan pengawasan.
- i) Perkembangan pasar terbaru. BCBS *Committee* membahas lonjakan volatilitas pasar pada akhir Juli dan awal Agustus. Meskipun episode ini berumur pendek tanpa dampak signifikan pada sistem perbankan global, hal ini menyoroti bagaimana penumpukan posisi besar yang di-*leverage* rentan terhadap pembubaran yang cepat. Mereka juga menekankan pentingnya bank dan pengawas terus memantau dan menilai keterkaitan bank dengan perantara keuangan non-bank. BCBS *Committee* juga membahas serangkaian gangguan operasional pada bulan Juli, yang mengakibatkan pemadaman di berbagai sektor, termasuk beberapa bank. Insiden ini menyoroti pentingnya ketahanan operasional bank dan pengelolaan risiko pihak ketiga, serta risiko sistemik yang timbul dari ketergantungan pada perangkat lunak atau layanan pihak ketiga yang sama. Komite saat ini sedang berkonsultasi tentang Prinsip yang diusulkan untuk pengelolaan risiko pihak ketiga yang baik.
- ii) *Global Systemic Banks (G-SIBs) BCBS Committee* menyetujui hasil latihan penilaian akhir 2023 untuk G-SIBs. Hasilnya akan diserahkan kepada Dewan Stabilitas Keuangan sebelum menerbitkan daftar G-SIBs tahun 2024.
- iii) *Banking Turmoil 2023 BCBS Committee* menyelesaikan laporan kemajuan analitis tentang pelajaran yang dipetik dari gejolak perbankan 2023. Atas permintaan Presidensi G20 Brasil, laporan ini didasarkan pada laporan awal Komite tentang gejolak tersebut, dengan fokus khusus pada pekerjaan analitis tindak lanjutnya tentang risiko likuiditas. BCBS *Committee* juga membahas kemajuan dalam kerjanya untuk memperkuat efektivitas pengawasan dengan mengembangkan serangkaian alat praktis untuk mendukung pengawas dalam pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan ini mencakup pengawasan risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam buku perbankan, penilaian keberlanjutan model bisnis bank, dan pentingnya penilaian pengawasan yang efektif. Hal ini merupakan bagian dari serangkaian inisiatif tindak lanjut oleh Komite terhadap gejolak perbankan tahun lalu.
- iv) Risiko keuangan terkait iklim BCBS *Committee* terus meninjau komentar yang diterima atas konsultasinya yang mengusulkan

kerangka kerja pengungkapan Pilar 3 untuk risiko keuangan terkait iklim.

- 2) *Policy and Standard Group* (PSG)
Pertemuan virtual pada tanggal 11 September 2024 membahas 5 (lima) agenda utama yaitu pertukaran informasi mengenai perkembangan terkini di beberapa yurisdiksi anggota PSG, asesmen *Global Systemically Important Banks* (G-SIB), risiko suku bunga pada *banking book* (*interest rate in the banking book/IRRBB*), pengkinian *Regulatory Consistency Assessment Program* (RCAP) *handbook*, dan hasil *public consultation* mengenai amandemen teknis terhadap kerangka Basel.
- 3) *Risk and Vulnerability Assessment Group* (RVG)
Pada Triwulan III 2024, RVG melaksanakan survei terkait pelaksanaan *Global Stress Test* (GST) di masing-masing yurisdiksi dan survei terkait risiko terkini berdasarkan pandangan masing-masing yurisdiksi. Selain itu, OJK juga menghadiri pertemuan RVG pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2024 di Basel, Swiss dengan topik pembahasan yaitu hasil survei risiko Semester II 2024, risiko terhadap bank yang berasal dari keterkaitannya dengan IKNB, peningkatan komparabilitas dan pengembangan kerangka metodologi untuk *Global Stress Testing* (GST) mendatang, dan *work program* RVG di tahun 2025.
- 4) *Task Force on Climate-related Financial Risk* (TFCR)

- a. Pertemuan virtual pada 10 Juli 2024 dengan topik pembahasan analisis *gap* terkait penilaian bobot risiko yang didasari oleh peringkat *External Credit Assessment Institution* (ECAI) atau lembaga pemeringkat yang menyebabkan persyaratan modal yang tidak semestinya sebagai akibat dari tidak memasukkannya risiko keuangan terkait iklim ke dalam penilaian peringkat serta pembahasan mengenai *transition planning*.
- b. Pertemuan virtual pada 5 September 2024 yang membahas terkait isu pengungkapan iklim, yaitu mengenai *template* dan cakupan pengungkapan antar yurisdiksi dan tanggal efektif pemberlakuan pengungkapan.

3.2. Working Committee – ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)

Sehubungan telah terlaksananya pertemuan WC-ABIF ke-16 yang dipimpin oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan *National Bank of Cambodia* (NBC) selaku *co-chair* WC-ABIF 2024-2026 pada 11 September 2024, WC-ABIF membahas antara lain:

- 1) Hasil survei oleh *co-chair* kepada bank asli ASEAN yang sudah beroperasi di negara ASEAN lain terkait hambatan, tantangan, dan ekspektasi insentif terkait ekspansi ke negara ASEAN lain;
- 2) Tindak lanjut review dokumen ABIF *guidelines* yang sudah berlaku sejak 2014, menindaklanjuti *progress report* terkait ABIF yang sudah disusun pada *co-chairmanship* OJK, BI, dan *State Bank of Vietnam* (SBV) pada 2022-2024. OJK

berpandangan agar *Key Performance Indicators* ABIF dan *ABIF Guidelines* yang baru dapat lebih mempertimbangkan perkembangan peran perbankan di kawasan regional yang sudah terjadi saat ini, antara lain peran bank memfasilitasi *local currency transaction* dan *cross-border*;

- 3) Rencana penyusunan *roadmap capacity building* diusulkan untuk menjunjung prinsip partisipatif dan komprehensif, terutama melalui kegiatan *sharing knowledge* antara ASEAN-5 dengan BCMLV (Brunei Darussalam, Cambodia, Myanmar, Lao PDR, dan Vietnam). Selain itu, program *capacity building* diharapkan dapat mengangkat isu atau topik yang relevan dengan kondisi AMS secara umum dan isu-isu terkini seperti digitalisasi; dan
- 4) Rencana finalisasi ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint 2026-2030*.

3.3. Financial Sector Assessment Program (FSAP) Review Indonesia 2023/2024

Financial Sector Assessment Program (FSAP) merupakan suatu program bersama antara IMF dan World Bank yang dimulai pada tahun 1999 untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam mengenai sektor keuangan suatu negara. FSAP dilakukan sebagai respon atas krisis keuangan pada tahun 1990-an untuk menilai sistem keuangan mengingat bahwa kondisi kesehatan dan fungsi sektor keuangan suatu negara akan mempengaruhi perekonomian negara tersebut dan dapat berimbas pada kinerja sektor keuangan dan ekonomi negara lain. Bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan global, FSAP dibangun sebagai suatu mekanisme untuk: (i) mengidentifikasi

kekuatan dan kerentanan sistem keuangan suatu negara untuk mengurangi krisis; (ii) menentukan bagaimana sumber-sumber risiko utama dikelola; (iii) memastikan pengembangan dan *technical assistance* yang dibutuhkan di sektor keuangan, dan (iv) membantu memprioritaskan respons kebijakan. Indonesia, sebagai anggota G20 dan salah satu *systemically important financial sector* (SIFS), wajib menjalani FSAP setiap 5 tahun sekali oleh IMF dan World Bank. Sebelumnya, Indonesia sudah menjalani FSAP sebanyak 2 kali yaitu pada 2009/2010 dan 2016/2017.

FSAP Indonesia 2023/2024 meliputi 16 area asesmen yang terbagi dalam dua kunjungan, yaitu *First Mission* (sudah dilaksanakan pada tanggal 20 September s.d. 16 Oktober 2023) dan *Second (Main) Mission*. Pelaksanaan *Second Mission* terbagi menjadi dua kunjungan (*visit*), yaitu *1st visit* pada 22 Januari s.d. 6 Februari 2024 dan *2nd visit* pada 5 s.d. 18 Maret 2024.

First Mission melakukan asesmen terhadap delapan area, yaitu: i) *Banking supervision and regulation: Basel core principles* (BCP) dan *Core principles for islamic finance regulation* (CPIFR); ii) *Systemic liquidity management* (SLM); iii) *Financial safety nets and crisis management* (FSN-CM); iv) *Systemic risk analysis/stress-test* (ST); v) *Long-term finance and capital markets development* (LTF); vi) *Climate-related and environmental risks and opportunities* (CERO); vii) *Payment systems* (RTGS); dan viii) *Non-payment system financial market infrastructures* (BI-SSSS). OJK terlibat pada hampir seluruh area, kecuali RTGS dan BI-SSSS.

Pada *Second Mission*, OJK telah menanggapi kuesioner serta permintaan data dan informasi pada delapan area asesmen, yaitu: i) *Corporate Sector Analysis*; ii) *Macroprudential Policy*; iii) *Capital Market Oversight* (IOSCO); iv) *Insurance Oversight and Pension Fund*; v) *Market Conduct Overview*; vi) *Financial Infrastructure/Access to Finance*; vii) *Role of the State*; dan viii) *Fintech and Financial Digitalization*.

Pada Triwulan III 2024, OJK telah menjalani FSAP Review Indonesia topik *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* pada tanggal 20 September – 10 Oktober 2023. Dalam pertemuan dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai pemenuhan masing-masing *essential criteria* dari 29 *Core Principles* yang diatur dalam dokumen BCP. *Core Principles* dimaksud dapat dikategorikan menjadi 2 besaran topik, yaitu: i) *Principles 1 – 13 focus on powers, responsibilities and functions of supervisors*; dan ii) *Principles 14 – 29 focus on prudential regulations and requirements for banks*.

Pada bulan Agustus 2024, IMF juga telah mempublikasikan hasil laporan FSAP Review Indonesia topik *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Financial System Stability Assessment (FSSA)* pada *website* resmi IMF.

4. Pengembangan Industri Perbankan

4.1 Pelaksanaan *Capacity Development* Bagi Industri Perbankan

OJK telah menyelenggarakan kegiatan *capacity building* dalam rangka meningkatkan pemahaman industri perbankan terkait perubahan iklim, risiko, dampak, upaya adaptasi dan mitigasi secara

komprehensif, serta implementasi kerangka *climate risk stress testing* secara khusus.

Latar belakang pelaksanaan *capacity building* tersebut adalah adanya kebutuhan membangun pemahaman dan meningkatkan kapasitas industri perbankan sebagai salah satu aspek *enabler* dalam pengembangan maupun implementasi kebijakan Keuangan Berkelanjutan, serta dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Adapun selama periode Triwulan III – 2024, OJK telah melaksanakan kegiatan *capacity development* dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Seminar bertema *Sustainable Finance Taxonomy*, diselenggarakan pada Agustus 2024;
- 2) FGD *In Depth Interview* Pelaksanaan *Piloting Climate Risk Stress Testing Phase 1 Tahun 2024*; dan
- 3) Seminar bertema *ESG Data Reporting and Disclosure*; dan

4.2 Penerbitan Panduan Resiliensi Digital (*Digital Resilience*)

Panduan Resiliensi Digital disusun untuk melengkapi rangkaian kebijakan akselerasi transformasi digital perbankan. Digitalisasi memberikan manfaat untuk meningkatkan efisiensi di berbagai aspek. Namun demikian, digitalisasi turut menghadirkan sejumlah tantangan dan risiko bagi perbankan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi.

Resiliensi Digital merupakan konsep ketahanan yang lebih luas dari *cyber security* karena terkait dengan kemampuan suatu organisasi/bisnis untuk dapat tumbuh dan bertahan di tengah lingkungan yang

berubah secara dinamis dan bergantung pada teknologi.

Dalam rangka mengawal Bank untuk mempersiapkan ketahanan digital, kerangka resiliensi digital yang disusun secara umum meliputi ketahanan terhadap dinamika bisnis, ketahanan terhadap disrupsi/gangguan, serta memperhatikan aspek perlindungan nasabah.

Kerangka Resiliensi Digital sebagaimana disusun pada Panduan Resiliensi Digital, secara umum menitikberatkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Aspek ketahanan terhadap dinamika bisnis yang tercermin dalam dimensi *Digital Competitiveness*. Hal ini meliputi pengembangan produk yang berorientasi konsumen, adopsi teknologi terkini secara cepat, tepat, dan bertanggungjawab, serta transformasi desain organisasi, kepemimpinan digital, budaya digital, dan talenta digital.
- 2) Aspek ketahanan terhadap disrupsi/gangguan yang tercermin dalam kerangka manajemen kelangsungan bisnis atau *Business Continuity Management* (BCM), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yakni:
 - a. Tahap Antisipasi (*Anticipate*) yang merupakan proses mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan gangguan atau ancaman pada lingkungan digital.
 - b. Tahap Bertahan dan Pulih (*Withstand and Recover*) yang merupakan proses

dalam menghadapi insiden keamanan atau gangguan dengan tetap memastikan operasional bank secara efektif.

- c. Tahap Berkelanjutan (*Sustain*) yang merupakan proses evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sebagai upaya untuk mengembangkan prosedur ketahanan yang lebih baik.
- 3) Sebagai bagian dari perlindungan konsumen di era digital, kerangka Resiliensi Digital juga memperhatikan aspek nasabah yang meliputi *customer incident management*, *customer incident recovery*, dan *customer post-recovery services*.

Kerangka Resiliensi Digital beserta aspek yang terkait telah dimuat dalam Panduan Resiliensi Digital dengan tujuan agar dapat menjadi acuan bagi bank dalam mempersiapkan, menghadapi, dan kembali pulih setelah terjadinya gangguan operasional teknologi atau disrupsi/insiden siber dengan meminimalkan antara lain kerugian nasabah, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial. Hal tersebut juga merupakan salah satu wujud dukungan OJK terhadap perbankan Indonesia dalam peningkatan akselerasi transformasi digital serta memperkuat ketahanan bisnis dan operasional bank di era digital dalam mendukung perekonomian nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Inovasi dan Kolaborasi Bersama Generasi Muda untuk Membangun Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Perkembangan ekonomi global saat ini dipengaruhi dua kekuatan besar yang saling berinteraksi dan meningkatkan dinamika ekonomi yang semakin kompleks: teknologi serta perubahan demografi....

Dalam peradaban modern, perkembangan teknologi telah menjelma sebagai katalisator utama dalam berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi tetapi juga memberikan dampak transformatif pada lanskap industri, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara yang sangat beragam. Teknologi digital yang berkembang semakin pesat diyakini dapat menciptakan berbagai peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi pendorong utama integrasi ekonomi global dengan meningkatkan konektivitas antarnegara, memfasilitasi perdagangan internasional, hingga megundang aliran investasi asing langsung (*foreign direct investment*).

Sementara itu, perubahan demografi seperti pertumbuhan penduduk maupun pergeseran struktur kependudukan berdasarkan kelompok usia dapat berdampak signifikan terhadap pola konsumsi, pasar tenaga kerja, serta kebijakan ekonomi pada berbagai negara. Pertumbuhan penduduk kelompok usia produktif dalam jumlah besar di negara berkembang memberikan peluang untuk ekspansi industri dan pasar tenaga kerja, tetapi sekaligus menuntut kebijakan yang akomodatif dari Pemerintah untuk menghadapi tantangan pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, penuaan populasi di negara maju memerlukan adaptasi dalam struktur tenaga kerja dan sistem jaminan sosial serta penerapan teknologi digital maupun otomatisasi untuk membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia.

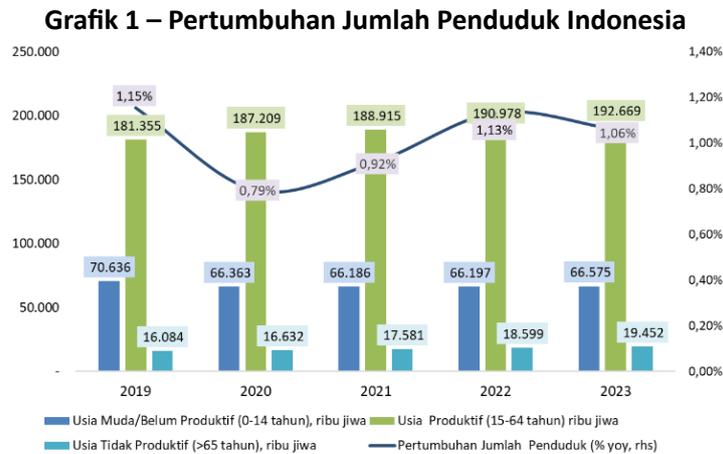
Oleh karena itu, negara yang berhasil mengelola interaksi antara perubahan demografi dengan mengadaptasi teknologi secara cermat dan tepat sasaran akan lebih siap dalam menghadapi kompetisi di era digital, yang pada gilirannya dapat mendorong kerbelanjutan pembangunan ekonomi.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan mayoritas populasi penduduk usia muda memiliki potensi luar biasa dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan dinamis....

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia relatif berfluktuasi dengan kecenderungan melandai dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Grafik 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tumbuh 1,06% (yoy) pada tahun 2023 atau lebih rendah dari 1,13% (yoy) pada tahun 2022 dan 1,15% (yoy) pada tahun 2019. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk berusia muda/belum produktif dengan rentang usia 0-14 tahun yang semakin menurun. Penurunan jumlah penduduk berusia muda yang terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar -6,05% (yoy) atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 70,64 juta jiwa.

Meskipun demikian, pertumbuhan jumlah penduduk berusia muda sudah kembali positif pada tahun 2022 dan 2023. Bahkan, pertumbuhan jumlah penduduk berusia muda pada tahun 2023 menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir yakni sebesar 0,57% (yoy) atau mencapai 66,58 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 66,2 juta jiwa. Di sisi lain, jumlah penduduk berusia produktif dengan rentang usia 15-64 tahun masih mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah penduduk berusia produktif yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,23% (yoy) atau mencapai 187,21 juta jiwa. Bersamaan dengan itu, jumlah penduduk berusia tidak produktif

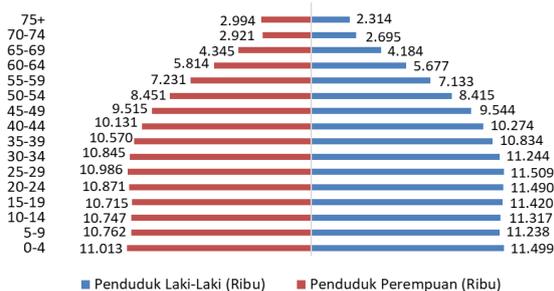
dengan usia 65 tahun ke atas juga terus meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,79% (yoy) atau mencapai 190,98 juta jiwa.



Sumber: BPS, diolah

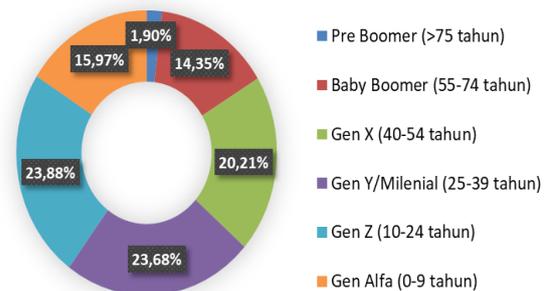
Jumlah populasi penduduk berusia muda dan produktif yang lebih besar dibandingkan jumlah populasi penduduk berusia tidak produktif menjadikan piramida penduduk Indonesia berbentuk kerucut (Grafik 2). Piramida ini menunjukkan penduduk Indonesia berada dalam keadaan bertumbuh seiring angka natalitas yang tinggi dan tingkat mortalitas yang rendah. Generasi Y dan Generasi Z mendominasi populasi penduduk di Indonesia (Grafik 3). Besarnya populasi penduduk berusia muda memberikan banyak peluang baik di sisi tenaga kerja, inovasi, kewirausahaan, hingga transformasi digital. Generasi Muda (Generasi Y dan Generasi Z) yang tumbuh dengan teknologi digital memiliki cara pandang dan kebutuhan yang berbeda dalam hal keuangan. Hal ini dapat mendorong terciptanya inovasi layanan dan produk keuangan serta membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan dinamis.

Grafik 2 – Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2023



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3 – Komposisi Penduduk Indonesia per Kelompok Generasi Tahun 2023



Sumber: BPS, diolah

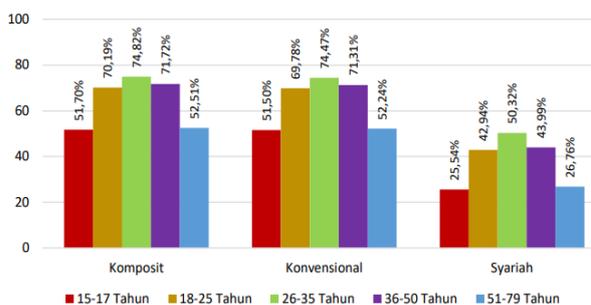
Pemahaman Literasi dan Inklusi Keuangan Generasi Muda semakin berkembang namun perlu ditingkatkan agar dapat berperan lebih aktif sebagai “agent of change” pembangunan ekonomi....

Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, literasi dan inklusi keuangan menjadi aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan cerdas secara finansial. Secara harfiah, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses dan

pemanfaatan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

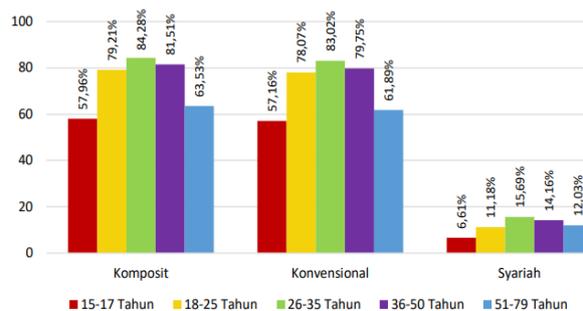
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, terdapat kesenjangan Indeks Literasi maupun Inklusi Keuangan antara masyarakat kelompok usia 26-35 tahun dengan masyarakat kelompok usia 15-17 tahun serta 51-79 tahun. Indeks Literasi maupun Inklusi Keuangan pada masyarakat kelompok usia 26-35 tahun mencatatkan indeks tertinggi. Sebaliknya, Indeks Literasi maupun Inklusi Keuangan pada masyarakat kelompok usia 15-17 tahun serta 51-79 tahun lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya dalam skala nasional (Grafik 4 dan Grafik 5). Rendahnya literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat kelompok usia 15-17 tahun serta 51-79 tahun menandakan bahwa masih ada kesenjangan antara akses dan pemahaman tentang detail produk, manfaat, dan risikonya jasa layanan keuangan saat ini. Hal tersebut juga dapat dipandang sebagai sebuah sinyal bahwa masyarakat kelompok usia 15-17 tahun serta 51-79 tahun rentan menghadapi tantangan finansial pada kemudian hari.

Grafik 4 – Indeks Literasi Keuangan Menurut Kelompok Umur Tahun 2023



Sumber: OJK dan BPS

Grafik 5 – Indeks Inklusi Keuangan Menurut Kelompok Umur Tahun 2023



Sumber: OJK dan BPS

Generasi Muda sebagai “*agent of change*” memegang peranan krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemahaman yang baik tentang literasi dan inklusi keuangan akan membekali mereka dengan kemampuan untuk berpartisipasi aktif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi serta agar terhindar dari jeratan utang berlebihan, judi *online*, investasi bodong dan masalah keuangan lainnya. Sebagai informasi, Pemerintah bersama OJK menetapkan target Indeks Inklusi Keuangan mencapai 90% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, perlu ada sinergi antara pemangku kepentingan dalam melakukan percepatan akses keuangan di masyarakat, salah satunya melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Melalui TPAKD ini, OJK mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat di daerah seperti pinjaman melawan rentenir ataupun pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong kemajuan UMKM.

Generasi Y dan Generasi Z memiliki kemiripan karakteristik yang membedakannya dengan generasi sebelumnya dalam hal preferensi terhadap produk dan layanan keuangan....

Seiring dengan perubahan zaman, setiap generasi memiliki ciri khas masing-masing yang membuat preferensinya terhadap produk dan layanan keuangan menjadi tidak sama. Generasi *Baby Boomer* dan Generasi X mengalami masa transisi dari dunia analog ke digital sehingga lebih terbiasa dengan sistem keuangan tradisional seperti bank konvensional dan kartu kredit. Sementara itu, Generasi Y yang tumbuh di tengah perkembangan pesat teknologi, lebih terbuka terhadap inovasi keuangan digital,

seperti aplikasi *mobile banking* dan *Financial Technology (Fintech)*. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Generasi Z yang tumbuh sepenuhnya dalam era digital, memiliki preferensi yang lebih kuat terhadap teknologi dan layanan keuangan berbasis aplikasi.

Akselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan mendorong Generasi Y dan Generasi Z mencari kenyamanan dan fleksibilitas dalam mengelola keuangan. Kedua Generasi ini merupakan kelompok yang rentan secara finansial dengan gaya hidup konsumtif dibandingkan menabung atau berinvestasi, karena menganut prinsip *You Only Live Once (YOLO)* dan *Fear Of Missing Out (FOMO)*. Oleh karena itu, Generasi Muda yang sudah terbiasa dengan teknologi dan *platform digital* cenderung lebih memilih untuk mengelola keuangannya melalui aplikasi *mobile banking*, dompet digital (OVO, GoPay, DANA, ShopeePay, LinkAja, AstraPay, dsb) untuk transaksi sehari-hari atau aplikasi investasi (Bibit, Ajaib, maupun aplikasi saham). Generasi Muda juga lebih terbuka terhadap investasi dalam aset digital seperti *cryptocurrency* serta tertarik pada potensi teknologi *blockchain* sebagai alternatif investasi, meskipun saat ini masih terbilang baru dan relatif berisiko.

Layanan Keuangan Digital: *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* dan *Buy Now Pay Later (BNPL)* Menjadi Tren Populer di Kalangan Generasi Muda....

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak Generasi Muda yang mengadopsi layanan *P2P Lending* atau pinjaman *online* untuk mendapatkan pinjaman yang lebih cepat maupun alasan investasi. *P2P Lending* secara umum telah berhasil menggeser paradigma masyarakat akan industri sektor jasa keuangan dan “menantang” tradisi proses kredit konvensional. Industri *P2P Lending* yang terus bertumbuh baik dari sisi jumlah *platform*, pengguna, maupun jumlah dana yang mengalir tidak terlepas dari keterlibatan Generasi Muda di dalamnya. *Platform P2P Lending* banyak dikembangkan dan didanai oleh Generasi Muda karena prosesnya relatif mudah mulai dari registrasi sebagai *lender*, memilih *borrower*, menentukan pinjaman yang akan diberikan, hingga mengecek pembayaran setiap bulannya bisa dilakukan secara *online* baik melalui *smartphone* maupun *laptop*.

Generasi Muda yang bertindak sebagai *lender* dalam *P2P Lending* juga memiliki fleksibilitas dalam menentukan batasan waktu untuk mengembangkan dana yaitu mulai dari 6, 12, hingga 24 bulan. Fleksibilitas tersebut secara langsung memberikan keluasaan bagi Generasi Muda dalam menentukan rencana pengembangan dana ke depan untuk mendapatkan keuntungan. Daya tarik magnet lainnya dari *P2P Lending* adalah karena beberapa *platform* berani menawarkan tingkat pengembalian yang relatif tinggi dengan imbal hasil di atas 10% per tahun atau melampaui bunga deposito Bank. Fakta menarik lainnya dari *P2P Lending* adalah sebagian besar *lender* adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menjadi *lender* pada *P2P Lending*, Generasi Muda turut berkontribusi membantu para UMKM dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka.

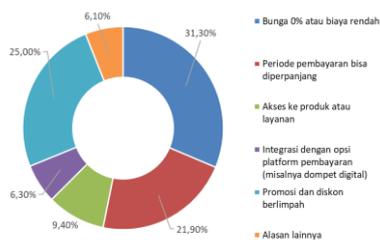
Di sisi lain, Generasi Muda telah secara masif menggunakan *e-commerce* (Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee) untuk berbelanja. Berbagai aplikasi *e-commerce* saat ini telah terintegrasi dengan layanan dompet digital atau rekening bank mereka serta terdapat fitur cicilan atau *Buy Now Pay Later (BNPL)* guna mempermudah transaksi. Layanan seperti *BNPL* menjadi sangat populer di kalangan Generasi Muda karena memberikan kemudahan untuk membeli barang sekarang dan membayar nanti tanpa bunga/biaya rendah serta memberikan fleksibilitas dalam mengelola pembayaran mereka. Dikutip dari Indonesia Millennial Report 2024 yang dirilis oleh IDN Research Institute, *BNPL* telah menjadi metode pembayaran yang cukup populer di kalangan Generasi Y Indonesia.

Hasil survei tambahan dalam laporan tersebut yang melibatkan 50 responden menunjukkan bahwa 64% milenial telah menggunakan fitur tersebut. Beragam alasan melatarbelakangi penggunaan *BNPL*

tersebut salah satunya yang paling utama adalah karena bunganya 0% atau biaya lebih rendah (Grafik 6). Namun, mayoritas responden (lebih dari 50%) melaporkan bahwa pengeluaran untuk *BNPL* menyumbang kurang dari 50% dari total pengeluaran bulanan mereka (Grafik 7). Hasil survei menunjukkan bahwa notifikasi dan penawaran dari aplikasi belanja berperan penting dalam mendorong penggunaan *BNPL*.

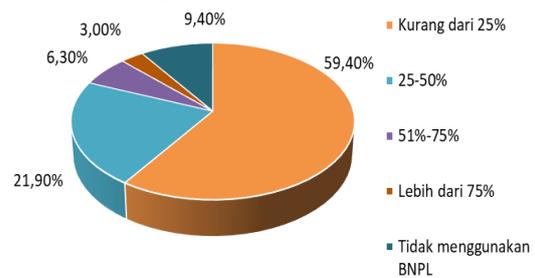
Selaras dengan hasil survei tersebut, Data PT Pefindo Biro Kredit atau Idscore mencatat bahwa jumlah pengguna *BNPL* mencapai 14,37 juta pengguna per Juni 2024 atau tumbuh 9,35% (yoy). Peningkatan jumlah pengguna *BNPL* ini membuktikan bahwa produk ini tidak terkena imbas dari penurunan daya beli masyarakat seiring menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah. Secara spasial, mayoritas pengguna *BNPL* tersebar di Provinsi Jawa Barat sebanyak 24,95% (Rp7,52 triliun), diikuti oleh DKI Jakarta sebanyak 14,10% (Rp4,25 triliun), dan Jawa Timur sebanyak 10,8% (Rp3,26 triliun). Berdasarkan kelompok usia, pengguna *BNPL* paling banyak dengan porsi 48,06% terdapat di masyarakat dengan rentang usia 20-30 tahun (6,9 juta debitur), kemudian diikuti masyarakat dengan rentang usia 30-40 tahun (4,2 juta debitur), selanjutnya masyarakat dengan rentang usia 40-50 tahun (1,8 juta debitur), dan terakhir masyarakat dengan usia di bawah 20 tahun (866,20 ribu debitur).

Grafik 6 – Pertimbangan yang Mendasari Generasi Y dalam Memanfaatkan Fitur *BNPL*



Sumber: IDN Research Institute

Grafik 7 – Rasio Penggunaan *BNPL* terhadap Total Pengeluaran Bulanan Generasi Y



Sumber: IDN Research Institute

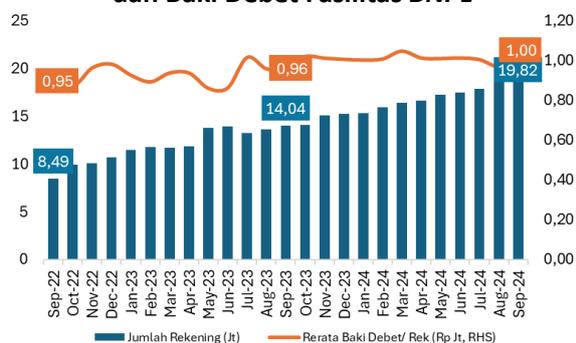
Peningkatan jumlah rekening dan baki debit fasilitas *BNPL* dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan telah terjadi pergeseran pola konsumsi dan kebutuhan finansial Generasi Muda...

Tren kenaikan jumlah rekening dan baki debit fasilitas *BNPL* (Grafik 8) mengindikasikan bahwa Generasi Muda cenderung menghindari utang konvensional seperti kartu kredit dengan bunga tinggi dan memilih produk keuangan yang menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran. Fasilitas *BNPL* ini membantu Generasi Muda melakukan perencanaan keuangan karena bisa mengatur cicilan sesuai jangka waktu yang dipilih. Mereka dapat membeli barang atau layanan yang dibutuhkan saat ini dengan cara mencicil tanpa bunga/biaya lebih rendah dalam periode waktu tertentu (biasanya 1-3 bulan). Namun demikian, *BNPL* mendorong konsumerisme yang lebih tinggi, karena Generasi Muda merasa lebih leluasa membeli barang-barang yang mereka inginkan dengan cara yang lebih terjangkau dan tidak langsung membebani keuangan mereka dalam jangka pendek.

BNPL juga lebih mudah dikelola dibandingkan dengan menggunakan kartu kredit, yang sering kali memiliki bunga tinggi jika tidak dibayar penuh pada tanggal jatuh tempo. Persyaratan *BNPL* juga termasuk lebih ringan dibandingkan kartu kredit dan bebas dari iuran tahunan. Selain itu, teknologi yang terintegrasi dengan *e-commerce* memungkinkan Generasi Muda untuk langsung memanfaatkan layanan *BNPL* saat berbelanja *online*, tanpa harus meninggalkan aplikasi atau *platform* yang digunakan. Perkembangan pengguna fasilitas *BNPL*, terutama di kalangan generasi ini menunjukkan bahwa

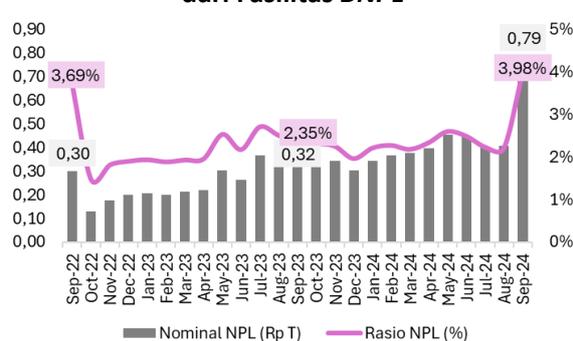
mereka lebih memilih solusi keuangan digital yang inovatif, yang tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi, tetapi juga memberikan transparansi dan kontrol lebih besar atas keuangan mereka.

Grafik 8 – Perkembangan Jumlah Rekening dan Baki Debet Fasilitas BNPL



Sumber: LBUT diolah

Grafik 9 – Perkembangan Kredit Bermasalah dari Fasilitas BNPL



Sumber: LBUT diolah

Meskipun demikian, Generasi Muda ditengarai menjadi salah satu penyumbang utama dari meningkatnya risiko kredit bermasalah pada fasilitas BNPL (Grafik 9) dalam dua tahun terakhir seiring kian maraknya pengguna dari kalangan generasi tersebut. Hal mendasar yang ditengarai mendorong kenaikan jumlah rekening kredit BNPL yang diikuti dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah pada fasilitas tersebut adalah lantaran inklusi keuangan di negara kita terutama pada Generasi Muda belum optimal. Inklusi keuangan yang belum optimal sebagaimana tecermin pada Indeks Inklusi Keuangan pada Grafik 5, menandakan bahwa masyarakat khususnya Generasi Muda belum memiliki akses atau pemahaman yang memadai tentang layanan keuangan formal. Dengan kata lain, ada banyak Generasi Muda yang masih belum tersentuh perbankan namun sebenarnya memiliki kelayakan kredit yang baik.

Di tengah revolusi teknologi dan digitalisasi, Generasi Muda dapat membuka peluang baru dalam ekonomi digital untuk menyongsong pembangunan ekonomi berkelanjutan....

Generasi Muda sering disebut sebagai *digital natives* yang memiliki beberapa keunggulan karakteristik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya dalam menggerakkan roda ekonomi digital. Generasi ini dikenal sangat adaptif dan cepat dalam mengadopsi teknologi baru sehingga menciptakan pasar yang besar untuk produk dan layanan digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa Generasi Muda memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi tren dan potensi pasar yang belum digarap atau bahkan mungkin juga belum disadari oleh generasi-generasi sebelumnya. Selain itu, Generasi Muda juga cenderung lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan ide-ide segar dalam pengembangan aplikasi, *platform digital* maupun model bisnis baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Sebagai contoh konkret, tidak sedikit Generasi Muda yang berperan dalam kemunculan berbagai *startup* yang memberikan solusi inovatif di berbagai bidang seperti *Fintech*, *Edutech*, dan *Agritech*.

Suatu kebanggaan yang mungkin belum disadari sepenuhnya oleh Generasi Muda saat ini adalah mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga bagian dari inovator, kreator, bahkan penggerak utama perubahan yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, salah satunya melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Generasi Muda memiliki kekuatan besar untuk membawa perspektif baru yang dapat menciptakan perubahan positif pada cara bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Seiring pesatnya perkembangan teknologi yang didukung dengan pemikiran kreatif dan inovatif, Generasi Muda dipercaya dapat menghasilkan solusi baru yang lebih efektif dan relevan untuk menjawab berbagai kebutuhan zaman. Misalnya, dengan cara membangun aplikasi

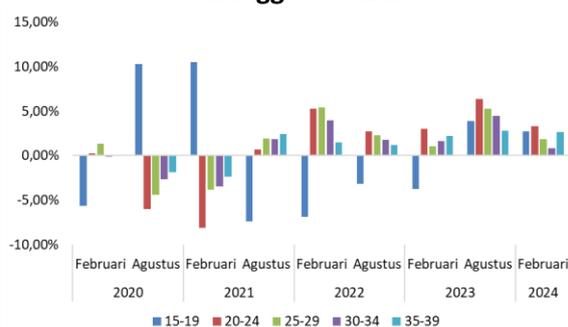
platform digital atau membuat produk baru yang bisa membantu penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Eksplorasi potensi dan peluang Generasi Muda dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan masih berdampak erat dengan beberapa tantangan yang perlu diatasi....

Tumbuh di era digitalisasi tidak serta merta menjadikan semua Generasi Muda memiliki kesiapan yang sama sebagai “*agent of change*” dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tantangan pertama yang harus segera diatasi adalah terkait Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan pada Generasi Muda sebagaimana Grafik 4 dan Grafik 5 yang masih belum sesuai target Pemerintah maupun OJK. Tantangan berikutnya, meskipun banyak Generasi Muda yang terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, namun mereka seringkali belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu faktor yang mendasarinya adalah lantaran sistem atau kurikulum pendidikan saat ini belum cukup optimal membekali Generasi Muda dengan keterampilan digital dan kewirausahaan untuk bersaing di era ekonomi modern.

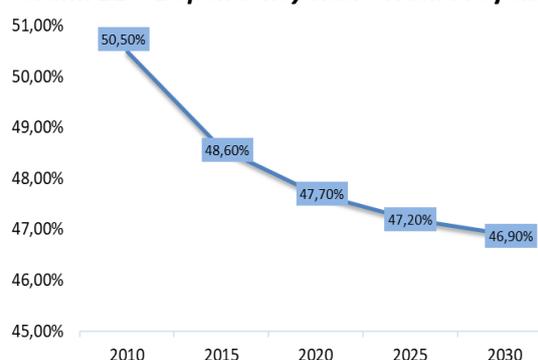
Tidak kalah penting, masih terdapat ketimpangan aksesibilitas dalam pemanfaatan teknologi, terutama di kalangan Generasi Muda yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang. Keterbatasan infrastruktur digital di berbagai wilayah yang sulit terjangkau dikhawatirkan dapat memperburuk ketidakmerataan peluang bagi Generasi Muda dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Apabila hal tersebut diabaikan, maka akan semakin memperparah masalah pengangguran di kalangan Generasi Muda, karena mereka kesulitan untuk mengakses pelatihan, informasi, dan peluang kerja yang ada di dunia digital. Angka pengangguran yang meningkat pada gilirannya dapat memperburuk angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yakni rasio ketergantungan antara jumlah penduduk produktif dan tidak produktif.

Grafik 10 – Pertumbuhan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir



Sumber: BPS, diolah

Grafik 11 – Dependency Ratio Hasil Proyeksi



Sumber: BPS, diolah

Grafik 10 menggambarkan adanya fluktuasi dalam pertumbuhan penduduk berumur 15 tahun yang bekerja selama seminggu terakhir dalam lima tahun ke belakang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan Pemerintah, dan perubahan demografi. Berdasarkan hasil sensus pada Agustus 2023 dan Februari 2024, jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu terakhir dan termasuk dalam kelompok Generasi Muda tumbuh positif di berbagai rentang usia. Namun demikian, jumlah penduduk yang bekerja pada Kelompok Generasi Muda di seluruh rentang usia pada Februari 2024 mencatatkan perlambatan dibandingkan

Agustus 2023 karena terdampak gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketika Generasi Muda tidak dapat berkontribusi secara produktif dalam aktivitas ekonomi, maka beban finansial akan semakin berat, baik bagi keluarganya maupun masyarakat.

Walaupun jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja cenderung tumbuh melambat pada Februari 2024, tetapi angka *dependency ratio* hasil proyeksi pada tahun 2025 diperkirakan akan melandai yakni sebesar 47,20% atau lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka *dependency ratio* sebesar 47,20% berarti bahwa untuk setiap 100 orang yang berada dalam usia produktif (kelompok usia 15-64 tahun), terdapat sekitar 47 orang yang bergantung pada mereka. Orang-orang yang bergantung tersebut termasuk kelompok penduduk usia belum produktif (di bawah usia 15 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (>64 tahun). Menurunnya angka *dependency ratio* menandakan bahwa jumlah penduduk (berusia muda dan/atau berusia tidak produktif) yang bergantung pada penduduk produktif menjadi semakin sedikit (Grafik 11).

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sangat penting untuk memastikan produktivitas Generasi Muda terus berada dalam tren meningkat. Melalui upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan mereka, Generasi Muda dapat lebih berdaya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang pada gilirannya akan menurunkan angka *dependency ratio*. Hal ini akan mengurangi beban pada penduduk usia produktif, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika produktivitas Generasi Muda meningkat, maka kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan juga akan membaik, karena lebih banyak individu yang berkontribusi aktif dalam perekonomian dan mendukung kesejahteraan sosial.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta minat kewirausahaan pada Generasi Muda dengan mengadaptasi perkembangan teknologi merupakan elemen penting bagi perekonomian nasional....

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Generasi Muda kini memiliki akses yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keuangan dan merencanakan keuangan secara lebih bijak. Dengan berbagai aplikasi dan *platform digital* yang menyediakan layanan keuangan, Generasi Muda tidak hanya dapat mengelola keuangan pribadi dengan lebih efisien, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Teknologi finansial yang semakin canggih mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan akses yang lebih luas kepada produk dan layanan perbankan, investasi, dan pinjaman yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mempermudah mereka untuk merencanakan keuangan untuk kebutuhan jangka pendek maupun panjang dan terhindar jebakan utang yang tidak produktif.

Perubahan zaman juga telah membawa teknologi menjadi faktor utama dalam dunia kewirausahaan. Generasi Muda yang menguasai teknologi dapat memanfaatkan berbagai *platform digital* untuk memulai usaha, mengembangkan kapasitas bisnis, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kewirausahaan berbasis teknologi digital juga memungkinkan Generasi Muda untuk tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi orang lain, yang pada gilirannya dapat memperkuat sektor UMKM dan memberikan sumbangsih pada perkembangan ekonomi domestik. Dukungan infrastruktur seperti pengadaan inkubator dan akselerator bisnis serta kolaborasi yang kuat dengan startup dibutuhkan oleh sektor UMKM agar bisa semakin terdigitalisasi, efisien, dan ekspansif ke depannya nanti.

Lembaga Keuangan harus berinovasi dalam menghadirkan produk dan layanan keuangan serta memberdayakan Generasi Muda untuk membangun sektor jasa keuangan Indonesia....

Masa depan sektor jasa keuangan Indonesia sangat bergantung pada Generasi Muda yang merupakan setengah dari populasi penduduk di Indonesia. Kebutuhan dan preferensi keuangan dari Generasi Muda secara langsung maupun tidak langsung akan sangat memengaruhi arah pengembangan produk dan layanan keuangan di masa depan. Dengan ketergantungan yang besar pada Generasi Muda, maka Lembaga Keuangan sudah seyogyanya menginovasi produk serta layanan keuangan mereka menjadi lebih inklusif, aksesibel, dan sesuai dengan kebutuhan Generasi Muda.

Pengembangan produk dan layanan keuangan yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan Generasi Muda tidak hanya akan membantu mereka membangun masa depan finansial yang lebih baik tetapi juga mengoptimalkan potensi mereka untuk berkontribusi pada kemajuan sektor jasa keuangan Indonesia. Beberapa upaya yang mungkin sudah dilakukan Lembaga Keuangan terkait hal tersebut tetapi masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, antara lain:

1. Menghadirkan produk-produk simpanan maupun investasi yang sesuai dengan profil Generasi Muda.
2. Mengembangkan *platform* keuangan digital dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti *blockchain*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Big Data* dalam merancang produk dan layanan keuangan berbasis digital yang aman, cepat, dan efisien.
3. Menghadirkan ekosistem digital yang memungkinkan Generasi Muda untuk mengakses berbagai layanan keuangan, mulai dari pembayaran, investasi, hingga pinjaman, dalam satu *platform digital* yang terintegrasi.
4. Mempublikasikan informasi mengenai tren partisipasi Generasi Muda di pasar modal Indonesia, baik di Saham maupun Surat Berharga Negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dalam negeri sekaligus mendorong Generasi Muda untuk melakukan diversifikasi portofolio asetnya.
5. Mengadaptasi teknologi agar perusahaan dapat meningkatkan pengalaman yang lebih terhubung dengan pelanggan.
6. Menggunakan pendekatan gamifikasi dan terlibat dalam strategi pengayaan kurikulum pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi Generasi Muda dengan memberikan pembelajaran tentang konsep dasar keuangan, investasi, dan kewirausahaan.
7. Mendorong semangat kewirausahaan pada Generasi Muda yang ingin memulai usaha melalui kerja sama dengan inkubator dan akselerator bisnis.
8. Memanfaatkan media sosial, aplikasi seluler, dan situs web untuk menyebarluaskan informasi tentang produk atau layanan keuangan agar lebih diketahui oleh Generasi Muda.
9. Menjalin kolaborasi dengan *influencer* yang kredibel untuk membantu menjembatani kesenjangan antara lembaga keuangan dan Generasi Muda. *Influencer* dapat berbagi cerita keuangan pribadi, saran, dan mempromosikan layanan yang relevan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
9.	Rasio <i>Loan at Risk (LaR)</i>	$\frac{\text{Restru Kredit kol. 1 + Kredit kol. 2 + Kredit NPL}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
10.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
11.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
12.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
15.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
16.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
17.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II**GLOSSARY**

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid ($AL = \text{Final Excess Reserve} + \text{Kas} + \text{Penempatan pada BI lainnya} + \text{Reserve Repo}$) terhadap Dana Pihak Ketiga ($DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/DPK > 10\%$.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> ($NCD = 30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/NCD > 50\%$.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan $(\text{modal}/\text{ATMR}) \times 100\%$, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Concentration Ratio</i> (CR)	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.

Istilah	Keterangan
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)</i>	Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai "tersedia untuk dijual" diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
<i>Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)</i>	Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
I	
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko No.11 Tahun 2017).

Istilah	Keterangan
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset (HQLA)</i> dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan at Risk (LaR)</i>	<i>Loan at Risk (LaR)</i> merupakan indikator risiko atas kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 (kualitas Lancar) yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 (kualitas Dalam Perhatian Khusus), serta kredit bermasalah atau <i>Non Performing Loan (NPL)</i> .
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara

Istilah	Keterangan
	modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset (ROA)</i>	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.

Istilah	Keterangan
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)

Halaman ini sengaja dikosongkan



**Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Menara Radius Prawiro, Gedung A, Lantai 10
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dsapi@ojk.go.id**

